

**KEMENANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PADA
PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN CIREBON**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun Oleh :

RIVADHO RYIAMIZARD

(1806016072)

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Ibu Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara:

Nama : Rivadho Ryiamizard

NIM : 1806016072

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilu Legislatif 2019
Di Kabupaten Cirebon

Dengan ini telah kami setuju dan memohon agar segera diajukan untuk diujikan.
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 08 Juni 2023

Pembimbing



Dr. Rofiq Mahfudz, M. Si

NIP. 197303052016011901

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**KEMENANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PADA PEMILU
LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN CIREBON**

Disusun Oleh

RIVADHO RYIAMIZARD

1806016072

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 23 Juni 2023 dan telah dinyatakan LULUS

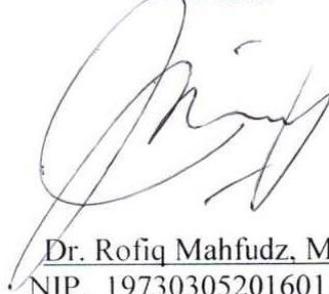
Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. Ahwan Fanani, M. Ag
NIP. 197809302003121001

Sekretaris



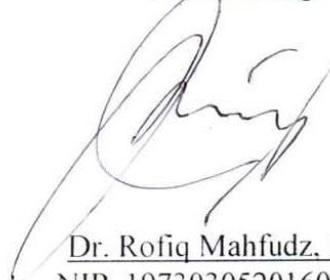
Dr. Rofiq Mahfudz, M. Si
NIP. 197303052016011901

Penguji



Moh. Yamin Darsyah, M. Si
NIP. 198409092019031007

Pembimbing



Dr. Rofiq Mahfudz, M. Si
NIP. 197303052016011901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Rivadho Ryiamizard menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul **“Kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kabupaten Cirebon”** merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi serta lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 08 Juni 2023

Yang menyatakan,



Rivadho Ryiamizard
NIM. 1806016072

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmaat serta taufik dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari perjalanan panjang perkuliahan ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia menuju jalan hidup yang bahagia dunia dan akhirt. Skripsi ini merupakan pembahasan singkat mengenai Kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon. Penyusunan skripsi ini dilakukan guna menenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam bidang Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunannya penulis menyadari betul bahwasanya skripsi ini tidak akan terealisasikan tanpa adanya bantuan moral dan materil serta bimbingan dari berbagai pihak terkait. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada;

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum.
3. Drs. Nur Syamsudin, M. A dan Muhammad Mahsun, M. A selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai pengarahan dan nasihat khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.
4. Muhammad Mahsun, M. A selaku wali dosen yang telah memberikan nasihat, membimbing dan mengarahkan dari tahun awal masuk hingga selesai perkuliahan.
5. Dr. Rofiq Mahfudz, M. Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan membimbing hingga terwujudnya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengejar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalamannya, sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berguna.

7. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. KPU Kabupaten Cirebon yang telah menerima dan membantu dalam pengumpulan data.
9. DPC PKB Kabupaten Cirebon dan terkhusus narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara.
10. Bapak dan Ibu penulis, Bapak Karso Suwarsa dan Ibu Iilis Maryani. Saudara Kandung penulis Klarisa Radisti yang telah memotivasi dan mendorong serta mendoakan penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan sebagaimana mestinya.
11. Rekan-rekan penulis Abdullah Sholeh, Farhan, Anang, Agus, Badri, Andreas, Riko, dan lain sebagainya yang telah berkontribusi besar dalam terselesainya skripsi ini.
12. Segenap keluarga besar ilmu politik B yang telah menemani perjalanan panjang perkuliahan di UIN Walisongo.
13. Segenap rekan-rekan seperjuangan penulis di ilmu politik angkatan 2018 yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Segenap keluarga besar Forum Mahasiswa Santri Buntet Pesantren Cirebon Semarang (FORMASI BPC Semarang).
15. Seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam menyusun skripsi ini.

Dalam penyusunan ini penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama, tempat dan lain sebagainya. Kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca akan sangat berarti bagi penulis dalam membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Semarang, 08 Juni 2023



Rivadho Ryiamizard
NIM. 1806016072

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam

Karya ini saya persembahkan pertama-tama untuk diri saya sendiri, seluruh orang-orang yang telah berjasa dalam hidup saya, dan kedua orang tua saya Ayahanda Karso Suwarsa dan Ibunda Lilis Maryani yang telah menyemangati, membesarkan, serta senantiasa mendoakan untuk kesuksesanku didalam setiap ibadahnya.

Untuk dosen wali saya, bapak Muhammad Mahsun, MA yang telah membimbing saya dalam perjalanan panjang saya di perkuliahan hingga mencapai kelulusan ini, serta beliau juga merupakan motivasi terbesar saya agar bisa menjadi orang yang hebat seperti beliau.

Untuk dosen pembimbing sekaligus mentor saya, bapak Dr. Rofiq Mahfudz, M. Si yang telah memberikan segala ilmu dan bimbingannya dari awal pembuatan skripsi ini hingga selesai, serta beliau juga merupakan motivasi terbesar saya agar bisa menjadi orang yang hebat seperti beliau.

Dan untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik prodi Ilmu Politik yang menjadi tempat bagi saya untuk menorehkan sepercik tinta sejarah dan pijakan awal dari kesuksesan saya di masa yang akan datang.

MOTTO

“TIDAK ADA KESUKESAN TANPA KERJA KERAS, TIDAK ADA
KEBERHASILAN TANPA KEBERSAMAAN, DAN TIDAK ADA KEMUDAHAN
TANPA ADANYA DO’A”

(H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D)

ABSTRAK

Studi ini membahas tentang kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon pada pemilu legislatif tahun 2019. Kemenangan tersebut berhasil mematahkan dominasi PDI-P. Dimana sejak reformasi hingga 2014 PDI-P merupakan partai yang tidak pernah merasakan satupun kalahkan di Kabupaten Cirebon. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji mengingat daerah tersebut merupakan daerah dengan basis NU terbanyak se-Jawa Barat. Namun, kiprah PKB sebagai representatif NU dibidang politik tidak memuaskan di Kabupaten Cirebon. Studi ini berusaha menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama mengapa PKB berhasil memenangkan pemilihan legislatif 2019 Kabupaten Cirebon. Kedua apa faktor yang mempengaruhi kemenangan PKB pada pemilihan legislatif 2019 Kabupaten Cirebon.

Studi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menguraikan kondisi institusional PKB. Data diperoleh dalam studi ini didasarkan hasil observasi lapangan dengan menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data Miles dan Huberman merupakan tehnik analisis yang digunakan distudi ini. Adapun teori yang digunakan meliputi teori pelebagaan partai Vicky Randall dan Larss Svansand serta teori strategi politik Peter Schooder.

Hasil studi ini menemukan kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon pada pemilu legislatif 2019 dikarenakan sebagai berikut; 1). Dalam mengahdapi pemilu legislatif 2019 PKB merekrut caleg-caleg yang memiliki modal sosial, kapital yang kuat, 2). PKB dalam kampanyenya lebih mempraktikan politik kehadiran dengan tag line “Peduli Ummat Melayani Rakyat” ketimbang hanya membuat opini-opini publik, 3). Caleg-caleg yang terpilih diwajibkan untuk bisa melakukan komunikasi politik baik di media sosial maupun non media sosial, 4). Adanya jalinan hubungan baik antara PKB dengan kiyai-kiyai, ulama’ dan tokoh kampung se-kecamatan. Adapun faktor yang mempengaruhi kemenangan PKB sebagai berikut; 1) Pengaruh KH. Ma’ruf Amin terhadap kenaikan suara PKB di Kabupaten Cirebon 2). adanya permasalahan internal di PDI-P yang berakibat pada penurunan suara.

Kata Kunci : *Kabupaten Cirebon, PKB, Pelebagaan Partai politik, Pemilu Legislatif*

ABSTRACT

This study discusses the victory of PKB in Cirebon Regency in the 2019 legislative election. The victory succeeded in breaking the dominance of PDI-P. Since the reform until 2014, PDI-P has never felt a single defeat in Cirebon Regency. This phenomenon is interesting to study considering that the area is the area with the most NU bases in West Java. However, PKB's work as a representative of NU in the political field was not satisfactory in Cirebon Regency. The study sought to answer two research questions. First, why PKB managed to win the 2019 Cirebon Regency legislative election. Secondly, what are the factors that influenced PKB's victory in the 2019 Cirebon Regency legislative election.

This study uses qualitative research with a case study approach to describe the institutional conditions of PKB. The data obtained in this study are based on the results of field observations using interview techniques and documentation. Miles and Huberman's data analysis technique is the analysis technique used in this study. The theories used include the institutionalization of the parties of Vicky Randall and Larss Svansand and the theory of political strategy of Peter Schooder.

The results of this study found PKB's victory in Cirebon Regency in the 2019 legislative election due to the following; 1). In facing the 2019 legislative elections, PKB recruits candidates who have social capital, strong capital, 2). PKB in its campaign practices presence politics with the tag line "Peduli Ummat Serves the People" rather than just making public opinions, 3). Selected candidates are required to be able to carry out political communication both on social media and non-social media, 4). There is a good relationship between PKB and kiyai-kiyai, ulama' and village leaders throughout the sub-district. The factors that influenced PKB's victory were as follows; 1) The influence of KH. Ma'ruf Amin against the increase in PKB votes in Cirebon Regency 2). there were internal problems in the PDI-P which resulted in a decrease in votes.

Keywords : Cirebon Regency, PKB, Institutionalization of Political Parties, Legislative Elections

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
KATA PENGANTAR	IV
PERSEMBAHAN.....	VI
MOTTO	VII
ABSTRAK.....	VIII
ABSTRACT.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR TABEL.....	XIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	4
1.3 TUJUAN PENELITIAN	4
1.4 MANFAAT PENELITIAN	4
1.5 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
1.6 METODELOGI PENELITIAN	8
A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN	8
B. SUMBER DAN JENIS DATA	9
C. TEHNIK PENGUMPULAN DATA.....	10
D. TEHNIK ANALISIS DATA.....	11
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II.....	16
PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DAN STRATEGI POLITIK.....	16
2.1 TEORI PELEMBAGAAN PARTAI	16
2.2 TEORI STRATEGI POLITIK	20
BAB III	27
GAMBARAN UMUM DAERAH PEMILIHAN DAN PROFIL PKB PADA PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN CIREBON	27
3.1 PROFIL KABUPATEN CIREBON	27
A. LETAK GEOGRAFIS KABUPATEN CIREBON.....	27
B. KONDISI DEMOGRAFI.....	29

C.	TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON	31
D.	KONDISI SOSIAL MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON	33
E.	DINAMIKA POLITIK LEGISLATIF KABUPATEN CIREBON PASCA REFORMASI	34
3.2	PROFIL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	37
A.	SEJARAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB).....	37
B.	LAMBANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.....	40
C.	IDEOLOGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	41
D.	VISI MISI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	42
E.	POSISI DPC PKB KABUPATEN CIREBON	43
F.	STRUKTUR KEPENGURUSAN DPC PKB KABUPATEN CIREBON	44
G.	POTRET CALEG PKB PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN CIREBON	44
BAB IV	45
	KONDISI INSTUTISIONAL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) TERKAIT KEMENANGAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN CIREBON	45
4.1	DERAJAT KESISTEMAN (<i>Systemness</i>)	45
4.2	DERAJAT IDENTITAS NILAI (<i>Value Infusion</i>)	64
4.3	DERAJAT OTONOMI (<i>Dicisional Autonomy</i>).....	69
4.4	DERAJAT PENGETAHUAN PUBLIK (<i>Reification</i>).....	71
BAB V	75
	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMENANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN CIREBON	75
5.1	FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI KEMENANGAN PKB DI KABUPATEN CIREBON	75
5.2	FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KEMENAGAN PKB DI KABUPATEN CIREBON	81
BAB VI	89
	PENUTUP.....	89
6.1	KESIMPULAN	89
6.2	SARAN	91
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Model dan Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	13
Gambar 3. 1	Peta Kabupaten Cirebon.....	27
Gambar 3. 2	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2018	29
Gambar 3. 3	Lambang Partai Kebangkitan Bangsa	40
Gambar 4. 1	Musyawarah di Internal PKB Sebagai Bentuk Dari Demokrasi Internal Partai	53
Gambar 4. 2	Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Proses Perekrutan Kader Loyal Di PC PKB Kabupaten Cirebon.....	57
Gambar 4. 3	Proses Pemilihan Pimpinan di PKB Sebelum Mukhatamar 2019.....	60
Gambar 4. 4	Proses Pemilihan Pimpinan di PKB Sesudah Mukhtamar 2019	61
Gambar 4. 5	Basis Dukungan PKB Di Kabupaten Cirebon.....	66
Gambar 4. 6	Penanaman Citra Publik PKB DI Kabupaten Cirebon Dengan Mengandalkan Simbol-Simbol Ketokohan Muhaimin Iskandar Ketua DPP.....	73
Gambar 4. 7	Image Publik terhadap PKB di Kabupaten Cirebon.....	74
Gambar 5. 1	Perolehan Kursi PKB di DPRD Kabupaten Cirebon Dalam Empat Edisi Pemilihan Legislatif Terakhir.....	79
Gambar 5. 2	Grafik Perolehan Kursi PKB di DPR RI dan DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2014 dan 2019	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Daftar Informan Penelitian	11
Tabel 2. 1	Dimensi Pelembagaan Partai Politik	17
Tabel 2. 2	Strategi Politik Menurut Peter Schorder	26
Tabel 3. 1	Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
Tabel 3. 2	Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Berdasarkan Umur	31
Tabel 3. 3	Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2018	32
Tabel 3. 4	Hasil peroleha Pemilihan Legislatif Kabupaten Cirebon Tahun 1999-2019....	35
Tabel 5. 1	Hasil Daftar Calon Anggota Legislatif (Caleg) Terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan legislatif 17 April 2019 merupakan kelima kalinya pelaksanaan pemilihan legislatif dilaksanakan pasca reformasi Mei 1998 di Indonesia. Dalam pelaksanaan pemilihan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah perpolitikan Indonesia pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan legislatif dilaksanakan secara bersamaan. Dasar hukum yang melatar belakangi pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan DPD, DPR, DPRD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Secara ringkasnya pelaksanaan pemilihan pada tahun 2019 diikuti oleh sebanyak enam belas kontestan partai politik secara nasional dan ditambah dengan empat partai politik lokal Aceh. Angka ini tentunya bertambah dimana pada pemilihan tahun 2014 partai politik secara nasional hanya dua belas dan tiga partai politik lokal (jdih.kpu.go.id, 2018).

Pelaksanaan pemilu sejatinya merupakan tradisi politik dan manifestasi yang dianut pada paham demokrasi dalam sistem pemerintahan negara kita. Sebuah kehidupan bangsa demokrasi selalu dilandasi prinsip bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga berhak terlibat dalam aktifitas politik, walau disadari betul partisipasi masyarakat secara penuh dalam sebuah proses politik mustahil untuk dilakukan dalam masa sekarang ini. Di zaman moderen ini pelaksanaan pemilu dinegara kita menempati posisi yang sangat penting terkait beberapa hal, seperti sebagai unsur dari keberlangsungan pelaksanaan demokrasi, menjadi indikator negara demokrasi, dan sebagai implikasi-implikasi dari negara demokrasi (Pamungkas, 2009). Dalam pemilu partai politik sebagai salah satu komponen bangsa yang sesungguhnya memiliki peranan yang strategis dalam menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan pada masyarakat Indonesia. Sejak jatuhnya rezim orde baru, partai politik baru semakin banyak bermunculan. Kemunculan partai-partai baru ini sejalan dengan sistem yang dianut oleh Indonesia yakni sistem multi partai.

Dengan sistem multi partai tersebut tentunya akan berimbas pada perubahan peta persaingan partai politik di dalam negeri dan memungkinkan untuk partai-partai baru memenangkan pemilihan umum. Salah satu dari partai baru yang muncul pasca jatuhnya rezim orde baru dan didorong dengan sistem multi partai ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini muncul akibat adanya usulan dari kalangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

(PBNU) untuk membentuk partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan karena pada saat itu PBNU dianggap masih belum dapat memenuhi kemauan dari masyarakat, oleh sebab itu sejumlah kalangan NU pun mulai melakukan pendeklarasian terkait berdirinya parpol agar dapat mewadahi aspirasi dari rakyat (Adryamarthanino, 2022). Berdasarkan desakan tersebut akhirnya partai PKB lahir pada tanggal 23 April 1998 dengan memegang prinsip *Ahlussunnah Wal Jama'ah*.

Kemunculan PKB disambut baik oleh kalangan tokoh-tokoh dan masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon. Perihal demikian dapat dilihat dari hasil pemilihan legislatif Kabupaten Cirebon tahun 1999. Dimana pemilihan ini merupakan pertama kalinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ikutserta dalam ajang lima tahunan. Hasil yang didapat PKB pada pemilihan legislatif 1999 di Kabupaten Cirebon-pun cukup bagus, dengan memperoleh 10 kursi DPRD dan mampu menggeser partai lama seperti Partai Golkar yang memperoleh 5 kursi. Namun, penampilan PKB yang menjanjikan di tahun 1999 tersebut masih belum cukup untuk menggusur kekuatan besar PDIP yang pada tahun tersebut memperoleh 18 kursi. Walaupun demikian, dari hasil tersebut banyak yang beranggapan bahwasanya partai PKB memiliki awalan yang sangat bagus untuk diterima oleh masyarakat Kabupaten Cirebon pada pemilihan legislatif dikemudian hari. Namun, walaupun PKB memiliki awalan yang bagus nyatanya sejak pemilihan legislatif tersebut hingga 2014 hasil yang didapat PKB tidak jauh berbeda hanya berkuat dibawah PDIP di Kabupaten Cirebon. Keberhasilan PKB di Kabupaten Cirebon baru dirasakan secara sah oleh para calegnya pada pemilihan tahun 2019.

Di Kabupaten Cirebon pemilihan legislatif 2019 di warani dengan kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mengutip data resmi dari KPU Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 PKB memperoleh sebanyak 219.970 suara atau setara dengan 10 kursi di DPRD Kabupaten Cirebon. Jumlah ini meningkat 1.57% dari pemilihan legislatif tahun 2014 dimana PKB memperoleh sebanyak 175.777 suara atau setara dengan 8 kursi DPRD Kabupaten Cirebon. Peningkatan perolehan suara yang didapat oleh PKB di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 menjadikannya sebagai partai pemenang yang mampu menggeser dominasi PDI-P sekaligus mengubah peta politik di Kabupaten Cirebon. Sejatinya Kabupaten Cirebon merupakan daerah dengan mayoritas umat muslim dan penganut Nahdlatul Ulama (NU) yang sangat kuat. Banyak sekali tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) lahir dan besar disana bahkan tidak jarang ada yang berperan aktif di dalam partai PKB.

Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS Kabupaten Cirebon tahun 2020 jumlah masyarakat Kabupaten Cirebon mencapai 2.270.621 jiwa dimana dari data tersebut jumlah umat muslim di Kabupaten Cirebon mencapai 2.108.540 jiwa. Sementara itu, dari total umat muslim tersebut diperkirakan ada sekitar 80% masyarakat NU di Kabupaten Cirebon, yang artinya NU di Kabupaten Cirebon termasuk golongan yang paling dominan dibanding golongan muslim yang lain (Sofhaladan, 2022). Dengan jumlah penduduk mayoritas islam dan kebanyakan pengikut NU tulen tidak serta merta partai yang beridentitas dan memiliki hubungan erat dengan Nahdlatul Ulama' (NU) seperti PKB bisa memenangkan pemiliahn legislatif di Kabupaten Cirebon dengan mudah. Dengan kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon pada pemilihan legislatif 2019 merupakan hal yang spesial dan fenomenal mengingat lokasi Kabupaten Cirebon sendiri merupakan basis Nahdiyyin dan PKB secara sejarah merupakan bagian dari Nahdiyyin.

Diskursus mengenai partai politik pada kontestasi pemilu merupakan diskursus yang menarik banyak sekali perhatian para akademisi, diantaranya adalah kajian yang dilakukan oleh Pratama, Dkk, (2021), Muhammad, Dkk, (2020), Lutfi, (2012). Dalam kajian diatas dijelaskan bahwasananya pelebagaan partai merupakan indikator yang penting untuk dilakukan guna mendapatkan partai politik yang memiliki peranan dan fungsi dengan baik. Pelebagaan partai dalam pemilu memiliki pengaruh terhadap perolehan suara yang didapat oleh partai politik, semakin baik pelebagaan yang terdapat dipartai maka semakin memungkinkan partai politik untuk mendapatkan suara masyarakat pada pemilihan umum. Kajian-kajian tersebut secara umum memfokuskan pembahasan pada bagaimana pelebagaan yang terdapat di dalam internal partai politik mempengaruhi kemerosotan perolehan suara di pemilu. Namun, kajian-kajian diatas belum mengeksplorasi lebih mendalam mengenai bagaimana pelebagaan partai politik terkait kemenangannya pada pemilihan legislatif. Untuk itu, penulis tertarik untuk memperdalam dan memperkuat kajian pelebagaan partai melalui isu terkait kemenangan partai politik di pemilihan legislatif. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengangkat kasus yang ada di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Cirebon merupakan satu dari sekian banyak daerah di Jawa Barat yang melaksanakan pemilihan legislatif pada tahun 2019. Perlu diketahui pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon dari tujuh daerah pemilihan enam merupakan daerah yang mampu PKB menangkan, hanya satu daerah pemilihan yang tidak PKB menangkan yakni daerah pemilihan II. Kemenangan tersebut membawa angin segar bagi perpolitikan di Kabupaten Cirebon setelah empat kali pemilihan pasca refomrasi Kabupaten Cirebon selalu dimenangkan oleh satu partai

yang sama. Pentingnya penelitian ini dilakukan guna melihat kondisi institusional PKB terkait kemenangannya di pemilihan legislatif 2019 Kabupaten Cirebon. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “KEMENANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN CIREBON”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang hendak di kaji pada skripsi ini sebagai berikut;

1. Mengapa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil memenangkan pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Cirebon?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kemenangan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah;

1. Untuk mengetahui kondisi institusional terkait kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab dibalik kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Disamping tujuan dan permasalahan penelitian yang diangkat, dalam skripsi ini penulis juga mengharapkan hasil dari penelitian bisa memberi manfaat untuk para pembaca baik akademisi maupun non akademisi. Adapun manfaat yang mungkin bisa didapatkan pada skripsi ini meliputi;

1. Manfaat Secara Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan ataupun referensi untuk kajian ilmu politik dimasa yang akan datang, khususnya kajian yang berkaitan dengan kemenangan partai politik dalam Pemilihan Legislatif.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan bacaan untuk semua pihak yang berkaitan dan ingin mengetahuinya secara lebih lanjut

lagi perihal Partai Politik pada Pemilu Legislatif yang ada di Kabupaten Cirebon.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memotivasi serta jadi bahan rujukan untuk para mahasiswa/i, atau peneliti yang berkaitan dan ingin meneliti lebih lanjut terkait partai politik di pemilihan legislatif di Kabupaten Cirebon.
3. Manfaat Secara Akademis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan tambahan informasi, pengetahuan, wawasan dan bisa dipergunakan menjadi bahan referensi untuk para mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan tema yang relevan di era yang akan datang nantinya.
 - b. Hasil daripada penelitian ini diharap bisa memberi suatu kontribusi untuk pengetahuan secara teoritis pada kajian ilmu politik.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan tinjauan pustaka ke berbagai macam karya tulis ilmiah yang relevan mengenai kemenangan partai politik pada pemilihan legislatif. Tujuan dilakukannya tinjauan pustaka adalah guna melihat sudut pandang peneliti terdahulu dalam melakukan penelitian serta sebagai acuan atau bahan perbandingan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis. Dalam skripsi ini, penulis menegaskan bahwasanya studi tentang kemenangan partai politik di pemilu legislatif bukan merupakan studi terbaru melainkan sudah banyak sarjana yang mengkaji mengenai kemenangan partai politik di pemilu legislatif. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai kemenangan partai politik di pemilu. dari beberapa penelitian tersebut penulis mengelompokan menjadi dua tema, yaitu; Partai politik pada pemilu yang melihat berdasarkan pelebagaan partai dan partai politik pada pemilu yang didasariatas strategi yang digunakan.

1. Partai politik pada pemilu melihat faktor pelebagaannya

Studi yang menjadi acuan penulis dalam hal ini meliputi studi dari Yurike, (2017), Ekawati, (2016), serta Ubaidullah dan Ardiansyah, (2019). Yurike, (2017) secara garis besar hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kemenangan PDI-P di Kertosono berdasarkan pada gradasi pelebagaan yang berbeda atau berfariasi. Pada dimensi kesisteman penanaman nilai dan otonomi PDI-P mampu mengembangkan pelebagaannya secara optimal. Sedangkan pada dimensi pembentukan citra kepada pemilih atau masyarakat PDI-P cenderung masih bergantung pada ketokohan. Penelitian yang ditulis oleh Ekawati, (2016) menunjukan bahwa

pasca pemilihan umum 2009 PKB secara nasional melakukan pembenahan melalui pematapan ideologi kaderisasi dan rekrutmen, serta menciptakan kohesivitas atau solidaritas partai dengan membangun kembali komunikasi dan silaturahmi dengan pihak-pihak yang merupakan konstituen potensial PKB. Hal itu semua dilakukan karena PKB memiliki tiga kali konflik internal yang berujung pada perpecahan, untuk itu PKB memperkuat kembali pelembagaannya guna memperkuat kondisi internal partainya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ubaidullah dan Ardiansyah, (2019) memaparkan bahwa DPP PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Aceh dalam menghadapi pemilu aceh adanya keterlambatan lolos menjadi peserta pemilu pada tahun 2014 dan 2019. Hal ini disebabkan adanya kisruh yang terjadi di internal partai PKPI. Selain itu menurunnya jumlah suara yang didapatkan PKPI pada pemilu didapati karena pola rekrutmen DPP PKPI yang tidak sejalan dengan AD/ART dan pelembagaan PKPI sendiri masih belum kuat untuk bisa memenangkan pemilu karena terdapat kisruh di internal partai.

2. Partai politik pada pemilu melihat faktor strategi yang digunakan

Penelitian yang membahas mengenai partai politik dalam pemilu yang didasarkan pada penerapan strategi diantaranya disusun oleh Ibrahim (2015), Fauzuna (2021), Efendi (2017), Raudhi (2017), Tarmijin (2017), Ngato, Dkk (2018), dan Pardomuan, Dkk (2022). Ibrahim, (2015) secara umum penelitiannya menunjukan penerapan strategi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) untuk memenangkan Pemilu Legislatif 2014 yang ada di Kabupaten Nagekeo berlangsung dengan cukup efektif, karena terdapat relasi emosional yang begitu kuat diantara Caleg serta dengan para pengurus partai. Dengan adanya relasi yang kuat tersebut PKB kemudian menjalankan strategi kampanye yang menysasar pada kalangan anak muda dengan pendukung yang memiliki peranan terkait penerapan strategi kemenangan yang ada di dalam pemilu legislatif di tahun 2014 tersebut. Hal senada terdapat pada penelitiannya Fauzuna, (2021) dimana strategi komunikasi LPP (Lembaga Pemenangan Pemilu) PKB pada pelaksanaan pemilu 2019 memfokuskan diri pada pembentukan citra melalui cara memperkuat jalinan silaturahmi dengan para ulama Nahdliyyin serta menerapkan komunikasi pintu dari pintu. Melalui komunikasi tersebut LPP PKB memberikan informasi menyakinkan kepada masyarakat, serta memunculkan minat mereka dalam mendukung PKB melalui suara untuk para calon anggota legislatif.

Penelitian dari Efendi, (2017) menjelaskan bahwasanya strategi yang digunakan partai Aceh dalam memenangkan pemilihan legislatif tahun 2014 di Kabupaten Simeulue meliputi

strategi kampanye politik, strategi penyebaran isu politik, strategi komunikasi politik, hingga political marketing yang seluruhnya berjalan secara terstruktur dengan baik. Dengan strategi yang terstruktur Partai Aceh di Kabupaten Simeulue dapat menumbuhkan kepercayaan di tengah masyarakat secara merata. Berdasarkan hal itu, Partai Aceh mendapatkan dukungan masa pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Simulue. Selanjutnya dalam tesisnya Tarmijin, (2017) didapati strategi pemenangan Partai PAN pada pemilihan legislatif 2014 di Kabupaten Bima meliputi strategi internal dan eksternal. Adapun bentuk dari strategi internal partai PAN yang diterapkan adalah adanya pola rekrutmen yang lebih mementingkan figur dan pengalaman, serta pemanfaatan atas kedekatan partai dengan Muhammadiyah guna memperoleh suara masa. Kemudian strategi eksternal yang digunakan oleh Partai PAN meliputi sosialisasi partai PAN dengan mengenalkan partai serta caleg, komunikasi dengan masyarakat secara langsung, dan diadakannya bagi bagi sembako pada sebelum pemilihan serta sesudah pelaksanaan pemilihan legislatif. Selain itu, Raudhi, (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwasanya kemenangan PDI-P di pemilihan legislatif 2014 Kabupaten Bener Meriah berdasarkan lima macam strategi yang digunakan dengan sangat rapih. Kelima strategi tersebut meliputi rekrutmen Caleg dari tokoh masyarakat, memahaminya situasi maupun juga kondisi yang ada di daerah pemilihan, menjalin komunikasi langsung, perluasan basis partai, money politic, serta sosialisasi program kerja partai. Selain adanya aspek lain yang mempengaruhi kemenangan partai di Kabupaten Bener Meriah diantaranya faktor figur Caleg, ketokohan Tagore Abu Bakar serta faktor Kabupaten Bener Meriah yang adalah satu daripada basis suara PDI-P di provinsi Aceh.

Penelitian lain dari Ngato, Dkk, (2018) menjelaskan bahwa pemenangan caleg NasDem di Kabupaten Pulau Morotai karena ketepatan penggunaan strategi kepada masyarakat sebagai pemilih. Strategi tersebut meliputi melakukan komunikasi untuk mendekatkan atau memperkenalkan caleg yang akan diusung oleh Partai NasDem, dalam menentukan caleg yang diusung partai NasDem memilih sosok figur yang baik dengan target dapat secara cepat dikenalnya oleh para penduduk maupun masyarakat terkait dengan basis massa, melakukan sosialisasi kepartaian kepada massa, mengadakan kegiatan kemasyarakatan, serta melakukan dua metode kampanye metode, yaitu; kampanye tertutup dan kampanye langsung dengan jargon partai yang kuat, besar, membela rakyat, baik, serta juga mempunyai suatu komitmen pada nasib yang ada pada rakyat-rakyat yang kecil. Penelitian yang ditulis oleh Pardomuan, Dkk, (2022) menunjukan bahwa partai NasDem di Kota Tanjung Pinang dalam memenangkan pemilihan legislatif tahun 2019 menggunakan strategi ofensif dengan menggunakan metode

Segmentasi Politik, Penargetan Politik, Posisi Politik dan Pemasaran Politik. Strategi ini sukses diterapkan oleh partai NasDem di Kota Tanjung Pinang, hal ini dapat dilihat dari hasil pemilihan dimana pada tahun 2019 partai NasDem di Tanjung Pinang mendapatkan empat kursi dari sebelumnya yang tidak mendapatkan kursi sama sekali.

Dari penelusuran tinjauan pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa perolehan suara partai politik pada pemilu tidak terlepas dari dua faktor, yaitu; faktor yang berasal dari pelembagaan partai itu sendiri yang meliputi interenal dan eksternal partai hingga faktor suksesnya penerapan strategi yang tepat guna kepada para pemilih atau masyarakat. Beberapa kajian mengenai partai politik pada pemilihan umum yang memfokuskan diri pada strategi yang digunakan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya menjelaskan bahwa keberhasilan strategi yang digunakan cenderung akan berkaitan dengan adanya faktor-faktor diluar strategi yang memiliki impact besar kepada kemenangan partai. Sedangkan, keberhasilan partai politik pada pemilu yang membangun kondisi instutisionalnya dengan kuat akan memiliki impact kepada kiprahnya dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk bersaing di perpolitikan. Dalam pembahasan tema pertama kajian tersebut belum mengkaji secara mendalam mengenai kondisi pelembagaan partai pemenang pada pemilihan legislatif. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti ingin memperkuat pembahasan tersebut dengan fokus kepada bagaimana kondisi pelembagaan PKB pada pemenangan pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon. Dilain sisi, menurut sependek pengetahuan penulis belum banyak penelitian yang mengulas mengenai kemenangan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon.

1.6 METODELOGI PENELITIAN

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*Filed Research*) dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut (Fathoni, 2006). Sementara itu, yang dimaksud dengan kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2016, hal. 6). Jadi dapat dikatakan kualitatif deskriptif adalah

prosedur penelitian yang digunakan untuk memahami dan menghasilkan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks tentang Kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan studi kasus. Menurut Creswell studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan-nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus) melalui pengumpulan data yang detil dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus (Creswell, 2015, hal. 135-136). Singkatnya, studi kasus merupakan strategi yang digunakan dalam penelitian untuk menyelidiki atau mengeksplorasi suatu fenomena yang terkait dengan kasus melalui pengumpulan informasi dan data lengkap yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber.

B. SUMBER DAN JENIS DATA

Definisi singkat mengenai sumber dan jenis data dapat dijelaskan sebagai tempat asal data bisa diperoleh peneliti. Menurut Lofland sumber dan jenis data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2016, hal. 157). Dalam skripsi ini penulis menggunakan sumber dan jenis data berupa data primer dan data sekunder, maksud dari kedua sumber dan jenis data tersebut adalah sebagai berikut;

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul (Sugiyono, 2017, hal. 456). Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan data primer merupakan data yang didapat oleh peneliti dari sumber individu atau perorangan yang berkaitan dengan skripsi ini. Dalam hal ini, yang menjadi data primer di skripsi ini adalah wawancara dengan Elit DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon dan masyarakat Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017, hal. 456). Dengan kata lain data sekunder

merupakan data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, not, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai partai politik terkait (Syamsuddin, 2022, hal. 26). Adapun data sekunder dalam skripsi ini penulis dapatkan dari hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, internet, AD/ART partai PKB, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan tema skripsi ini.

C. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu; *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atau pertanyaan itu (Moleong, 2016, hal. 186). Maksud dari mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985: 266) antara lain: *pertama* mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan. *Kedua* mengkonstruksikan kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu. *Ketiga* memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. *Keempat* memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik dari manusia maupun bukan manusia (Triangulasi). Dan *kelima* memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Moleong, 2016, hal. 186-187).

Dalam skripsi ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan informan guna memperoleh kevalidan data terkait kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon. Adapun teknik yang digunakan oleh penulis dalam menentukan informan kunci dan informan pendukung dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Secara garis besarnya *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan aspek tertentu. (Sugiyono, 2017, hal. 133). Dengan kata lain *purposive sampling* merupakan prosedur penentuan informan dengan melihat orang tersebut sebagai pemilik data yang bisa digali dan tentunya terlibat langsung didalamnya.

Singkatnya purposive sampling merupakan metode yang digunakan untuk menentukan informan yang sesuai dengan kriteria peneliti dan yang paling relevan dengan masalah penelitian yang diangkat. Oleh karena itu, orang yang terpilih menjadi informan merupakan orang yang terlibat langsung dan ahli didalam bidang serta memiliki data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sehingga, data yang didapatkan akan sangat baik dan berkualitas serta mampu menjawab permasalahan yang sedang diteliti. berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain;

Tabel 1. 1 Daftar Informan Penelitian

Informan	Jumlah
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon	1
Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Cirebon	1
Ketua DPRD PKB Kabupaten Cirebon sekaligus anggota PKB	1
Masyarakat Kabupaten Cirebon	7
Total	10

Sumber; Diolah oleh peneliti, 2022.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2017, hal. 476). Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi; arsip dokumen terkait dengan DPC Partai PKB Kabupaten Cirebon, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) DPC Partai PKB Kabupaten Cirebon, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema skripsi ini

D. TEHNIK ANALISIS DATA

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2016, hal. 248). Pada tahap analisis data ada tahapan-tahapan yang harus dilewati

sebelum akhirnya dapat ditarik kesimpulan oleh penulis. Menurut Miles dan Huberman ada tiga tahapan atau langkah yang dapat digunakan dalam analisis data, yaitu; Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan (Miles & Huberman, 1992, hal. 16). Sedangkan, mengutip didalam bukunya Moleong, (2016) menurut Janice McDrury menyebutkan tahapan analisis data kualitatif dalam prosesnya berjalan sebagai berikut; *pertama* membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data. *kedua* mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data. *ketiga* menuliskan "model" yang ditemukan dan *keempat* koding yang telah dilakukan.

Adapun tehnik analisis data yang di gunakan dalam skripsi ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, dengan tahapan analisis data sebagai berikut;

1. Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan melibatkan informan, aktivis, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian dengan menggunakan tehnik yang sudah dijelaskan diatas. Dengan kata lain, pengumpulan data merupakan mengumpulkan data-data yang diperoleh oleh peneliti pada saat di lapangan melalui hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Setelah data sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah mereduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

3. Penyajian Data

Setelah data melewati tahap reduksi atau pemilihan. Tahap berikutnya adalah penyajian data, dalam hal ini data disajikan guna mendapatkan gambaran jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memungkinkan informasi tersebut sudah memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

4. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul dan melewati reduksi serta penyajian data adalah tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini data

dilakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan setelah proses penyajian data selesai guna mendapatkan jawaban yang diinginkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Hasil dari penarikan kesimpulan tersebut digunakan oleh peneliti sebagai data penyajian akhir. Dalam metode analisis data Menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan dapat berlangsung saat proses pengumpulan data, kemudian reduksi data, serta penyajian data atau sebaliknya.

Keempat model tehnik analisis data Miles dan Huberman seperti yang dijelaskan diatas bila divisualisasikan dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut;

Gambar 1. 1 Model dan Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



Berdasarkan gambar diatas, Miles dan Huberman beranggapan bahwasanya analisis data terdiri dari empat alur kegiatan yang berjalan secara bersamaan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan kata lain, gambar diatas memperlihatkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data. Artinya, pada saat pengambilan data secara langsung kita sudah diperbolehkan untuk melakukan verifikasi atau kesimpulan pada saat itu juga. Namun tidak jarang banyak peneliti yang melakukan pengumpulan data terlebih dahulu kemudian dilakukan analisis data seperti reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan struktur per bagian yang akan dibahas dan ditulis oleh penulis dalam penelitian skripsi ini. Adapun sistematika yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Berdasarkan hal tersebut pada bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Dengan gambaran sekilas yang di jelaskan dalam latar belakang harapannya sudah dapat ditangkap substansi skripsi ini. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka pada bab ini dipaparkan pula, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang ditinjau berdasarkan teoritik, praktis maupun akademis. Demikian pula metode penelitian yang dituangkan pada bab ini dengan secara ringkas dan jelas dengan harapan dapat memberikan gambaran terkait jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, tehnik pengumpulan data, serta tehnik analisis data yang digunakan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan Teori Pelembagaan partrai politik yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand serta Teori Strategi Politik yang dikemukakan oleh Peter Schorder.

BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PEMILIHAN DAN PROFIL PKB PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 KABUPATEN CIREBON

Bab ini berisi mengenai pendeskripsian objek atau lokasi penelitaan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Kabupaten Cirebon, pembahasan tersebut akan meliputi luas wilayah, jumlah masyarakat, serta kondisi perpolitikan Kabupaten Cirebon pasca reformasi. Disamping itu, pada bab ini akan dijelaskan pula profil partai PKB secara umum meliputi; visi dan misi partai PKB, serta pemaparan struktur organisasi DPC PKB Kabupaten Cirebon.

BAB IV KONDISI INSTUTISIONAL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERKAIT KEMENANGAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN CIREBON

Bab ini berisi tentang data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai konsisi institusional PKB dalam memenangkan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Cirebon. Dimana dalam penyajiannya data

tersebut akan di analisis oleh kerangka teori yang digunakan oleh penulis untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka teori tersebut adalah teori pelebagaan partai yang didalamnya melihat berdasarkan dua indikator, yaitu internal-eksternal dan struktural-kultural.

BAB V FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMENANGAN PKB (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN CIREBON

Pada bab ini berisi tentang pendeskripsian data yang diperoleh dari penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan PKB pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Cirebon.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, serta saran-saran yang bisa berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dikemudian hari.

BAB II

PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DAN STRATEGI POLITIK

Bab ini akan membahas mengenai teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Secara umum, teori merupakan sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu penulis dalam menjelaskan bagaimana atau mengapa suatu peristiwa terjadi. Teori yang baik biasanya memiliki kegunaan atau utility kepada peneliti agar dapat memberitahukan banyak hal kepada peneliti terkait data-data yang diperlukan untuk mengulas permasalahan yang diangkat. Dalam studi ini teori yang digunakan oleh penulis dalam mengungkap kemenangan partai politik pada pemilu legislatif adalah Teori Pelembagaan Partai Politik dari Vicky Randall dan Lars Svasand serta Teori Strategi Politik dari Peter Schroder.

2.1 TEORI PELEMBAGAAN PARTAI

Studi mengenai pelembagaan partai politik pertama kali diperkenalkan oleh Samuel P. Huntington pada tahun 1976 didalam bukunya yang berjudul *Political Order in Changing Societies*. Dalam buku tersebut didefinisikan bahwasanya pelembagaan partai merupakan proses dimana suatu organisasi menentukan cara untuk memperoleh nilai baku dan stabil (Huntington, 1983, hal. 23). Dalam pelembagaan partai politik, Huntington melihat bahwasanya sudut pandang terkait keberhasilan pelembagaan partai politik terletak pada kemampuan mencapai dan mempertahankan stabilitas nilai ditengah peningkatan dan perluasan partisipasi politik. Dari konsep pelembagaan yang ditawarkan oleh Huntington tersebut yang kemudian menginspirasi kemunculan konsep pelembagaan partai politik terbaru yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand pada tahun 2002 dengan melihat konsep-konsep yang sudah ada.

Studi yang dibangun oleh Randall dan Svasand ini sangat kompleks untuk melihat kekuatan pelembagaan partai politik, hal ini dikarenakan Randall dan Svasand dalam merumuskan teori pelembagaan partai ini merujuk pada beberapa dimensi pelembagaan partai politik yang dikemukakan oleh Huntington, Panebianco, dan Kenneth Janda. Dari situ kemudian Randall & Svasand memiliki pandangan bahwasanya pelembagaan partai politik merupakan sebuah proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya (*process by which the party becomes established in terms*

both of integrated patterns of behaviour and of attitudes, or culture) (Randall & Svasand, 2002, hal. 12).

Pandangan tersebut kemudian dipertegas oleh Ramlan Surbakti dalam (Kuswandoro, 2015) dengan memberikan pengertian bahwasanya pelebagaan partai politik merupakan suatu proses pematapan partai politik, baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya (*the process by which the party becomes established in terms of both of integrated patterns of behavior and of attitude or culture*). Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat ditarik sebuah benang merah bahwasanya partai politik akan terlihat terlembaga dengan baik apabila partai tersebut telah matang dalam hal-hal perilaku, sikap, serta budaya partai politiknya yang telah terintegritas dengan baik.

Lebih lanjut teori pelebagaan partai Randall dan Svasand ini mengelompokkan pelebagaan partai menjadi dua dimensi penting, yakni dimensi internal-eksternal, dan dimensi struktural-kultural. Dari kedua dimensi tersebut bila dipersilangkan, maka akan terlihat sebuah tabel dengan empat indikator atau biasa disebut dengan derajat. Sempelnya, pelebagaan partai politik yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand dengan empat derajatnya adalah sebagai berikut; *pertama* terdapat derajat kesisteman (systemness), derajat ini dihasilkan dari persilangan antara dimensi internal dengan dimensi struktural, *kedua* derajat identitas nilai (value infusion), derajat ini merupakan hasil dari persilangan dimensi internal dengan dimensi kultural, *ketiga* derajat otonomi (decisional autonomy) digunakan untuk melihat partai politik dalam pembuatan sebuah keputusan, derajat ini merupakan hasil persilangan dari dimensi eksternal dengan dimensi struktural, dan terakhir *keempat* derajat pengetahuan (reification), derajat ini merupakan hasil persilangan dari dimensi eksternal dengan dimensi kultural. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelebagaan partai politik dari Vicky Randall dan Lars Svasand, dapat dilihat penjelasan dibawah ini

Tabel 2. 1 Dimensi Pelebagaan Partai Politik

Dimensions	Internal	External
Structural	Systemness	Decisional Autonomy
Attitudinal	Vaule Infusion	Reification

Sumber; adaptasi dari Vicky Randal & Lars Svasand, *Party Institutionalization in New Democracies*, (2002). hal. 13

a. Derajat kesisteman (Systemness)

Yang dimaksud dengan derajat kesisteman ialah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, yang dilaksanakan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme. Dimana aturan dan mekanisme ini telah disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. Dalam pandangan derajat kesisteman, suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari derajat kesisteman apabila partai politik tersebut telah melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci. Dalam konteks negara dunia ketiga, derajat kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik (*origins*), yaitu bagaimana proses pembentukan partai politik, apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) sumber daya (*resources*) yang dimiliki partai politik, terutama pendanaan, apakah partai memiliki sumber daya yang menjamin kemandiriannya atau masih bergantung pada aktor yang memiliki sumber daya berlebih; (c) kepemimpinan (*leadership*), melihat siapakah yang lebih menentukan didalam partai, seorang pemimpin partai yang disegani ataukah pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai suatu kesatuan; (d) faksionalisme (*factionalism*), mernyoroti siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan, faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara menyeluruh; (e) implikasi klientalisme (*clientalism*), menyelidiki bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientalisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) atau menurut konstitusi partai (AD/ART) (Randall & Svasand, 2002, hal. 17-21).

b. Identitas nilai (Value Infusion)

Derajat identitas nilai memiliki hubungan dengan identitas partai politik yang berdasarkan pada ideologi atau platform partai, basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan partai. Identitas nilai tidak hanya terlihat pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai politik, melainkan akan tampak juga pada basis sosial pendukungnya. Karena itu derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan; (a) hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (popular bases), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, dunia usaha, kelas menengah, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan (b) pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumental (anggota selalu

mengharapkan tangible resources berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai). Partai politik yang memiliki basis sosial yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas (Randall & Svasand, 2002, hal. 21).

Dalam konsep derajat identitas nilai, partai politik dapat dikatakan telah terlembaga dengan baik bisa dilihat dari partai itu telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial). Hal itu dikarenakan pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai akan mendapatkan dukungan yang bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politik pendukungnya sesuai ideologi atau platform partai itu. Untuk itu, partai politik yang memiliki basis sosial pendukung spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas.

c. Derajat Otonomi (Decisional Autonomy)

Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkait dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). Pola hubungan suatu partai dengan aktor di luar partai dapat berupa: (a) hubungan ketergantungan kepada aktor luar, (b) hubungan itu bersifat saling tergantung (interdependen), dan (c) hubungan itu berupa jaringan (linkage) yang memberi dukungan kepada partai. Dalam konsep derajat otonomi tersebut, dapat dikatakan suatu partai politik sudah terlembaga dengan baik dari segi otonomi, apabila dalam mengambil sebuah keputusan partai tersebut tidak diatur oleh pihak luar melainkan dalam pengambilannya harus dilakukan secara mandiri tanpa konsultasi dengan aktor luar yang menjadi mitra atau jaringan pendukung partai itu (Luthfi, 2012). Kehadiran aktor dalam mengurus partai politik terkait pengambilan keputusan menurut Randall dan Svasand cenderung akan menyebabkan pelembagaan partai menjadi lemah, karena sumber dukungan pemimpin secara jelas akan dipengaruhi oleh pihak luar dan tentunya akan menurunkan tingkat kepercayaan kepada pendukung partai yang loyal tersebut (Randall & Svasand, 2002, hal. 22).

d. Pengetahuan Publik (Reification)

Derajat pengetahuan publik merupakan kepekaan atau pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik. Bila keberadaan partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik,

maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dari perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut. Dapat dikatakan derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dan implemtasi dari waktu serta kiprah partai politik selama ini. Derajat ini juga dapat dilihat dari usia partai politik, semakin tua partai politik maka semakin dalam juga pengetahuan publik mengenai suatu partai politik. Tetapi, khusus untuk pengetahuan publik terkait partai, bukan hanya membahas tentang keberadaan partai saja, namun didalam pengetahuan publik tersebut juga harus sesuai dengan identitas nilai partai. Untuk itu, jika ditarik sebuah benang merah suatu partai politik dapat dikatakan sudah terlembaga dengan baik dari segi pengetahuan publik apabila masyarakat umum mengetahui wajah dan kiprah partai politik itu sesuai dengan platform partai sehingga masyarakatpun dapat memahami mengapa suatu partai politik melakukan tindakan tertentu dan tidak melakukan tindakan lain.

2.2 TEORI STRATEGI POLITIK

Studi tentang strategi dewasa ini telah berkembang dengan pesat. Dapat dilihat dari pengertiannya-pun mengalami banyak sekali perubahan, hal ini dikarenakan adanya asimilasi ilmu pengetahuan oleh para ilmuwan dalam mendefinisikan strategi berdasarkan fenomena permasalahan yang berbeda-beda. Clausewitz merupakan salah satu ilmuwan yang mendefinisikan strategi merupakan suatu seni yang digunakan dalam pertempuran dengan tujuan untuk memenangkan perang. Senada dengan Clausewitz, Steiner and Miner (1977) dalam bukunya Rahim & Radjab yang berjudul "*Manajemen Strategi*" menyatakan strategi ialah penempaan misi perusahaan, penetapan tujuan bagi organisasi berdasarkan kekuatan eksternal serta internal, merumuskan kebijakan serta strategi khusus guna tercapainya tujuan, serta memastikan penerapan mereka tepat sehingga sasaran serta tujuan dasar organisasi akan tercapai. (Rahim & Radjab, 2017, hal. 3-4).

Dilain sisi, secara etimologis politik berasal kata dari "*politic*" yang dalam bahasa inggris menunjukan sifat pribadi atau perbuatan. Kata tersebut dulu kala diketahui berasal dari bahasa latin yakni "*politicus*"serta bahasa yunan (*Greek*) "*politicos*" yang berartikan sebagai "*relating to a citizen*" (Nambo & Puluhuluwa, 2005, hal. 3). Secara definisinya partai politik merupakan upaya menentukan berbagai peraturan yang bisa diterima oleh masyarakat warga, guna mengarahkan masyarakat menuju arah kehidupan bersama yang lebih harmonis. Hal ini dipertegas oleh Anrew Heywood dalam bukunya Miriam Budiardjo yang menjelaskan politik ialah aktivitas sebuah bangsa dengan tujuan guna mempertahankan, membuat, serta

mengamandemenkan peraturan-peraturan sebagai pengatur kehidupan (Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008, hal. 14 - 16).

Dari dari pemaparan terkait strategi dan politik diatas maka ketika kedua kata tersebut digabungkan (*terminologi*) terdapat sebuah simpulan mengenai strategi politik yang merupakan seni dengan tujuan untuk menetapkan cita-cita bagi organisasi yang berdasarkan pada kekuatan internal dan eksternal yang diimplementasikan melalui kebijakan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi tersebut dengan tujuan membawa dan mengatur kehidupan masyarakat kearah yang lebih harmonis sesuai cita-cita bersama.

Lebih lanjut, Peter Schorder dalam bukunya berpandangan strategi politik ialah strategi yang dipakai untuk menerapkan cita-cita politik (Scrooder, 2010, hal. 26-27). Dengan kata lain, strategi dalam berbagai aspek termasuk politik sangat diperlukan untuk mendapatkan perubahan jangka panjang. Sejalan dengan pengertiannya Peter Schroder membagi strategi politik menjadi sepuluh langkah sistematika perencanaan yang meliputi; (Schroder, 2013, hal. 35-50)

1. Merumuskan misi

Perumusan misi menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategis.hal ini harus mencakup sekurang-kurangnya tiga elemen, yaitu; *pertama*, tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin kita capai melalui perencanaan strategi tersebut. *Kedua*, alasan pentingnya pencapaian tujuan secara keseluruhan. *Ketiga*, kerangka waktu (kurun waktu) dimana keseluruhan tujuan harus dicapai.

Dalam strategi politik, misi merupakan persetujuan atas suatu posisi tertentu, partisipasi dalam suatu tugas tertentu, dipilih sebagai kandidat. Dalam sebuah perencanaan karir politik, misi harus menyatakan untuk siapa strategi itu direncanakan, dengan hal tersebut misi dapat menetapkan suatu kerangka atau batasan. Selain itu, misi juga harus dapat mengidentifikasi jangka waktu, hingga kapan keseluruhan sasaran harus dapat dicapai, dan misi tidak boleh dirumuskan terlalu optimis sehingga menjadi tidak realistis.

2. Penilaian situasional dan evaluasi

Analisis situasi dan evaluasi membahas mengenai fakta-fakta yang dikumpulkan, dikelompokan ke dalam kekuatan dan kelemahan serta perkiraan kemungkinan keberhasilan tujuan yang terealisasikan. Fakta-fakta yang dimaksud disini termasuk

fakta-fakta organisasi sendiri, fakta-fakta mengenai pekerjaan (jika ada) dan fakta-fakta lingkungan dimana akan dicapai.

a) Pengumpulan Fakta

Pengumpulan fakta berarti mengumpulkan fakta-fakta internal dan eksternal yang relevan bagi rencana strategis. Fakta internal adalah fakta yang menyangkut organisasi sendiri sedangkan fakta eksternal adalah fakta yang menyangkut tentang para pekerja atau lingkungan dimana strategi tersebut akan direalisasikan. Pembatasan antara fakta internal dan eksternal tidak selalu mudah. Tapi, pembatasan ini bagaimanapun harus didefinisikan secara jelas sebelum proses pengumpulan fakta dimulai, untuk menghindari munculnya kesalahpahaman. Fakta kompetitor atau pesaing adalah fakta yang berasal dari organisasi-organisasi yang merupakan pesaing langsung dari organisasi kita sendiri, misalnya pesaing dalam pemilu. Fakta lingkungan adalah fakta yang berasal dari masyarakat dimana strategi akan dijalankan.

b) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan

Apabila fakta-fakta telah terkumpul kemudian secara sistematis digolongkan dan ditimbang berdasarkan kadar relevansi, ukuran, kepentingan dan urgensinya, maka kemudian fakta-fakta ini dapat dikaitkan dengan strategi yang ada. Setiap fakta diteliti untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut mendukung atau justru mengganggu pelaksanaan strategi. Apabila fakta mendukung, fakta ini akan menjadi kekuatan, sebaliknya apabila ia mengganggu pelaksanaan ia akan menjadi kelemahan. Selain itu, banyak fakta yang tidak tergolong mendukung maupun mengganggu, fakta semacam ini hanya akan menjadi bahan pelengkap yang hanya akan berperan dalam perencanaan operasional pada keadaan tertentu saja. Dari fakta kekuatan dan kelemahan tersebut tampak bahwa kekuatan pihak pesaing adalah kelemahan bagi organisasi kita dan sebaliknya, kelemahan pesaing dapat menjadi kekuatan bagi pihak kita

c) Analisis kekuatan dan kelemahan

Apabila kekuatan dan kelemahan sudah diketahui, maka keduanya harus dievaluasi. Setelah mengelompokkan mereka berdasarkan kadar kepentingan, perlu diterapkan apakah kita memiliki pengaruh terhadap kelemahan-kelemahan tersebut dalam arti dapat menguranginya. Dalam menganalisa dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita yang diperhadapkan dengan

pesaing lawan dalam konteks perencanaan strategi pertanyaan seperti isu-siu, siapa yang memiliki kepemimpinan yang lebih kuat, siapa yang memiliki SDM lebih baik, dan sejenisnya perlu sekiranya dijawab.

d) Umpan-Balik (*feedback*)

Setelah menganalisa kekuatan dan kelemahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Apabila analisa kekuatan dan kelemahan menunjukkan bahwa ada keuntungan strategis yang jelas sehingga kemenangan pasti dapat diperoleh dan bahwa kelemahan-kelemahan cukup dapat dilindungi. Maka, strategi tersebut memiliki kemungkinan untuk dapat dicapai, tetapi apabila sebaliknya dapat dikatakan strategi tersebut memiliki kemungkinan tidak dapat mrealisasikan kemenangan.

3. Perumusan sub-strategi

Sementara langkah-langkah penilaian situasional lebih menyibukan diri dengan keadaan dan situasi masa lalu, fokus kita harus bergerak maju kedepan untuk perumusan sub-strategi. Apabila penilaian situasional sudah selesai, menjadi jelas apakah sebuah strategi akan dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan atau masih perlu direvisi. Dari situ muncul tugas-tugas yang perlu didukung dengan keputusan tsrategis. Langkah-langkah yang bisa diambil dalam perumusan sub-strategis adalah sebagaiberuku;

a) Menyusun tugas-tugas

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, lahirlah tugas-tugas yang harus diselesaikan, tugas-tugas tersebut adalah meneliti kelemahan-kelemahan kita, apabila kelemahan kita dapat mempengaruhi strategi, setelah menelaah kelemahan selanjutnya meneliti terkait bidang-bidang mana yang bisa kita nikmati keuntungan dari strategi yang kita terapkan, kemudian apabila dari meneliti tersebut terlihat lawan menunjukan kelemahan-kelemahan tertentu yang tidak berhubungan dengan kekuatan kita, maka kita harus membangun kekuatan-kekuatan ini.

b) Merumuskan strategi

Perumusan strategi berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut, Pertama-tama harus memilih isu-isu yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan. Isu-isu ini hendaknya berupa isu atau argumen yang membawa keuntungan yang jelas. Dari isu tersebut kemudian kita melihat dimana lingkungan sebuah isu

dijalankan memainkan peranan yang penting dalam penentuan isu dan memusatkan kekuatan serta semua penyerangan hanya satu isu dalam waktu tertentu saja

c) Mengevaluasi strategi

Masing-masing strategi yang dipilih untuk menyelesaikan tugas haruslah saling melengkapi. Mereka harus saling cocok baik ditingkat sub-sub strategi maupun strategi keseluruhan. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi-strategi yang dipilih setelah strategi-strategi itu dirumuskan.

4. Perumusan sasaran

Setelah sasaran diputuskan tanggung jawab selanjutnya adalah memindahkan strategi ke unit-unit taktis dan diimplementasikan melalui pembagian tugas. Begitupun bila strategi-strategi telah ditetapkan, maka pendekatan untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan persoalan (kelemahan) sendiri juga ditetapkan. Dengan demikian, tujuan taktis yang rinci dan jelas harus didefinisikan. Dalam strategi sasaran harus menggambarkan keadaan pada akhir sebuah proses dalam jangka waktu tertentu. Apabila sasaran sudah dirumuskan, masing-masing strategi harus direalisasikan dan dijalankan. Sasaran ini masing-masing harus dibagi kedalam unit taktis yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan.

5. *Target image* (citra yang diinginkan)

Target image merupakan melukiskan citra yang diharapkan, yang hendak dicapai setelah menjalankannya rangkaian pekerjaan humas yang panjang dalam kelompok-kelompok target. Target image ditentukan oleh keputusan strategis mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang dibuat yang berkaitan dengan isu, gaya, jenis konfrontasi dan orang-orang yang diperhitungkan. Dalam hal ini target image merupakan penetapan landasan untuk pekerjaan kehumasan.

6. Kelompok-kelompok target

Kelompok target adalah kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi-organisasinya yang penting untuk pencapaian sebuah misi. Dalam penerapan sebuah misi mereka perlu didekati dalam waktu yang telah ditetapkan. Kelompok target ini diidentifikasi dengan menginterpretasikan keputusan strategi, khususnya tujuan taktis, dan melalui analisis citra yang diinginkan (*target image*).

7. Pesan kelompok target

Kelompok target yang telah dibahas diatas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya untuk memungkinkan

bereaksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis. Informasi ini dapat dikomunikasikan secara khusus dengan masing-masing kelompok target, dan tidak untuk semua kelompok target yang ada. Perlu diperhatikan bahwa pesan yang diteriam masing-masing kelompok target tidak boleh saling bertentangan. Perluasan pesan kelompok target merupakan instrumen yang kerap digunakan pada tahap akhir masa kampanye, untuk memberikan janji tertentu kepada kelompok pemilih tertentu.

8. Instrumen-instrumen kunci

Pemilihan instrumen kunci terutama berkaitan dengan aksiaksi dan alat komunikasi yang akan digunakan. Instrumeninstrumen dan aksi ini disesuaikan secara khusus bagi kelompok target. Untuk itu ada syarat bahwa kelompok yang dijadikan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu, karena setiap kelompok target hanya diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu. Pemilihan instrumen-instrumen kunci yang akan digunakan sekaligus menghasilkan keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan sumber daya untuk mengimplementasikan strategi serta efektivitas kampanye. Keputusan ini, beserta kelompok target yang dipilih menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan strategi.

9. Implementasi strategi

Dalam mengimplemntasikan strategi faktor manusia dan faktor operasional merupakan faktor yang perlu diperhitungkan. Hal ini karena faktor manusia merupakan faktor yang signifikan untuk tiga aspek, yaitu; pimpinan politik, pimpinan partai yang bekerja penuh dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau sukarelawan. Sementara itu, faktor operasional merupakan syarat awal bagi keberhasilannya bergantung pada prinsip-prinsip kecepatan, penyesuaian diri dan tipu daya.

10. Pengendalian strategi

Pengendalian strategi terdiri dari dua unsur dan keduanya menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi, kedua unsur tersebut adalah; *pertama* prinsip pengumpulan data intelejen dan perolehan informasi. Sedangkan yang *kedua* merupakan prinsip keamanan dan perlindungan informasi di pihak sendiri.

Selain sepuluh langkah yang dijelaskan diatas, Peter Schroder dalam bukunya mengelompokan strategi politik menjadi dua jenis, yakni; strategi ofensif (menyerang) dan strategi defensif (bertahan). Strategi ofensif di dalamnya dibagi menjadi strategi memperluas pasar dan strategi untuk menembus pasar. Sementara strategi defensif menyangkut strategi

untuk mempertahankan pasar dan strategi menutup atau menyerahkan pasar (Schroder, 2013, hal. 166). Untuk lebih jelasnya dapat melihat penjelasan dibawah ini:

Tabel 2. 2 Strategi Politik Menurut Peter Schorder

Strategi Ofensif	Strategi Defensif
Strategi memperluas pasar (Strategi Persaingan)	Strategi mempertahankan pasar (strategi pelanggan, stratei multiplikator)
Strategi menembus pasar (strategi pelanggan)	Strategi menutup/menyerahkan pasar (strategi lingkungan sekitar)

Sumber; adaptasi dari buku strategi politik, Peter Schroder (2013) hal. 166

❖ Strategi Ofensif (*menyerang*)

Peter schroder membagi strategi ofensif menjadi dua “strategi memperluas pasar” dan “strategi menembus pasar”. *Pertama*, Strategi perluasan pasar, dalam sebuah pemilu strategi ini bertujuan untuk membentuk kelompok pemilihan baru disamping para pemilih tradisional (tetap) yang telah ada. Strategi semacam ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye pengantar, untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru apa saja dan penawaran mana saja yang lebih baik, dibandingkan dengan penawaran partai-partai lainnya. Dilain sisi strategi memperluas pasar juga selalu memberikan peluang untuk menarik anggota baru. Oleh karena itu, organisasi harus dipersiapkan untuk menghadapi kelompok target baru ini. *Kedua*, Strategi menembus pasar, strategi ini bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini tidak aktif dengan memberikan penawaran yang lebih baik atau baru, melainkan menggali potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau penggalan bagian yang dimiliki dalam kelompok target dimana keberhasilan telah diraih sebelumnya. Sasaran yang mungkin ditargetkan misalnya, diperolehnya hasil yang lebih baik dari sebuah target.

❖ Strategi Defensif (*Bertahan*)

Terdapat dua jenis strategi defensif, yakni; “strategi mempertahankan pasar” dan “strategi melepas atau menyerahkan pasar”. *Pertama*, Strategi mempertahankan pasar, ini merupakan tipikal strategi yang digunakan oleh pemerintahan untuk mempertahankan mayoritasnya. Partai dari pemerintah akan merawat pemilih tetap mereka dan berusaha memperkuat pemahaman para pemilih musiman yang sebelumnya memilih mereka. Sementara itu, *kedua*, strategi melepas atau menyerahkan pasar, secara umumnya strategi ini memiliki dua artian. (1) sebuah partai ingin menyerah dan dalam keadaan tertentu ingin melebur atau berkoalisi dengan partai lain. sedangkan yang (2) penyerahan pasar sementara waktu kepada partai politik kuat yang memenangkan pemilu tahap pertama.

BAB III

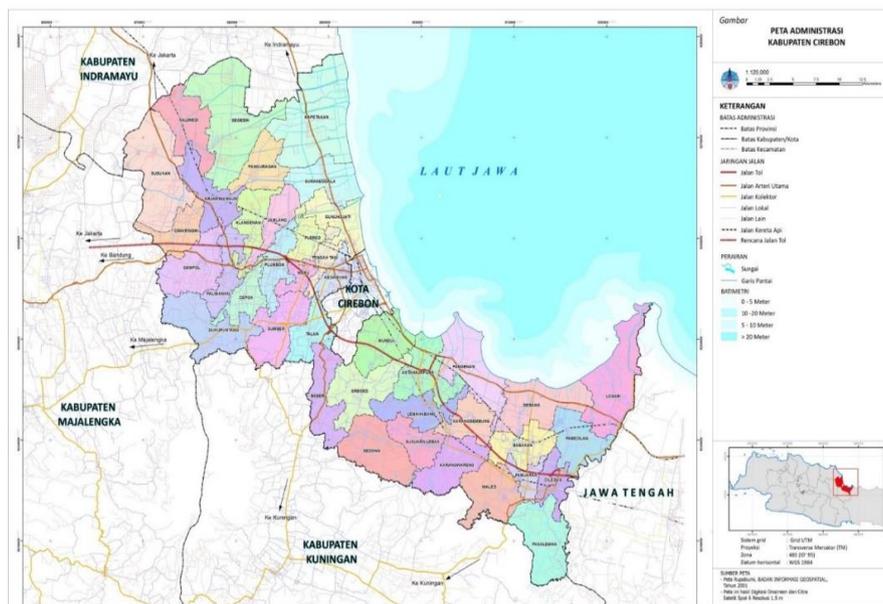
GAMBARAN UMUM DAERAH PEMILIHAN DAN PROFIL PKB PADA PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN CIREBON

Bab ini menyajikan pembahasan mengenai gambaran objek studi yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam sebuah penelitian penyajian gambaran umum sangat dibutuhkan, guna baik penulis maupun para pembaca dapat mengimajinasikan medan yang dikaji dalam sebuah penelitian. Sejatinya target utama yang diharapkan oleh penulis dari pemaparan bab ini adalah pemahamannya medan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Untuk itu, pembahasan mengenai gambaran umum objek studi di penelitian ini akan meliputi; gambaran umum Kabupaten Cirebon, kondisi perpolitikan Kabupaten Cirebon pasca reformasi dan profil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penjelasan lebih lanjut dan lebih detail mengenai itu semua akan dijelaskan dibawah ini.

3.1 PROFIL KABUPATEN CIREBON

A. LETAK GEOGRAFIS KABUPATEN CIREBON

Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Cirebon



Sumber; Bappeda Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2035

Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang terletak diujung timur wilayah Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Cirebon memiliki luas wilayah 107.029 Ha yang terdiri dari 40 Kecamatan 412 Desa dan 12 Kelurahan

sedangkan luas perairan pesisir mencapai 399,6 km² (54 km X 1,85km) dengan garis pantai mencapai 77,87 km. Kabupaten Cirebon secara letak dan kondisi dari geografisnya mencangkup tiga pembahasan penting, yakni; *pertama* pembahasan mengenai posisi astronomi Kabupaten Cirebon, *kedua* Geostrategis, dan *ketiga* Kondisi Morfologi Kawasan. Jika, dilihat dari posisi astronominya Kabupaten Cirebon terletak pada posisi 6⁰ 30' 58'' – 7⁰ 00' 24'' Lintang Selatan dan 108⁰ 19' 30'' – 108⁰ 50' 03'' Bujur Timur. Hal itulah yang mengakibatkan posisi dari wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian bervariasi. Secara umum Kabupaten Cirebon yang merupakan bagian dari daerah panturan ini di dominasi oleh dataran rendah. Adapun berdasarkan letak dan geografisnya batasan Kabupaten Cirebon meliputi, sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan
- Sebelah Barat Laut : Kabupaten Majalengka
- Sebelah Timur : Kabupaten Berbes Provinsi Jawa Tengah

Kemudian bila dilihat dari kondisi geosestrategisnya Kabupaten Cirebon memiliki posisi yang strategis (*geo-strategic*) apabila mencermati hal-hal sebagai berikut:

- a) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini berpotensi terjadi interaksi sumber daya dari dua provinsi dan berpeluang untuk pengembangan Kabupaten Cirebon.
- b) Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang membentang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) Cikampek-Palimanan (Cikapa), Palimanan-Kanci (Palikanci), dan Kanci-Pejagan.
- c) Kabupaten Cirebon berada di jalur utama lintasan kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya).
- d) Kabupaten Cirebon menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.

Dan terakhir jika dilihat dari kondisi morfologi Kabupaten Cirebon memiliki luas morfologi yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu bukit/perbukitan, datar dan gunung/pegunungan dan bukit.

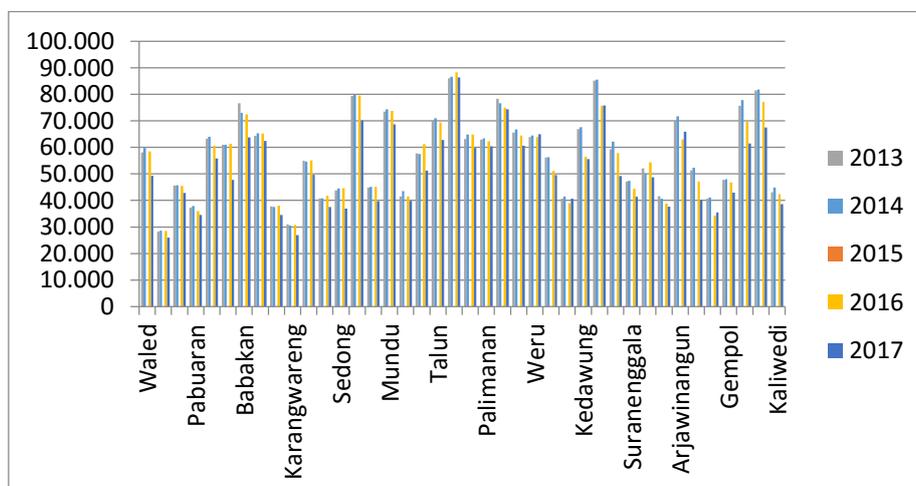
B. KONDISI DEMOGRAFI

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk yang cukup besar mencapai 2.162.576 jiwa dengan sebaran penduduk yang tidak merata di wilayahnya. Sejumlah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten seperti Kecamatan Sumber, Ciledug, Lemahabang, Palimanan dan Arjawinangun memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi disebabkan karena daya tarik lokasi dan ekonomi yang tinggi. Kecamatan yang jumlah penduduknya paling besar adalah Kecamatan Sumber dengan jumlah penduduk 89.192 jiwa, sedangkan kecamatan yang penduduknya paling kecil adalah Kecamatan Pasaleman dengan jumlah penduduk sebesar 26.793 orang. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon menunjukkan kenaikan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun 2014-2018 sebesar 1,29% per tahun.

Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon sebesar 2.021 jiwa/km² artinya dalam 1 km persegi dihuni oleh 2.021 orang. Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Weru sebesar 7.312 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Pasaleman sebesar 649 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3. 2 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2018



Sumber; Dokumen RANWAL RPJMD PemKab. Cirebon Tahun 2019-2024

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Waled	27.544	26.863	54.407
Pasaleman	13.414	13.472	26.886
Ciledug	22.466	22.035	44.501
Pabuaran	17.967	17.591	35.558
Losari	30.396	29.764	60.160
Pabedilan	28.308	28.089	56.397
Babakan	34.778	34.858	69.636
Gebang	32.819	32.414	65.233
Karangsembung	18.461	18.164	36.625
Karangwareng	14.256	13.895	28.151
Lemahabang	27.437	26.679	54.116
Susukan Lebak	20.539	19.820	40.359
Sedong	20.742	20.082	40.824
Astanajapura	38.293	36.492	74.785
Pangenan	22.627	21.832	44.459
Mundu	36.554	35.207	71.761
Beber	21.304	19.975	41.279
Greged	27.716	26.259	53.975
Talun	33.504	32.350	65.854
Sumber	46.138	44.753	90.891
Dikupuntang	31.754	31.197	62.951
Palimanan	30.929	30.671	61.600
Plumbon	40.897	39.165	80.062
Depok	32.197	31.277	63.474
Weru	35.345	33.201	68.546
Plered	27.081	26.095	53.176
Tengahtani	21.658	20.932	42.590
Kedawung	29.566	29.121	58.687
Gunungjati	39.786	39.521	79.307
Kapetakan	29.247	28.327	57.574
Suranenggala	22.380	22.227	44.607
Klangenan	26.477	26.199	52.676
Jamblang	19.465	19.178	38.643
Arjawinangun	34.943	33.948	68.891
Panguragan	21.407	21.219	42.626
Ciwaringin	18.705	18.623	37.328
Gempol	23.358	22.399	45.757
Susukan	32.890	32.792	65.682
Gegesik	34.833	34.427	69.260
Kaliwedi	20.332	20.159	40.491
Jumlah	1.108.513	1.081.272	2.189.785

Sumber; BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Kabupaten Cirebon berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019 terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.108.513 jiwa (50,68 %) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.081.272 jiwa (49,32 %). Sex ratio sebesar 103% yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-

laki. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	101.856	96.352	198.208
5 - 9	89.045	83.873	172.918
10 - 14	89.998	84.593	174.591
15 - 19	93.857	88.468	182.325
20 - 24	103.759	99.696	203.455
25 - 29	102.924	95.974	198.898
30 - 34	103.335	98.269	201.604
35 - 39	95.942	94.994	190.936
40 - 44	89.736	88.602	178.338
45 - 49	76.066	75.400	151.466
50 - 54	62.995	63.432	126.427
55 - 59	49.476	50.459	99.935
60 - 64	38.663	39.491	78.154
65 - 69	27.870	28.491	56.361
70 - 74	15.576	16.843	32.419
75+	10.827	13.759	24.586
Jumlah	1.151.925	1.118.696	2.270.621

Sumber; BPS Kabupaten Cirebon, Sensus Penduduk September 2020

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Cirebon memiliki jumlah usia penduduk dengan rata-rata usia produktif yang terbilang cukup tinggi, hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang berusia 20 – 35 tahun mendominasi daerah tersebut dengan jumlah total 405.996 jiwa laki-laki dan 388.933 jiwa perempuan. Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah tidak produktif atau masyarakat usia lanjut di Kabupaten Cirebon cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jumlah angka kelahiran atau balita usia 0- 4 tahun yang mencapai 101.856 jiwa laki laki dan 96.352 jiwa perempuan.

C. TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON

Kabupaten Cirebon berdasar data tingkat pendidikan untuk PAUD dan SD/MI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sedangkan untuk tingkat SMA/k dilihat dari APK (Angka Partisipasi Kasar) mengalami penurunan dari tahun 2015-2017. Ada dua indikator yang yang dipaparkan oleh Dinas Pendidikan untuk melihat angka kenaikan dan penurunan, yakni APK dan APM. Mengutip dari kemendikbud APK (Angka Partisipasi Kasar) adalah

perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase sedangkan APM (Angka Partisipasi Murni) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase (Kemendikbud.go.id, 2022). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 3 Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2018

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	9
1.1	Pendidikan						
	Pendidikan Anak Usia Dini						
	- APK PAUD	%	35,30	41,46	49,09	49,39	49,39
	Angka Partisipasi Kasar SD/SMP/SMA						
	- APK SD/MI	%	105,34	112,92	120,79	120,90	120,90
	- APK SMP/MTs	%	124,86	116,04	115,97	114,41	114,41
	- APK SMA/K	%	113,98	116,64	96,64	100,65	
	Angka Partisipasi Murni SD/SMP/SMA						
	- APM SD/MI	%	99,99	99,98	106,5	106,52	106,52
	- APM SMP/MTs	%	89,87	89,97	94,85	95,54	95,54
	- APM SMA/K	%	84,58	85,31	85,40		
	Angka Putus Sekolah						
	- Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,10	0,13	0,10	0,01	0,01
	- Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	%	0,49	0,68	0,35	0,29	0,29
	- Angka Putus Sekolah SMA Sederajat	%	0,48	0,44	0,29	0,56	
	- Angka Putus Sekolah SMK Sederajat	%	0,64	0,38	0,06	0,02	
	Angka Kelulusan						
	- Angka Lulusan SD/MI sederajat	%	98,94	99,07	96,5	95,8	95,8
	- Angka Lulusan SMP sederajat	%	99,98	99,26	83,23	82,06	82,06
	- Angka Lulusan SMA sederajat	%	99,86	99,82	83,61	74,42	
	- Angka Lulusan SMK sederajat	%	99,97	99,23	66,46	77,38	
	Angka Melanjutkan						
	- Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	97,53	105,35	110,41	109,35	109,35
	- Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	89,48	93,22	107,8	108,99	108,99
	Fasilitas Pendidikan						
	- Ruang Kelas Baik SD/MI	%	83,39	64,69	65,87	65,87	
	- Ruang Kelas Baik SMP/MTs	%	79,69	81,97	79,47	79,47	
	- Ruang Kelas Baik SMA/MA	%	74,31	74,53			
	- Ruang Kelas Baik SMK	%	92,67	94,33			
	Rasio Guru / Murid Sekolah Pendidikan Dasar						
	- SD	Siswa/ Guru	24	23	20	20	21
	- SMP	Siswa/ Guru	20	18	17	17	18
	- SMA	Siswa/ Guru	15	15	16	15	15
	- SMK	Siswa/ Guru	14	14	17	14	14
	Rasio Murid/kelas rata-rata sekolah dasar						
	- SD	Siswa	16	28	30	27	27
	- SMP	Siswa	27	37	31	29	29
	- SMA	Siswa	36	36	35		
	- SMK	Siswa	37	35	34		
	Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 24 tahun	%	93,89	94,07	94,77	98,92	98,97
	Angka Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV						
	- PAUD	%					
	- SD	%	83,27	89,67	89,66	94,05	94,05

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	9
	- SMP	%	96,56	93,79	95,05	96,46	96,46
	- SMA	%	95,42	97,30	99,07	98,78	
	- SMK	%	96,30	95,07	96,57	97,00	

Sumber; Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2018

Berdasarkan data Dinas Pendidikan diatas angka APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dari 35,30% menjadi 49,395. Hal senada juga terjadi di tingkat SD/Mi dimana angka APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI mengalami kenaikan dari 105,34 menjadi 120,90. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs angka APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs mengalami penurunan dari 124,86% menjadi 114,41%, dan angka APK (Angka Partisipasi Kasar) SMA/K mengalami penurunan dari 113,98% menjadi 100,65%. Kemudian untuk angka APM (Angka Partisipasi Murni) Kabupaten Cirebon dari tahun 2014-2018 baik untuk SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/K mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari angka APM SD/MI dari 99,99 menjadi 106,52, angka APM SMP/MTs dari 89,87 menjadi 95,54, dan angka APM SMA/K mengalami kenaikan dari 2014-2016 dari 84,58 menjadi 85,40. Sedangkan untuk angka putus sekolah baik untuk SD, SMP, SMA dan SMK dari tahun 2014-2018 di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan yang cukup signifikan, untuk angka putus sekolah SD sederajat turun dari 0,10 menjadi 0,01, angka putus sekolah SMP turun dari 0,49 menjadi 0,29, angka putus SMA dari 0,48 menjadi 0,56 dan angka putus sekolah SMK turun dari 0,64 menjadi 0,02.

Sementara itu, dilihat dari angka kelulusan untuk SD/MI, SMP, SMA dan SMK dari tahun 2014-2018 Kabupaten Cirebon mengalami penurunan. Angka lulusan SD/MI sederajat turun dari 98,94% menjadi 95,8%. Angka lulusan SMP sederajat turun dari 99,98% menjadi 82,06%. Angka lulusan SMA sederajat turun dari 99,97 menjadi 77,38. Gambaran tingkat pendidikan ini merupakan cerminan wajah masa depan Kabupaten Cirebon yang akan di isi oleh pemuda/i yang telah mengenyam pendidikan secara berkala. Pendidikan merupakan salah satu investasi nyata dalam memajukan SDM didaerah tersebut. Oleh karena itu, pendidikan kemudian dapat menentukan bagaimana cara masyarakat Kabupaten Cirebon memahami dan berpartisipasi aktif dalam perpolitikan secara sadar dan benar tanpa adanya paksaan dari pihak luar.

D. KONDISI SOSIAL MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON

Mengutip dari dokumen laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon kondisi sosial masyarakat di suatu daerah secara langsung akan berkaitan dengan kualitas manusia yang tercermin dari lima indikator, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, seni budaya dan olahraga. Indikator aspek pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator aspek kesehatan diukur dari Angka Kematian Bayi dan Balita (AKB dan AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), dan balita gizi buruk. Indikator aspek ekonomi diukur dari tingkat daya beli dan kesempatan kerja atau penduduk yang bekerja. Indikator aspek sosial diukur dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dan, Indikator seni, budaya, dan olahraga diukur dari ketersediaan fasilitas seni, budaya, dan olahraga sebagai unsur rekreasi. Jika capaian indikator-indikator tersebut dalam kategori baik maka kehidupan masyarakat di daerah tersebut dikategorikan dalam keadaan baik dan sejahtera. Secara kumulatif, capaian indikator-indikator tersebut dapat dilihat dari angka capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Di Kabupaten Cirebon Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2012 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2012, capaian IPM Kabupaten Cirebon sebesar 64,48 dan pada tahun 2017 adalah sebesar 67,39. Sementara, pada tahun 2012 posisi IPM Jawa Barat sebesar 64,48 dan pada tahun 2017 angkanya mencapai 70,69. Berdasarkan hal tersebut jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Namun demikian, kondisi capaian IPM dari tahun ke tahun di Kabupaten Cirebon selalu meningkat dengan rata-rata kenaikannya sebesar 0,53 point atau sekitar 0,82% per tahun.

E. DINAMIKA POLITIK LEGISLATIF KABUPATEN CIREBON PASCA REFORMASI

Kabupaten Cirebon pasca reformasi memiliki kondisi politik legislatif yang cukup memanas. Hal ini disebabkan kemunculan partai-partai baru yang membawa gaya perpolitikannya masing-masing dan cenderung memiliki adaptasi sangat bagus untuk bersaing pada pemilu. seperti misalnya Partai PKB yang mampu menggeser partai lama seperti partai Golkar pada pemilihan 1999, partai PAN yang mampu mendapatkan kursi di parlemen, atau bahkan Partai Hanura yang mampu memperoleh 1 kursi di parlemen. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwasanya selama periode pemilihan tahun 1999-2014 superioritas PDI-P di

Kabupaten Cirebon tidak bisa dibendung oleh partai manapun. Gambaran tersebut sejalan dengan sejarahnya dimana Jawa Barat merupakan basis PNI dan PDI-P merupakan penerus atau modernisasi dari PNI mengakibatkan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu dari kandang banteng terkuat yang ada di Jawa Barat. Walaupun demikian kekuatan PDI-P tersebutpun akhirnya hancur di tangan PKB pada pemilu tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 3. 4 Hasil peroleha Pemilihan Legislatif Kabupaten Cirebon Tahun 1999-2019

Nama Partai Politik	Perolehan Kursi DPRD Kab. Cirebon				
	1999	2004	2009	2014	2019
Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDI-P)	18	14	14	11	8
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	10	9	7	8	10
Partai Golongan Karya (Golkar)	5	7	6	6	7
Partai Amanat Nasional (PAN)	6	5	-	-	-
Partai Bulan Bintang (PBB)	1	-	1	1	-
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	-	-	3	6	7
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	6	6	5	6
Partai Demokrat	-	4	7	5	4
Partai Nasional Demokrat (NasDem)	-	-	-	4	7
Partai Hatinurani Rakyat (Hanura)	-	-	5	3	1
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	-	1	-
Partai TNI/Polri	5	-	-	-	-
PPRN	-	-	1	-	-

Sumber; diolah peneliti berdasrkan data dari BPS dan KPU Kabupaten Cirebon.

Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu yang prematur atau pemilu yang dipercepat karena seiring dengan krisis kepemimpinan pasca turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 yang digantikan oleh Wkkila Presiden B.J. Habibbi. Pada pemilihan tersebut di Kabupaten Cirebon PDI-P muncul sebagai pemenang dengan memperoleh sebanyak 18 kursi DPRD yang kemudian disusul oleh partai baru, yakni PKB dengan memperoleh 10 kuris di parlemen Kabupaten Cirebon. Prolehan tersebut menjadikan PKB sebagai partai yang mampu memberikan ancaman kepada seniornya PDIP di Cirebon. Peraih urutan ke tiga PAN, dengan meraih 6 kuri parlemen yang kemudian disusul oleh partai golkar 5 kursi, partai TNI/Polri 5 kuris, Partai Bulan Bintang serta PPRN yang masing-masing memperoleh 1 kursi di parlemen.

Kemudian pada pemilu tahun 2004 ada beberapa partai politik yang mengalami penurunan suara, salah satu partai yang mengalami penurunan suara adalah pemenang pemilu sebelumnya PDI-P dan partai PKB. Sedangkan untuk partai yang mengalami peningkatan perolehan kursi adalah partai Golkar. Dalam pemilihan ini PDI-P kembali keluar sebagai

pemenang dua kali berturut-turut dengan memperoleh sebanyak 14 kursi. Jumlah kursi ini sejatinya mengalami penurunan 4 kursi dari tahun sebelumnya. Peraih urutan kedua didapatkan oleh PKB dengan memperoleh sebanyak 9 kursi di parlemen dengan disusul oleh partai Golkar di urutan ketiga yang memperoleh 7 kursi meningkat 2 kursi dari tahun sebelumnya. Sementara itu, partai PKS berada di urutan keempat dengan memperoleh sebanyak 6 kursi disusul oleh partai PAN 5 kursi dan pada urutan terakhir ada partai Demokrat dengan 4 kursi parlemen.

Pada pemilu tahun 2009 di Kabupaten Cirebon partai petahanan tidak mengalami perubahan dan tetap mendominasi Kabupaten Cirebon tiga kali berturut-turut tanpa kekalahan. tahun 2009 merupakan tahun dimana ada penambahan kursi diparlemen dari sebelumnya 45 menjadi 50 kursi yang harus diperebutkan oleh partai politik di setiap daerah. Pada tahun tersebut di Kabupaten Cirebon tercatat terdapat sembilan partai politik berhasil mendapatkan kursi di parlemen. PDI-P yang secara konsisten pada dua periode pemilu sebelumnya di Kabupaten Cirebon memperoleh kemenangan, tahun ini PDI-P kembali menunjukan tajinya karena mampu memenangkan pemilihan ini dengan memperoleh 14 kursi di parlemen disusul oleh partai PKB yang berada di urutan kedua dengan memperoleh 7 kursi. Sementara itu, untuk partapartai lainnya seperti Partai Demokrat yang memperoleh 7 kursi namun kalah dalam jumlah suara dengan PKB harus menempati urutan ketiga. Urutan didapatkan oleh Partai Golkar dengan 6 kursi parlemen disusul oleh PKS 6 kuris, Hanura 5 kursi, Gerindra 3 kursi, Partai Bulan Bintang dan PPRN sama sama 1 kursi di DPRD.

Superioritas PDI-P di Kabupaten Cirebon semakin tidak bisa dibendung oleh partai-partai lainnya manakala pada pemilu 2014 PDI-P kembali memenangkan pemilihan tersebut dengan memperoleh 11 kursi di parlemen. kemenangan tersebut menasbihkan bahwasanya Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kandang banteng terkuat di Jawa Barat. Pada urutan kedua tidak ada perubahan PKB menempati urutan tersebut dengan memperoleh sebanyak 8 kursi di DPRD disusul oleh partai Golkar dan partai Gerindra yang sama-sama mendapatkan 6 kursi di parlemen. namun, dalam hal ini perolehan suara yang didapat oleh Golkar sedikit lebih tinggi dengan memperoleh 102.431 suara dibanding dengan Gerindra yang memperoleh 90.176 suara. sehingga dalam hal ini Golkar menempati urutan ketiga disusul oleh Gerindra. Pada urutan selanjutnya kursi DPRD didapatkan oleh Partai Demokrat yang mendapatkan 5 kursi atau 88.107 suara setara Partai PKS dengan yang memperoleh 5 Kursi atau 87.636 suara. urutan selanjutnya didapatkan oleh partai NasDem 4 kursi, Hanura 3 kursi serta partai PPP dan Partai Bulan Bintang yang memperoleh 1 kursi.

Dominasi PDI-P di Kabupaten Cirebon pasca reformasi empat kali berturut-turut tanpa kekalahan dirasa wajar mengingat Jawa Barat sendiri merupakan basis dari PNI yang pada pemilu tahun 1955 berhasil menduduki posisi kedua setelah Masyumi. Sehingga, berdasarkan hal itu di Jawa Barat tak terkecuali Kabupaten Cirebon masih banyak simpatik terhadap PDI-P sebagai kelanjutan dari PNI. Selain itu, figur Megawati sebagai penjelmaan dari Bung Karno yang memunculkan empati bahwa megawati merupakan orang yang didzalimi pada Order Baru sehingga rasa iba itu melahirkan simpatik bagi masyarakat di Jawa Barat. Disamping itu, dominasi PDI-P di Jawa Barat juga tidak terlepas dari slogan yang selalu di gaungkan oleh PDI-P di setiap kampanyenya, yaitu PDI-P sebagai partai orang kecil (*wong cilik*) (Rasyid, 2020, hal. 103). Namun, histori menarik dan superior PDI-P di Kabupaten Cirebon seakan-akan ternodai oleh kekalahannya pada pemilihan tahun 2019 oleh PKB.

Pemilu tahun 2019 terjadi perubahan suhu politik di Kabupaten Cirebon dengan kemenangan PKB yang memperoleh 219.970 suara atau 18.58% setara dengan 10 kursi di DPRD. Sehingga menduduki urutan pertama disusul pada urutan kedua yaitu PDI-P dengan meraih 167.459 suara atau 14.14% setara dengan 8 kursi. Urutan ketiga diraih oleh Partai Gerindra dengan memperoleh 141.479 suara atau 11.95% setara dengan 7 kursi. Keempat adalah partai Golkar dengan memperoleh 139.744 suara atau 11.80% setara dengan 7 kursi parlemen. peringkat kelima didapatkan oleh Partai NasDem dengan memperoleh sebanyak 117.098 suara atau 9.89% setara dengan 7 kursi. Keenam partai PKS dengan 93.137 suara atau 7.86% setara dengan 6 kursi, ketujuh terdapat partai Demokrat yang memperoleh sebanyak 78.767 suara setara dengan 6.65% atau 4 kursi. Dan partai terakhir yang mendapatkan kursi di parlemen adalah Partai Hanura dengan 39.590 suara atau 3.34% setara dengan 1 kursi di DPRD Kabupaten Cirebon. Kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pemilu 2019 di Kabupaten Cirebon menjadi sejarah baru yang lahir bagi perpolitikan Kabupaten Cirebon dan tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk melihat hal tersebut.

3.2 PROFIL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

A. SEJARAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

Berbicara tentang sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak akan pernah bisa dilepaskan dari keberadaan Nahdlatul Ulama' (NU), sebuah *jam'iyah diniyah* yang didirikan jauh hari sebelum keberadaan Republik Indonesia diproklamasikan oleh Sorekaro-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jika usia digunakan sebagai tolok ukur pengalaman

maka NU telah memiliki “jam terbang” yang tinggi dalam mengarungi pergerakan di sektor keagamaan serta sosial politik di Indonesia. Jejak sejarah pergulatan politik NU ikut mewarnai perjalanan Republik Indonesia pada masa lalu hingga sekarang (Arifin, 2008, hal. 39).

Dalam jejak sejarah perpolitikan Indonesia, reformasi politik pada tahun 1998 telah memunculkan kebijakan liberalisme politik yang ditandai dengan perubahan lima paket UU politik¹ (Arifin, 2008, hal. 56). Dengan perubahan tersebut membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk memunculkan partai-partai baru. Sejalan dengan hal itu, desakan agar Nahdlatul Ulama’ (NU) untuk bermain kembali dalam ranah politik-pun mulai menguat kembali terutama dari lapisan elit dan kalangan pemuda NU. Gejolak dukungan dan desakan dari berbagai lapisan NU semakin memperoleh dukungan yang sangat kuat seiring dengan berakhirnya kekuasaan soeharto pada tahun tersebut. Lengsernya Presiden soeharti pada tanggal 21 Mei 1998 membawa berkah tersendiri bagi keberlangsungan perpolitikan Nahdlatul Ulama’ (NU) di indonesia.

Sehari setelah peristiwa pengunduran Presiden Soeharto, PBNU mulai kebanjiran untuk usulan membentuk partai politik dari warga NU. Usulan tersebut beragam, mulai dari pengusulan pendirian partai politik, ada yang mengusulkan nama partai politik, terdapat pula yang mengusulkan secara lengkap mulai dari konsep, nama, lambang serta hubungan kelembagaan antara NU dengan partai baru tersebut. Dalam homepage *pkb.id* (2019) dejelaskan pada saat itu terdapat 39 nama parpol yang diusulkan. Nama partai yang paling banyak diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Selain nama parpol, ada juga kalangan yang mengusulkan lambang parpol. Lambang parpol yang diusulkan terbanyak adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan dibaluti oleh warna hijau. Dengan banyaknya usulan yang diajukan dari berbagai kalangan NU, usulan yang dirasa paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai oleh KH. M. Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat.

Dalam menyikapi berbagai usulan yang masuk dari masyarakat Nahdiyyin, PBNU sebagai induk dari organisator menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya

¹ Lima Paket UU Politik itu adalah; (1) UU No. 1 Tahun 1985 Tentang Pemilu Badan Permusyawaratan/Perwakilan. (2) UU No. 2 Tahun 1985 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. (3) UU No. 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya. (4) UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (5) UU No. 5 Tahun 1985 Tentang Referendum. Menjelang Pemilu 1999, UU Politik itu mengalami perubahan dengan terbitnya UU No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu dan UU no. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Sebagai imbas perubahan itu adalah terciptanya sistem politik multi partai dan pemilu yang lebih demokratis.

kenyataan bahwasanya hasil dari Mukhtamar NU ke-27 di Stubondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris Nahdlatul Ulama' (NU) tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian sikap PBNU itu dinilai lamban oleh banyak pihak yang tidak sabar menantikan kemunculan partai tersebut. Bahkan ada beberapa kalangan yang secara langsung menyatakan berdirinya partai politik baru untuk mewedahi aspirasi masyarakat setempat. Salah satunya adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat di Cirebon.

Melihat perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat Nahdiyyin, akhirnya PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 3 Juni 1998. Dari forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk tim lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Susunan tim lima tersebut adalah sebagai berikut; diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH. M. Dawam Anwar (Katib Aan PBNU), Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aan PBNU), HM. Rozy Munir, S. E., M. Sc (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekertaris Jendral PBNU).

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja dari Tim Lima maka diadakannya Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas Kepada Tim Lima. Selain itu, dari rapat tersebut juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU), dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tugas dari Tim Asistensi ini adalah membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewedahi aspirasi politik warga NU.

Rekam jejak sejarah partai PKB-pun berlanjut pada tanggal 22 Juni 1998 dimana Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26-27 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsiyering di Villa Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Hasil dari pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu: okok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa. Hingga pada akhirnya, partai baru tersebut dideklarasikan pada tanggal 23 Juli 1998 di rumah Gus Dur di Ciganjur, Jakarta dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Deklaratornya adalah para tokoh terkemuka NU, yaitu; KH

Ilyas Ruhayat, KH Muchith Muzadi, KH Munasir Ali, KH Abdurrahman Wahid dan KH Mustofa Bisri (Arifin, 2008, hal. 59).

KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai salah satu pendeklarasi Partai Kebangkitan Bangsa tidak masuk kedalam struktur pada awal Kepeguruan PKB hal ini karena Gus Dur pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua PBNU. Posisi-posisi kunci yang terdapat di struktur kepengurusan PKB sebagian besar di duduki oleh anggota Tim Lima dan Tim Asistensi. Namun demikian, tindakan dan kebijakan Gus Dur selaku Ketua PBNU sangat terlihat jelas membackup penuh partai baru tersebut. Dalam berbagai kesempatan Gus Dur selalu menampaikan bahwasanya PKB sebagai satu-satunya partai yang didirikan oleh PBNU.

B. LAMBANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Pada pasal 10 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang lambang menjelaskan bahwasanya lambang partai berbentuk bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah, dengan bingkai dalam empat persegi bergaris ganda, dan tulisan PKB di bawahnya yang diberi bingkai luar dengan garis tunggal (AD/ART PKB, 2019). Adapun visualisasi gambar lambang PKB adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 3 Lambang Partai Kebangkitan Bangsa



Sumber; Website Bawaslu Kab. Cirebon (Diakses 18/12/2022)

Penjelasan lebih lanjut terkait makna dan penggunaan lambang PKB terdapat pada pasal 1 dan 2 Anggaran Rumah Tangga partai PKB tahun 2019. Disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 1 butir ke satu bahwasanya makna dari gambar lambang PKB adalah sebagai berikut;

- a. Bumi dan peta indonesia, bermakna tanah air indonesia yang merupakan basis perjuangan partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar;
- b. Sembilan bintang, bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu; kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan;
- c. Tulisan nama partai dan singkatannya, bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis;
- d. Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar (AD/ART PKB, 2019).

Sedangkan makna warna yang terdapat pada lambang PKB dijelaskan pada Anggaran Rumah Tangga pasal 1 butir dua yang sebagai berikut;

- a. Warna putih, bermakna kesucian, ketulusan, dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai;
- b. Warna hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat indonesia yang menjadi tujuan perjuangan;
- c. Warna kuning, bermakna kebangkitan bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia (AD/ART PKB, 2019).

C. IDEOLOGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

Ideologi menurut Karl Marx dalam (Kaelan, 2002, hal. 53), diartikan sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik, sosial ekonomi. Berdasarkan hal itu, ideologi memiliki posisi yang penting bagi sebuah negara maupun bagi partai politik, karena dalam partai politik ideologi memiliki peranan sebagai identitas partai politik dalam menjalankan perpolitikannya. Hal senada berlaku juga bagi PKB dalam menjalankan perpolitikan di indonesia. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki ideologi yang sangat unik karena jika dari pelebagaan partai ini secara jelas mencantumkan pancasila sebagai asas partai, akan tetapi tidak bisa dipungkiri kelahiran PKB dibadani oleh NU (Dhakiri & Djafar, 2015). Pada pasal 4 Anggaran Dasar PKB dijelaskan secara tegas bahwa partai ini berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh

Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sementara itu, lebih lanjut dalam pasal 5 Anggaran Dasar PKB menegaskan bahwa yang menjadi prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah (AD/ART PKB, 2019).

D. VISI MISI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

Sebagai sebuah organisasi politik yang secara sah dan diakui oleh undang-undang di Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki visi dan misi yang sangat jelas dalam mengarungi dinamika perpolitikan di Indonesia. Terdapat tiga visi yang digagas oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam mengarungi politik Indonesia (m.pkb.id, 2022). Ketiga visi tersebut antara lain;

- a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual
- c. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karrimah.

Sedangkan, terkait dengan misi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebagai berikut;

- a. Bidang Ekonomi, menegakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;
- b. Bidang Hukum, berusaha menegakan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
- c. Bidang Sosial dan Budaya, berusaha membangun budaya yang maju dan moderen dengan tetap memelihara jati diri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- d. Bidang Pendidikan, berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;

- e. Bidang Pertahanan, membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

E. POSISI DPC PKB KABUPATEN CIREBON

Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Cirebon merupakan induk organisasi dengan pemimpin partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat PKB untuk masa bakti 5 (lima) tahun. Dapat dikatakan DPC PKB Kabupaten Cirebon merupakan tangan kanan atau boas yang diberi tugas beserta tanggungjawab oleh atasannya untuk mengurus daerah tertentu dalam hal ini daerah Kabupaten Cirebon dalam waktu yang sudah ditentukan. DPC PKB Kabupaten Cirebon diberikan wewenang sesuai dengan pasal 24 Anggaran Rumah Tangga yang telah diatur sedemikian rupa oleh DPP PKB (AD/ART PKB, 2019). Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya wewenang DPC meliputi;

- a. menetapkan kebijakan partai di tingkat Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan partai, keputusan permusyawaratan partai tingkat provinsi, keputusan permusyawaratan partaitingkat kabupaten, dan kebijakan DPP;
- b. mengesahkan komposisi dan personalia DPRt dan DPART dengan memperhatikan rekomendasi DPAC;
- c. membekukan DPRt dan DPART sebagaimana diatur dalam Anggaran rumah Tangga;
- d. membentuk organ fungsional partai sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian tujuan partai di tingkat cabang

Sedangkan DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam menjalankan roda perpolitikan tingkat kabupaten memiliki kewajiban yang sudah diatur dalam pasal 25 Anggaran Rumah Tangga PKB antara lain;

- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan partai, keputusan permusyawaratan partai tingkat provinsi, keputusan permusyawaratan partai tingkat kabupaten serta keputusan dan kebijakan DPP;

- b. Membuat laporan secara berkala kepada DPP dan DPW;
- c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang (AD/ART PKB, 2019).

Dalam menjalankan roda perpolitikan di tingkat Kabupaten Cirebon DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon menaungi kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) yang tersebar di seluruh kecamatan.

F. STRUKTUR KEPENGURUSAN DPC PKB KABUPATEN CIREBON

Susunan pengurus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal ada tiga kepengurusan. Pertama, Dewan Syuro' adalah Dewan Penjaga Garis-garis Perjuangan Partai. Kedua, Dewan Tanfidz adalah Dewan Pelaksana Partai. Ketiga, Mustasyar adalah Dewan Penasihat Partai

Adapun struktur kepengurusan DPC PKB Kabupaten Cirebon periode pasca muhktamar tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Syuro' : KH. Syaefullah Amin
Ketua Tanfiz : Hasan Basori, SE. MSi
Sekertaris DPC : Waswin Jananta, SH

G. POTRET CALEG PKB PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN CIREBON

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam mengikuti kontestasi pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Cirebon mengikutsertakan sebanyak 50 (lima puluh) calon legislatif dengan rincian daerah pemilihan (dapil) adalah sebagai berikut;

- a. Daerah Pemilihan I sebanyak 8 Calon Legislatif
- b. Daerah Pemilihan II sebanyak 7 Calon Legislatif
- c. Daerah Pemilihan II sebanyak 7 Calon Legislatif
- d. Daerah Pemilihan IV sebanyak 8 Calon Legislatif
- e. Daerah Pemilihan V sebanyak 7 Calon Legislatif
- f. Daerah Pemilihan VI sebanyak 6 Calon Legislatif
- g. Daerah Pemilihan VII sebanyak 7 Calon Legislatif

BAB IV

KONDISI INSTUTISIONAL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) TERKAIT KEMENANGAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN CIREBON

Bab ini membahas analisa temuan penulis dilapangan mengenai kondisi instutisional Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berkaitan pada kemenangan PKB dipemilu kegislatif tahun 2019 Kabupaten Cirebon. Mengenai instutisional PKB Kabupaten Cirebon, kondisi keuangan hingga kuatnya intervensi ketua DPP PKB dalam pengambilan keputusan merupakan permasalahan utama yang dialami oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Cirebon. Hasil dari observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukan bahwasanya DPC PKB di Kabupaten Cirebon belum terlembaga secara maksimal. Data yang disajikan oleh penulis merupakan hasil dari temuan-temuan dilapangan yang didapatkan melalui proses wawancara maupun dokumentasi. Sementara itu, sajian daripada bab ini oleh penulis dilakukan dengan analisis mendalam yang didasarkan pada landasan teori mengenai pelembagaan partai politik dengan tujuan untuk memaparkan serta menganalisis terkait kondisi instutisional PKB Kabupaten Cirebon.

4.1 DERAJAT KESISTEMAN (*Systemness*)

Vicky Randall dan Lars Svansand dalam teorinya menjelaskan bahwasanya suatu partai politik dapat dikatakan terlembaga dari derajat kesisteman apabila dalam pelaksanaannya partai politik telah melaksanakan fungsi-fungsinya semata menurut AD/ART yang telah disepakati bersama oleh para anggota partai. Dalam mengukur pelaksanaan fungsi-fungsi partai tersebut di penjelasan ini penulis bagi berdasarkan lima indikator, yaitu: asal usul partai (*origins*), kemandirian keuangan partai, demokrasi di internal partai, sistem kaderisasi dan pemilihan ketua partai, faksionalisme di dalam partai.

1. Asal usul partai (*Origins*)

Penjelasan mengenai *origins* ini merupakan analisis yang membahas terkait asal-usul terbentuknya sebuah partai politik. Tujuan sebenarnya dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui apakah partai tersebut merupakan bentukan dari kelompok elit (*atas*) yang disambut oleh kelompok bawah (*massa*) atau justru partai tersebut merupakan partai yang lahir dari keresahan kelomopok bawah (*massa*) yang kemudian disambut oleh kelompok atas (*elit*). Hal ini penting untuk dilihat mengingat dalam membuat basis dukungan yang kuat dan loyal terhadap partai serta partai tersebut terlembaga secara kesisteman maka partai harus memiliki

historical yang jelas agar seluruh masyarakat mengetahui seluk beluk kemunculan partai, yang kemudian dari situ bisa dilihat citra seperti apa yang dibawa oleh partai tersebut kepada masyarakat.

Seperti yang sudah dijelaskan secara terperinci di BAB III pada pembahasan sejarah partai kebangkitan bangsa, secara umum dapat dikatakan PKB merupakan partai yang dibentuk dari kalangan bawah yang kemudian disambut oleh kalangan atas. Hal ini terjadi mengingat latar belakang kelahiran partai PKB di seluruh daerah Indonesia kebanyakan diinisiasi oleh kalangan masyarakat NU atau Nahdliyin, itu berarti PKB merupakan bagian yang tak pernah bisa dilepaskan dari Nahdlatul Ulama' (NU). Rekam jejak perpolitikannya PKB di Indonesiapun diawali dari keresahan warga Nahdliyin dimana menurut mereka Nahdlatul Ulama' (NU) sebagai organisasi masyarakat yang mereka ikuti belum mampu untuk menampung aspirasinya dalam urusan perpolitikan. Untuk itu, mereka mendesak elit-elit Nahdlatul Ulama' (NU) untuk bermain kembali diranah perpolitikan, terlebih setelah jatuhnya rezim Soeharto pintu untuk terbentuknya partai politik baru sangat terbuka lebar. Berangkat dari kekecewaan tersebut kemudian elit-elit yang terdapat di Nahdlatul Ulama' (NU) memunculkan PKB sebagai wadah perpolitikannya masyarakat Nahdlatul Ulama' atau yang biasa dikenal dengan sebutan Nahdliyin.

Hal ini bahkan secara tegas disampaikan oleh kalangan elit PKB dalam banyak pernyataan politik di berbagai media terkait sikap yang digunakan oleh PKB adalah sikap partai yang peduli umat dan melayani masyarakat. Sikap tersebut dipilih oleh PKB karena mereka beranggapan bahwasanya mereka merupakan partai yang terbentuk dari desakan seluruh elemen masyarakat Nahdliyin yang merasa kecewa terhadap praktik-praktik politik partai lama dimana aspirasi politik masyarakat Nahdliyin pada saat itu merasa sedikit diabaikan. Terlebih partai-partai lama tak jarang juga diterpa isu-isu yang kurang sedap seperti misalnya partai yang memiliki rekam jejak yang kurang baik, adanya praktik klintalisme, beban sejarah dan citra buruk terhadap partai orde baru. Berangkat dari hal tersebut, nampaknya PKB sebagai partai yang muncul pasca terjadinya perpindahan kursi eksekutif dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J Habibie atau biasa yang disebut dengan reformasi memang terbentuk dari bawah bukan dari kalangan atas.

Namun, kendati PKB sendiri mendaku mereka sebagai partai yang tumbuh dari bawah yang kemudian disambut oleh kalangan elit Nahdlatul Ulama' (NU), hal bertolak belaka dengan pernyataan kemunculan PKB tersebut justru penulis temukan dilapangan pada saat

melakukan wawancara dengan Hasan Basori selaku ketua umum DPC PKB Kabupaten Cirebon. Hasan seolah mematahkan dalil PKB yang sudah berkembang sangat lama sebagai partai yang terbentuk atas keresahan kalangan bawah yang kemudian disambut oleh kalangan atas NU dan terbentuklah PKB. Menurutnya proses lahirnya PKB berawal dari inisiatif kiyai-kiyai besar Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Timur dan Jawa Barat termasuk Kabupaten Cirebon dengan tujuan agar NU sendiri memiliki kendaraan untuk penyampaian aspirasi politik bagi seluruh warga NU dan masyarakat Indonesia secara umumnya. Hal ini dilakukan karena Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan organisasi yang memiliki prinsip bahwa NU tidak boleh untuk kembali berperan aktif didalam dunia perpolitikan. Untuk itu, kiyai-kiyai besar NU membentuk PKB sebagai wadah aspirasi politik. Hal senada juga terjadi di Kabupaten Cirebon dimana kiyai-kiyai besar NU dalam hal ini kiyai dari pondok pesantren kempek, kiyai dari pondok pesantren buntet, kiyai dari pondok pesantren gedongan dan lain sebagainya mengimplementasikan inisiatif dari seluruh kiyai NU tersebut dengan membentuk DPC PKB di Kabupaten Cirebon sebagai wadah politik seluruh masyarakat NU dan Kabupaten Cirebon (*Wawancara dengan Hasan Basori Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, 4 Januari 2023*).

Bahkan, jika menilik lebih jauh mengenai kemunculan PKB di Indonesia yang tentunya lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah NU sendiri yang pernah terlibat pada perpolitikan. Pemilu pada tahun 1955 merupakan pemilihan pertama kalinya yang dilaksanakan pasca kemerdekaan Indonesia, dimana pada saat itu Nahdlatul Ulama' (NU) sendiri merupakan salah satu peserta dari ratusan partai politik yang ikut dalam pemilihan umum (*nuonline.or.id. 1 Maret 2023*). Keterlibatan NU di dunia perpolitikan pada pemilu 1955 merupakan bentuk kekecewaan terhadap masyumi yang pada saat itu NU hanya mendapat jatah satu kursi di kabinet Wilopo pada tahun 1952 (*kompas.com. 1 Maret 2023*). Partai NU pada saat lampau merupakan partai yang mampu bersaing dengan partai lainnya seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Catatan indah sebagai partai politik bagi kalangan NU akhirnya berakhir pada tahun 1982 setelah fraksi NU mengalami perselisihan yang cukup hebat dengan kelompok lain yang mengakibatkan 29 tokoh NU di coret dari calon anggota legislatif. Berdasarkan pencoretan tersebut NU akhirnya bersepakat pada Mukhtamar tahun 1984 untuk meninggalkan seluruh panggung politik.

Kehadiran PKB sebagai representasi dari Nahdlatul Ulama' di dunia politik memang disambut baik oleh seluruh kalangan nahdliyin, namun kemunculannya memunculkan banyak tanda tanya terkait independensi PKB dari kelompok elit partai dalam praksis politik di Indonesia pada masa lampau. Sehingga tidak sedikit yang menganalisis PKB merupakan partai

yang terbentuk dari elit-elit NU yang kemudian disambut oleh kalangan nahdhiyin sebagai kelanjutan dari perjalanan politik Nahdlatul Ulama' di Indonesia.

2. Kemandirian Keuangan Partai

Keuangan didalam setiap organisasi seperti partai politik merupakan hal terpenting yang menjadi tumpuan dalam menjalankan roda perpolitikan atau sejenisnya. Hal ini dikarenakan, dalam setiap kegiatan partai akan membutuhkan sumber pendanaan yang cukup agar kelancaran setiap kegiatan berjalan sebagaimana mestinya. PKB Kabupaten Cirebon sebagai partai politik memiliki mekanisme-mekanismenya tersendiri dalam memenuhi kebutuhan keuangan didalam partai. Mekanisme tersebut diatur dalam AD/ART yang telah disepakati oleh partai PKB dimana pada pasal 30 BAB Keuangan dan Kekayaan Partai dijelaskan secara detail bahwa terdapat lima sumber utama pemenuhan kebutuhan keuangan partai PKB, yakni iuran anggota, bantuan negara, usaha-usaha yang dilakukan oleh partai, sumbangan yang sah dan halal serta tidak mengikat, hingga peralihan hak untuk dan atas nama partai.

Melalui mekanisme tersebut harapan dari partai PKB adalah terciptanya kemandirian partai didalam hal keuangan ataupun pendanaan. Namun, realita yang terjadi didalam lapangan kondisi keuangan Partai PKB Kabupaten Cirebon masih sangat terbatas dan cenderung bergantung pada sumbangan-sumbangan baik dari pemerintah maupun sumbangan dari aktor-aktor internal di PKB yang memiliki modal cukup besar. Hal ini dikonfirmasi secara langsung oleh sekretaris DPC PKB dalam wawancaranya dengan penulis bahwasanya sumber pendanaan yang selama ini didapatkan oleh partai PKB di Kabupaten Cirebon sebagian besar berasal dari:

- a. Bantuan politik berupa dana dari Pemda melalui KESBANGPOL dengan nominal sebesar Rp.650.000.000, per tahun
- b. Sumbangan bulanan dari aktor internal PKB Kabupaten Cirebon dalam hal ini 10 kader PKB yang terpilih di legislatif Kabupaten Cirebon
- c. Sumbangan dari pihak luar yang bersifat insidental (sukarela) atau hanya setiap ada acara besar saja

Sementara itu, berkaitan dengan menggalang dana melalui iuran bulanan anggota di dalam partai PKB Kabupaten Cirebon masih tidak berjalan secara maksimal. Walaupun iuran anggota sendiri sudah diatur dalam AD/ART pada pasal 8 BAB Keanggotaan yang disebutkan bahwasanya setiap anggota membayar uang iuran anggota setiap bulan. Pembayaran iuran bulanan ini bagi anggota partai PKB Kabupaten Cirebon bersifat wajib sebagai pemenuhan

pendanaan kebutuhan partai. Adapun besaran iyuran bagi anggota diatur berdasarkan kesepakatan ditingkat DPC, sedangkan terkait besaran uang pangkal anggota ditetapkan secara langsung oleh DPP dengan pengalokasian dana bagi DPP memperoleh 10 persen, DPW memperoleh 20 persen, dan DPC memperoleh 70 persen. Namun, mekanisme dalam pelaksanaan iyuran bulanan bagi anggota di PKB Kabupaten Cirebon masih mengalami kendala yang cukup berarti, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari para pengurus khususnya anggota atau kader partai yang berkaitan dengan kewajiban dalam hal iyuran bulanan. Kendala inilah yang mengakibatkan PKB Kabupaten Cirebon masih bergantung pada anggota dan pengurus yang mempunyai jabatan strategis di DPRD Kabupaten Cirebon. Terlebih sepuluh Kader PKB yang terpilih menjadi anggota DPRD memiliki latar belakang yang beragam dan memiliki kondisis financial yang kuat.

“Dalam pendanaan kita itu mendapatkan bantuan politik dari pemerintah daerah melalui Kesbangpol sekitar Rp.650.000.000 per tahun dihitung dari berapa perolehan total PKB kemudian dikalikan 3000 maka ketemulah sekitar Rp. 650 Juta tersebut, selain itu terdapat sumbangan sukarela dari masyarakat tapi itu sifatnya insidental (setiap ada kegiatan saja), kemudian adanya iyuran bulanan dari temen-temen 10 fraksi anggota PKB, walaupun memang (berdasar pendanaan tersebut) kita belum mampu mensejahterakan temen-temen sampai tingkat ranting yah tapi upaya kita adalah menuju kesana”. (Wawancara dengan Waswin Janata Sekertaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, 11 Januari 2023)

Akibat dari sumber keuangan yang terbatas dan cenderung bergantung pada sumbangan berimbas pada kesejahteraan partai pada tingkat bawah. Dalam artian pada tingkat di bawah DPC jika memiliki program dan ingin melaksanakannya maka akan memiliki permasalahan dengan keterbatasan anggaran partai. Dengan permasalahan tersebut memungkinkan untuk program-program yang mungkin memberikan efek besar pada PKB ditingkat DPC kebawah akan tidak terlaksana dengan baik atau bahkan terhenti. Walaupun memang harus diakui bahwasanya dalam setiap kegiatan PKB memiliki partner dalam hal sumbangan keuangan yang bersifat insidental dan diakui secara sah tidak melanggar AD/ART partai seperti yang sudah dijelaskan diatas. Namun, didalam lapangan sumbangan tersebut nyatanya hanya memenuhi kebutuhan sekitar 20% saja dari total kebutuhan partai. Seperti yang disampaikan oleh Waswin Janata Sekertaris DPC Kabupaten Cirebon. Waswin menyampaikan bahwasanya dalam program yang diusung oleh anak-anak PKB, terkadang yang membuat programlah mencari dana sendiri baik mencari sumbangan dari pihak luar ataupun dari dalam partai. Seperti misalnya pembuatan kaos yang di inisiatifi oleh para anggota partai, dengan keadaan dana yang terbatas maka mereka mencari dana melalui patungan secara pribadi dan sumbangan dari dalam partai.

Hal senada juga disampaikan oleh Mohammad Luthfi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari fraksi PKB. Luthfi menyatakan bahwasanya PKB Kabupaten Cirebon merupakan partai yang memiliki problem pada kekurangan biaya operasional partai. Sehingga untuk menutupi kekurangan biaya tersebut PKB lebih mengandalkan pada bantuan politik dari pemerintah daerah (Banpol) maupun sumbangan anggota DPRD Kabupaten Cirebon fraksi PKB. Bantuan tersebut digunakan oleh PKB Kabupaten Cirebon untuk menjalankan roda perpolitikan partai melalui kegiatan yang dilaksanakan baik yang diadakan di internal partai maupun pada eksternal partai. Seperti misalnya kegiatan Foodbank yang diadakan oleh PKB Kabupaten Cirebon setiap hari jum'at dengan konsep membagikan makan-makan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendanaan yang digunakan pada kegiatan Foodbank ini berasal dari anggota PKB yang terpilih di DPRD Kabupaten Cirebon.

“kita itu partai kurang biaya mas, jadi kalau ditanya mengenai dalam pendanaan menjamin kesejahteraan anggota, ya masih belum mungkin baru sekitar 20% saja yang terpenuhi kesejahteraannya (dari total kebutuhan partai)”. (Wawancara dengan Mohammad Luthfi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PKB, 24 Januari 2023)

Ketergantungan pada pihak-pihak di internal partai yang memiliki modal besar serta mengandalkan sumbangan dari pihak luar bukan merupakan penyalahan peraturan didalam partai PKB. Namun dengan ketergantungan pada cara-cara yang sangat pragmatis ini akan memberikan ruang gerak bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini akan berakibat pada otonomi atau kemandirian partai dalam pengambilan keputusan, karena dengan kondisi tersebut dapat dijadikan oleh donatur-donatur untuk menguasai partai melalui modal atau financial yang dimilikinya. Menurut lutfi dalam tesisnya ukuran keuangan partai dapat dikatakan mapan, ketika sebuah partai mampu hidup dan memaksimalkan pendanaan partainya melalui iyuran anggota bukan bersandar pada bantuan pemerintahan maupun dari individu-individu atau kelompok tertentu baik di internal partai maupun dari luar partai (Lutfi, 2012. Hal 26).

3. Demokrasi di Internal Partai

Demokrasi di internal partai politik menjadi salah satu faktor yang paling menentukan berfungsinya demokrasi di dalam negara dan masyarakat. Demokrasi partai politik juga dapat dikatakan sebagai kemampuan dalam mengagregasikan kepentingan, memformulasikan kebijakan publik, perekrutan kandidat yang memiliki kemampuan dan mencerminkan aspirasi serta kepentingan publik (Lihat Juniar, 2021, hal. 27). DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan demokrasi diinternalnya senantiasa selalu berusaha untuk tetap berpedoman

pada prosedur yang sudah disepakati oleh seluruh kadernya dalam hal ini AD/ART PKB tahun 2019. Kesesuaian pelaksanaan perpolitikan dengan AD/ART yang sudah ada sangat diperlukan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan peluang kepada seluruh anggota dan pengurus partai agar terlibat dalam setiap pengambilan keputusan.

Terlebih didalam AD/ART PKB pasal 79 BAB Sembilan tentang Permusyawaratan dijelaskan secara detail bahwasanya dalam kepengurusan cabang di PKB terdapat musyawarah cabang yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat cabang yang diselenggarakan secara langsung oleh DPC dalam rentan waktu 5 (lima) tahun sekali dengan dipimpin oleh DPP atau DPW yang diberi mandat secara langsung oleh DPP PKB. Kegiatan musyawarah cabang ini merupakan salah satu agenda penting DPC PKB karena dalam musyawarah tersebut terdapat lima point penting yang di bahas. yaitu; menilai laporan pertanggungjawaban DPC, menetapkan program-program DPC untuk lima tahun kepengurusann kedepan, melengkapi kepengurusan DPC, dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu. Dalam musyawarah cabang ini DPC PKB wajib hukumnya untuk melibatkan seluruh elemen didalam tubuh partai politik yang terdiri dari anggota DPC, ketua dari setiap divisi, ketua lembaga, badan ditingkat cabang, ketua dewan syura dan ketua dewan tanfidz DPAC, serta pemimpin dan anggota FPKB DPRD Kabupaten/Kota.

Selain musyawarah cabang yang merupakan musyawarah tertinggi pada tingkat DPC, dalam AD/ART PKB tahun 2019 terdapat penjelasan terkait mengutamakan musyawarah kerja pada tingkat DPC. Hal itu tertuang secara jelas pada pasal 80 dimana pasal tersebut menjelaskan musyawarah kerja cabang ini merupakan forum di tingkat DPC Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program partai ditingkat DPC. Disamping mengevaluasi kinerja dan program, dalam musyawarah kerja cabang ini juga membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan musyawarah cabang dan masalah-masalah penting lainnya. Sejalan dengan musyawarah sebagaimana mestinya pada musyawarah kerja cabang DPC diwajibkan untuk melibatkan anggotanya, utusan dari DPAC yang ditunjuk langsung oleh DPC, serta badan dan lembaga partai di tingkat lokal.

Bertolak dari penjelasan mengenai AD/ART PKB tentang permusyawaratan pada paragraf diatas, penulis mendapati sebuah temuan menarik dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap narasumber dilapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan AD/ART

PKB khususnya BAB permusyawaratan diinternal DPC PKB Kabupaten Cirebon. Temuan penulis tersebut adalah adanya kesesuaian antara BAB permusyawaratan yang terdapat di AD/ART PKB dengan pelaksanaan proses pembuatan sebuah aturan atau bahkan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh partai. Hal ini dapat dilihat dari prosesnya, dimana internal PKB Kabupaten Cirebon selalu mengedepankan seluruh aspek-aspek musyawarah atau diskusi dengan dipimpin oleh ketua DPC dan didampingi oleh Dewan Syura'. Sehingga, secara tidak langsung melalui mekanisme musyawarah tersebut akan menciptakan ekosistem demokrasi internal partai yang cukup baik, dimana baik pengurus maupun anggotanya memiliki hak dan suara yang sama di dalam partai tersebut.

Dalam pelaksanaan musyawarah atau diskusi diinternal DPC PKB Kabupaten Cirebon melalui pengamatan penulis musyawarah cukup sering dilaksanakan. Untuk itu, dalam menjelaskan musyawarah di internal PKB Kabupaten Cirebon penulis membagi kegiatan tersebut menjadi dua indikator yang berdasarkan pada kebutuhan partai. Dua indikator musyawarah tersebut meliputi *pertama* musyawarah internal partai yang bersifat tidak urgen seperti misalnya pembuatan kegiatan partai baik yang bersifat sosial maupun non sosial, mengevaluasi kegiatan tersebut dan sejenisnya. *Kedua* indikator musyawarah internal yang bersifat urgen seperti misalnya pergantian ketua partai, pembuatan program kerja partai untuk kedepannya, pembuatan kebijakan yang sangat diperlukan sesegera mungkin, hingga pelaksanaan rapat evaluasi kerja yang wajib melibatkan kepengurusan pada tingkat bawahnya yakni DPAC Kabupaten Cirebon. Kegiatan-kegiatan musyawarah tersebut merupakan bagian dari penerapan Musyawarah Cabang (MUSCAB), Musyawarah Kerja Cabang (MUKERCAB), dan Musyawarah Pimpinan Cabang yang merupakan agenda wajib DPC Kabupaten Cirebon dan juga tercantum didalam AD/ART PKB tahun 2019.

Kemudian dalam menjaga terjaminnya roda demokrasi berjalan diinternal PKB Kabupaten Cirebon sebagaimana mestinya terdapat berbagai jenis-jenis musyawarah lainnya yang diimplementasikan dalam setiap kegiatannya. Jenis musyawarah yang dilaksanakan ini meliputi; musyawarah bulanan partai, musyawarah triwulan partai, hingga musyawarah enam bulanan partai. Kegiatan musyawarah yang diusung oleh ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon ini dilakukan sebagai wadah untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, sedang berjalan atau bahkan hal-hal urgen sekalipun bisa dilakukan didalam musyawarah ini. Walaupun secara teknis pembuatan keputusan terkait kebijakan-kebijakan yang bersifat urgen bisa dan diperbolehkan dilakukan musyawarah secara langsung diinternal pimpinan DPC PKB Kabupaten Cirebon. Selain sebagai bahan evaluasi jenis-jenis musyawarah ini juga oleh DPC

PKB Kabupaten Cirebon biasanya digunakan sebagai penyerapan aspirasi masyarakat serta menentukan panitia-panitia pelaksanaa dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh partai PKB Kabupaten Cirebon.

Gambar 4. 1 Musyawarah di Internal PKB Sebagai Bentuk Dari Demokrasi Internal Partai



Sumber; Inijabar.com (diakses, 20/02/2023)

Keterangan: Gambar kiri pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kerja Cabang (MUKERCAB) DPC PKB Kabupaten Cirebon sedangkan gambar sebelah kanan merupakan pelaksanaan kegiatan dialog interaktif dengan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Berkaitan dengan partisipasi element pendukung pada pelaksanaan musyawarah, DPC PKB Kabupaten Cirebon juga selalu berusaha untuk menghadirkan seluruh aspek penting yang dibutuhkan baik dari kepengurusan partai maupun masyarakat setempat. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Hasan Basori ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon saat melakukan wawancara dengan penulis. Hasan menyampaikan bahwasanya terkait proses pembuatan kebijakan diinternal DPC PKB Kabupaten Cirebon seluruhnya melalui musyawarah termasuk kebijakan-kebijakan yang bersifat urgen sekalipun. Dalam prosesnya jika pembuatan kebijakan tersebut bersifat internal partai maka pihak yang turut dilibatkan dalam musyawarah meliputi DPW, DPP, DPC, Dewan Syura' hingga seluruh Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Cirebon. Sementara itu, jika sifatnya berkaitan dengan kondisi eksternal partai maka seluruh aspek dilibatkan termasuk tokoh-tokoh masyarakat setempat. Tujuan dari dilibatkannya tokoh-tokoh masyarakat tersebut menurut Hasan adalah sebagai bagian dari penyampaian informasi yang berkembang di lapangan.

“Dalam proses pembuatan keputusan politik kita memiliki mekanismenya sendiri yah, misalkan tentang kebijakan politik (diinternal) ya tentu kami selalu lapornya lebih kepada DPW, DPP, dan kepada Dewan Syura' kita melalui musyawarah untuk menghasilkan keputusan-keputusan terbaik, (disamping itu) tentu keputusan tersebut diambil tidak serta merta tidak melihat kondisi eksternal karena bagaimanapun kondisi eksternal itu menjadi bagian dari indikator penting

didalam unsur pembuatan keputusan misalkan dalam menentukan calon atau dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan eksternal maka kita mengundang tokoh-tokoh luar sebagai bagian dari penyampaian informasi dan pendapat” (Wawancara dengan Hasan Basori Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, 4 Januari 2023).

Diikutsertakannya seluruh jajaran fraksi PKB yang terdapat di DPRD Kabupaten Cirebon dalam musyawarah merupakan salah satu cara ampuh yang digunakan oleh DPC PKBKabupaten Cirebon dalam menyerap aspirasi yang muncul di lapangan. Karena selain fraksi merupakan bagian penting dari DPC PKB Kabupaten Cirebon, posisi fraksi juga berada dibawah komando DPC PKB Kabupaten Cirebon yang secara otomatis perintah dari atasan harus dituruti atau paling tidak dikonsultasikan. Kemudian jika dilihat dari kegiatannya fraksi juga merupakan aktor yang mempengaruhi kondisi perpolitikan daerah serta aktor yang memiliki peranan terlibat langsung dengan masyarakat. Sehingga, keterlibatan fraksi dalam pengambilan keputusan di tubuh DPC PKB Kabupaten Cirebon sangat diperlukan. Disamping itu, menurut Hasan Basori ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam wawancaranya dengan penulis menyebutkan fraksi juga memiliki kualitas dan kuantitas dari segi financial yang mana sangat dibutuhkan oleh DPC PKB kabupaten Cirebon.

Keterlibatan seluruh fraksi PKB di DPRD Kabupaten Cirebon dalam kegiatan musyawarah juga diperjelas dan dikonfirmasi oleh Waswin Janata yang merupakan Sekertaris DPC PKB Kabupaten Cirebon. Waswin menegaskan pada prosesnya walaupun anggota fraksi PKB di DPRD Kabupaten Cirebon memiliki mekanisme-mekanismenya sendiri dalam menyikapi keputusan yang telah di bahas oleh internal DPC. Mereka selalu diundang untuk turut mengambil bagian dalam seluruh kegiatan musyawarah, karena bagaimanapun fraksi merupakan kepanjangan tangan dari DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam menyejahterakan masyarakat.

“Ya tentu kita undang, karena fraksi itu biasanya kalau berkaitan dengan keputusan politik kita libatkan mereka, kebetulan temen-temen anggota faksi itu juga sebagai anggota pengurus DPC jadi biasanya mereka terlibat. Kemudian (dalam pengambilan keputusan) mereka biasanya rapat sendiri juga dimana pada prosesnya hasil keputusan dari DPC kemudian ditindak lanjuti oleh faksi PKB menjadi bahasan dalam rapat internal mereka, karena pada prinsipnya faksi PKB itu alat kepanjangan tangan dari DPC PKB Kabupaten Cirebon” (Wawancara dengan Waswin Janata Sekertaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, 11 Januari 2023).

Dari penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan agenda penting yang harus dilaksanakan oleh internal DPC PKB Kabupaten Cirebon agar keberlanmgusngan demokrasi dalam proses pembuatan keputusan partai berjalan sesuai dengan

AD/ART yang berlaku. Walaupun sudah disadari secara betul dalam prosesnya pembuatan kebijakan di DPC Kabupaten Cirebon melalui musyawarah, tetapi harus diakui kecenderungan peran dominan DPP PKB dalam pengambilan keputusan dari hasil musyawarah tersebut masih mengganjal. Hal ini dikarenakan pada beberapa kebijakan strategis yang sudah melalui proses musyawarah di tingkat DPC harus melewati tahap konsultasi terlebih dahulu ke level yang lebih tinggi. Pembahasan lebih lanjut mengenai proses pengambilan keputusan di DPC PKB kabupaten Cirebon akan dijelaskan lebih terperinci pada sub bab derajat otonomi.

4. Proses Kaderisasi dan Pemilihan Ketua Partai

Sebagai partai politik, PKB berkewajiban untuk menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mengembangkan kepemimpinan yang bisa diabadikan bagi kepentingan organisasi maupun kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, guna menciptakan organisasi yang demikian maka PKB perlu terlebih dahulu untuk menciptakan kader-kader dan kepengurusan yang profesional, solid dan loyal terhadap partai dalam menopang perjalanan karir perpolitikan PKB di Indonesia. Proses terciptanya kader-kader PKB baik di tingkat DPP, DPW, DPC, DPAC, DPRt hingga DPARt yang profesional, solid, dan loyal tersebut bermula dari rekrutmen kaderisasi yang sistematis dan berkesinambungan. Dilihat dari posisinya rekrutmen politik merupakan jantung kehidupan partai politik yang memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Sebab, proses ini memiliki keterkaitan dengan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Rekrutmen politik secara khusus sering merujuk pada seleksi kandidat (kandidasi), rekrutmen legislatif dan eksekutif (Lewis-Beck & Chlarson, 2002, hal. 489-512).

DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam kaderisasi mengekalim bahwa mereka merupakan partai yang terbuka untuk warga negara indonesia siapa saja tanpa melihat agama, suku, gender dan lain sebagainya. Yang terpenting jika seseorang ingin menjadi kader PKB mereka diwajibkan untuk taat dan patuh kepada peraturan-peraturan PKB dan tentunya harus ikut serta dalam seluruh kegiatan politik diinternalnya. Dalam pelaksanaan perekrutan kaderisasi di DPC PKB Kabupaten Cirebon nampak adanya kesesuaian sistem kaderisasi sebagaimana yang tertulis di AD/ART dengan kenyataan praktik kaderisasi dilapangan. Dijelaskan di dalam AD/ART PKB tahun 2019 khususnya BAB XII (sistem kaderisasi), tertulis dalam pasal 89 ayat 2 dan 4 tentang kaderisasi partai bahwa sumber kader partai di PKB diperoleh melalui pendidikan politik yang berjenjang dimulai dari tingkatan DPC hingga tingkatan DPP.

Pendidikan politik ini merupakan wadah bagi seluruh kader PKB yang telah terdaftar di DPAC dan DPRt yang ingin mendapatkan promosi kepengurusan yang lebih tinggi, jabatan yang lebih strategi di internal partai, jabatan politik ataupun ingin mendapatkan jabatan publik.

Lebih lanjut sesuai dengan AD/ART PKB tahun 2019 terdapat tiga jenjang mekanisme pendidikan politik yang harus dilalui oleh seluruh kader PKB hingga mampu mendapatkan jabatan strategi di kepengurusan atau jabatan politik ditingkatan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan bangsa (DPP PKB). Ketiga jenjang tersebut meliputi; *pertama* kaderisasi tingkat loyalis yang merupakan pendidikan politik sekaligus perekrutan kader-kader di tingkat DPC, *kedua* kaderisasi tingkat penggerak merupakan pendidikan politik sekaligus perekrutan kader-kader ditingkat DPW, dan *ketiga* kaderisasi tingkat pelopor merupakan pendidikan politik sekaligus perekrutan kader-kader untuk tingkat DPP. Sementara itu, berdasarkan pengamatan penulis mengenai AD/ART PKB tahun 2019 tersebut masih terdapat kekurangan dalam menjelaskan sistem kaderisasi yang berjenjang di PKB. Dimana AD/ART tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai kurikulum yang digunakan oleh partai PKB dalam melaksanakan pendidikan politik serta tidak adanya divisi khusus yang menaungi kaderisasi. Sehingga, dapat dikatakan sistematika kaderisasi yang telah ada di AD/ART PKB pun masih belum bisa dikatakan tersusun dengan rapih.

Terlepas dari itu semua, fakta dilapangan penulis menemukan bahwasanya sistem kaderisasi yang tertulis didalam dokumen AD/ART sudah tercermin di pelaksanaan perekrutan kaderisasi pada internal DPC PKB Kabupaten Cirebon. Hal ini terlihat dimana ada tiga jenis mekanisme yang digunakan oleh DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam menjangking kader-kader yang loyal dan profesional untuk tingkat DPC, salah satunya adalah melalui pendidikan politik. DPC PKB Kabupaten Cirebon melaksanakan pendidikan politik dengan tujuan sebagai wadah promosi kepengurusan bagi seluruh kader di tingkat DPAC dan DPRt untuk menjadi bagian dari kepengurusan di tingkat DPC. Dilihat dari prosesnya, sebelum kader dibekali melalui pendidikan politik, perekrutan bibit-bibit kader di DPC PKB Kabupaten Cirebon terlebih dahulu dimulai dari tingkat yang paling bawah yakni perekrutan kader melalui DPAC dan DPRt, dimana dua anak tangan dari DPC ini dipercaya untuk merekrut bibit-bibit kader PKB. Kemudian setelah DPAC dan DPRt mendapatkan bibit-bibit kader tersebut DPC PKB Kabupaten Cirebon akan mengadakan pendidikan politik sebagai tempat penyeleksian bibit-bibit kader tersebut.

Gambar 4. 2 Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Proses Perekrutan Kader Loyal Di DPC PKB Kabupaten Cirebon



Sumber; Timesindonesia.co.id (diakses, 01/03/2023)

Keterangan: Gambar kanan merupakan sambutan ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon Hasan Basori pada saat pembukaan pendidikan politik kader loyal bagi kader-kader PKB Kabupaten Cirebon sedangkan gambar sebelah kiri merupakan peserta kegiatan pendidikan politik yang berjumlah 200 orang dan merupakan ketua DPAC dan DPART atau pengurus PKB dibawah DPC di seluruh Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, walaupun secara teknis pendidikan politik berhasil dilaksanakan dengan baik oleh DPC PKB Kabupaten Cirebon, namun tidak bisa dipungkiri permasalahan pendanaan nampaknya masih mengganjal dalam pelaksanaan pendidikan politik. Kondisi keuangan yang serba terbatas bagi DPC PKB Kabupaten Cirebon mengakibatkan adanya pemberlakuan pembatasan partisipan yang ikut dalam pendidikan politik. Dimana DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan pendidikan politik hanya menyediakan beberapa kuota saja dimana kouta tersebut akan diisi oleh ketua DPAC, pengurus-pengurus dari DPART serta beberapa kader-kader di internal DPC juga. Dengan adanya kuota tersebut menjadikan beberapa pengurus baik DPAC ataupun DPART akan ada yang tidak diikutsertakan dalam pendidikan politik, dimana jika dilihat dari totalnya di Kabupaten Cirebon terdapat 40 DPAC sedangkan DPART kurang lebih ada 424 cabang. Dengan hanya memberikan beberapa kuota saja tentunya akan memiliki efek pada sedikitnya jumlah kader-kader yang masuk atau naik jabatan menjadi pengurus di tingkat DPC.

Untuk itu, dalam meningkatkan jumlah kader di internal DPC PKB Kabupaten Cirebon mereka melakukan inovasi yakni perekrutan kader melalui pemanfaatan momentum elektoral yang biasa disebut dengan perekrutan Bacaleg (Bakal Calon Legislatif) PKB dan perekrutan kader-kader secara sukarela yang datang langsung tanpa paksaan ke kantor DPC Kabupaten Cirebon. Dua mekanisme ini disampaikan oleh Muhammad Luthvi mantan ketua DPC PKB

Kabupaten Cirebon Periode 2014-2019 yang sekarang menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Cirebon saat dilakukan wawancara dengan penulis. Dimana Luthvi menyampaikan pada dasarnya secara normatif seluruh kader-kader yang ingin naik jabatan maka terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan kaderisasi atau pendidikan politik. Namun karena DPC PKB Kabupaten Cirebon memiliki permasalahan pendanaan maka terdapat mekanisme lain yang digunakan oleh DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam merekrut kader-kadernya, yakni dengan membuka selebar-lebarnya rekrutmen bagi siapa saja warga negara Indonesia yang ingin bergabung dengan PKB dan perekrutan kader dengan memanfaatkan momentum elektoral.

“Untuk perekrutan terlebih dahulu kita percayakan kepada PAC untuk merekrut ranting-ranting ataupun anak ranting. Kemudian untuk step selanjutnya, karena ini partai politik kita punya kengkaderan yaitu; pelatihan kader loyalis atau pelatihan partai lah (gampangnya), nah kemudian dari situ untuk bisa menjadi anggota partai di DPC PKB kalau secara normatif harus mengikuti pelatihan kaderisasi, tetapi dalam prakteknya seluruh masyarakat yang ingin ikut gabung ke PKB kita terima tinggal mengirim KTP dan kesiapan untuk mengisi kesediaan. Kemudian untuk yang pelatihan karena keterbatasan anggaran kita batasi untuk pimpinan PAC dan (beberapa) anak ranting untuk bisa menjadi bagian” (Wawancara Muhammad Luthvi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, 24 Januari 2023).

Kedua perekrutan yang digunakan oleh DPC tersebut memiliki mekanisme yang berbeda dimana perekrutan melalui momentum elektoral atau bakal calon legislatif (Bacaleg) memiliki mekanismenya sendiri dan terdapat tahapan yang harus dilewati oleh seseorang jika ingin menjadi kader PKB melalui jalur Bacaleg. Kurang lebih terdapat sembilan tahapan yang harus dilewati oleh kandidat Bacaleg dalam menjadi bagian dari partai PKB, yakni pertama tahapan pendaftaran bacaleg, kedua tahapan seleksi administrasi, ketiga tahapan uji kelayakan, keempat, tahapan uji publik, kelima tahapan pembekalan, keenam tahapan sosialisasi dan konsolidasi, ketujuh tahapan evaluasi dan monitoring, kedelapan tahapan penetapan daftar caleg serentak, dan kesembilan merupakan tahapan pendampingan bacaleg *“(wawancara dengan salah satu pengurus DPC PKB Kabupaten Cirebon periode 2014-2019)”*. Setelah kandidat melewati semua proses dan terpilih maka bacaleg tersebut akan secara resmi mewakili PKB dalam ranah pemilihan elektoral. Sementara itu, dalam perekrutan kader melalui kesadaran pribadi yang ingin mengabdikan untuk negara melalui PKB tidak akan ada step by step yang harus dilewati kecuali pengumpulan KTP dan mengisi kesiapan untuk mengikuti seluruh kegiatan PKB dan patuh terhadap AD/ART partai. Namun, karena PKB merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama' maka segala proses rekrutmen di PKB akan lebih memprioritaskan warga Nahdliyin untuk masuk ke dalam tubuh DPC dibanding non Nahdliyin. Walaupun banyak elit PKB yang menyebutkan bahwa PKB merupakan partai yang terbuka untuk siapa saja.

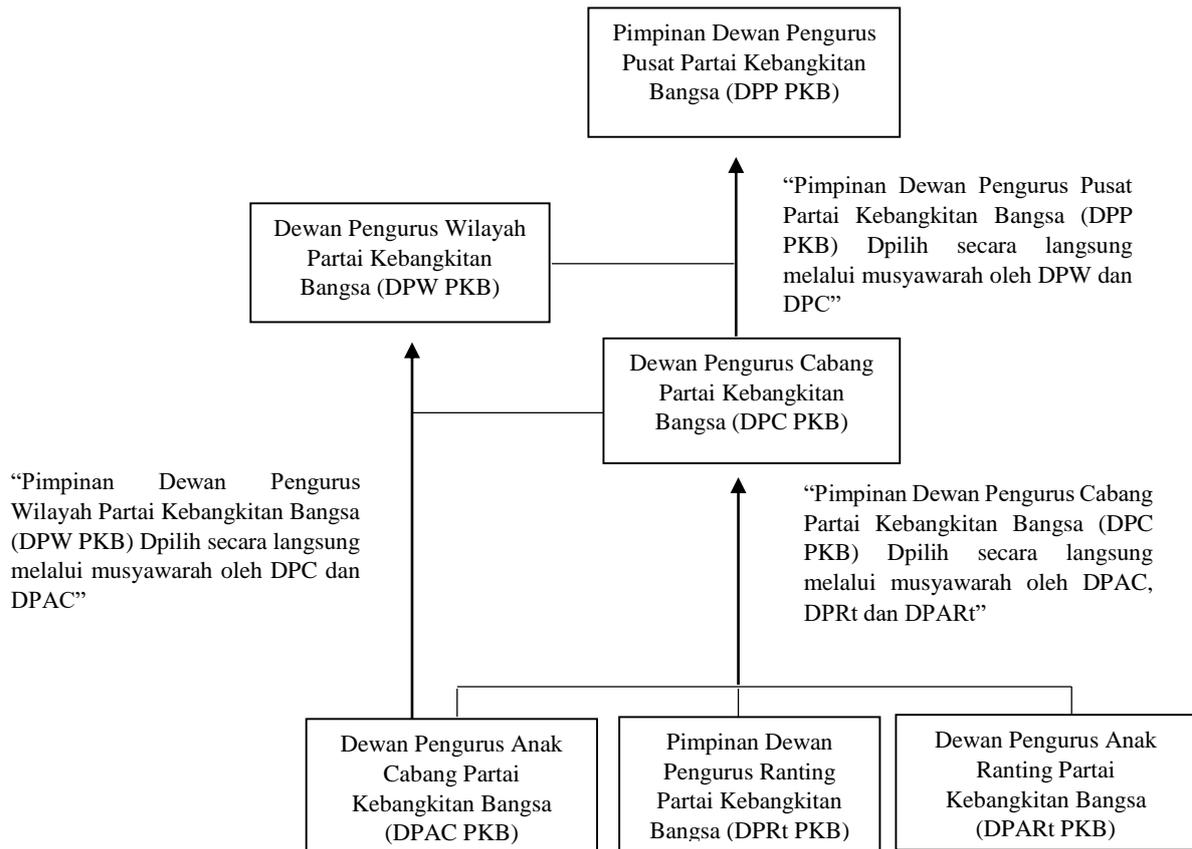
“Kita kan di DPC sebenarnya sudah memiliki kader puluhan ribu dimana sumber dari sekian ribu ini berasal dari jejaring yang sudah kita memiliki, apalagi PKB dengan NU punya hubungan baik dan saling sinergi berdasarkan kesinergian PKB dengan NU itu PKB tidak pernah kekurangan kader” (Wawancara dengan salah satu pengurus DPC PKB Kabupaten Cirebon periode 2014-2019, 24 Januari 2023).

Selanjutnya, berbicara mengenai proses penentuan ketua di tubuh DPC PKB Kabupaten Cirebon secara khusus dan penentuan pimpinan di tubuh PKB secara umumnya melalui wawancara penulis dengan informan dan pengamatan terhadap dokumen AD/ART PKB pada tahun 2014 dan 2019 mendapati bahwa, terdapat perubahan pemilihan ketua ditingkat DPC dan DPW pada saat sebelum dan sesudah mukhtamar PKB pada tahun 2019. Perbedaan tersebut sangat jelas terlihat dimana untuk posisi ketua di tingkat Dewan Pengurus Wilayah PKB (DPW PKB) dan Dewan Pengurus Cabang PKB (DPC PKB) sebelum dilaksanakan mukhtamar 2019 keduanya dipilih secara langsung oleh para voter yang mewakili kepengurusan dibawah mereka. Sementara itu pasca dilakukan mukhtamar tahun 2019 terdapat perubahan dimana muncul sistem “Satu Komando” didalam tubuh PKB yang mengakibatkan seluruh pergantian pimpinan dilakukan dengan ditunjuk langsung oleh ketua Dewan Pengurus Pusat PKB (DPP PKB) dalam hal ini Muhaimin Iskandar selaku ketua DPP PKB. penunjukan tersebut tidak serta merta hanya menunjuk pada orang yang kenal beliau atau dekat dengan beliau, namun ada mekanismenya sendiri sebelum menunjuk seseorang untuk menjalankan kepengurusan ditingkat lokal. Salah satunya adalah ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan Dewan Syura’ terkait seseorang yang diajukan untuk memimpin kepengurusan di tingkat lokal.

Lebih lanjut pada prosesnya saat sebelum dilaksanakannya Mukhtamar tahun 2019 penentuan ketua atau pimpinan diinternal PKB seluruhnya melalui proses pemilihan atau voting yang melibatkan organisasi PKB ditingkat bawah. Dimana, untuk tingkat Dewan Pengurus Pusat PKB (DPP PKB) proses pemilihan pemimpin ditentukan oleh voter yang melibatkan organisasi ditingkat Dewan Pengurus Wilayah PKB (DPW PKB) dan Dewan Pengurus Cabang PKB (DPC PKB). Sementara itu, untuk tingkat Dewan Pengurus Wilayah PKB (DPW) proses pemilihan ketua partai ditentukan oleh Dewan Pengurus Cabang PKB (DPC PKB) dan Dewan Pengurus Anak Cabang PKB (DPAC PKB). Dimana secara posisi baik DPC maupun DPAC berada dibawah DPW yang mengakibatkan kedua kepengurusan partai ditingkat lokal ini sebagai voter untuk memilih pimpinan di tubuh DPW. Ditingkat Dewan Pengurus Cabang PKB (DPC PKB) proses pemilihan ketua partainya melibatkan tiga tingkatan dimana terdapat Dewan Pengurus Anak Cabang PKB (DPAC PKB) yang merupakan

kepengurusan partai PKB di tingkat kecamatan, Dewan Pengurus Ranting PKB (DPRt PKB) yang merupakan kepengurusan di tingkat desa/kelurahan, dan Dewan Pengurus Anak Ranting PKB (DPARt PKB) dimana kepengurusan ditingkat ini memegang kekuasaan untuk tingkat dusun sampat RT/RW. Penjelasan diatas jika diilustrasikan dalam sebuah gambar maka akan nampak seperti dibawah ini;

Gambar 4. 3 Proses Pemilihan Pimpinan di PKB Sebelum Mukhatamar 2019

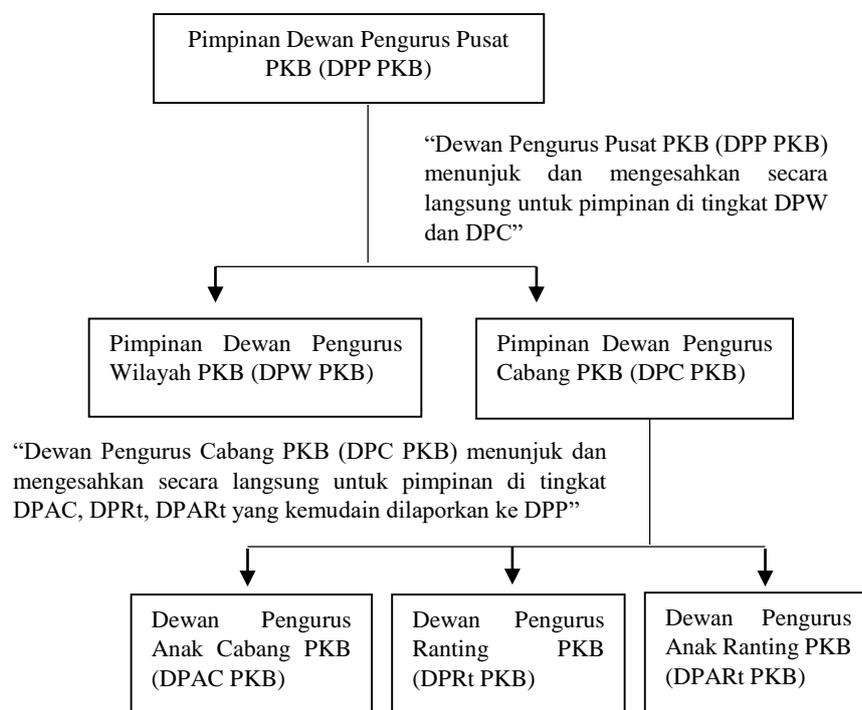


Sumber; Analisis Data Primer oleh Penulis

Dari gambar diatas dapat dikatakan proses penentuan pimpinan kepengurusan diinternal PKB seluruhnya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan yang melibatkan voter dari kepengurusan dibawahnya. Namun, hal lain yang berkaitan dengan penentuan pemimpin kepengurusan di PKB justru terjadi pasca mukhtamar PKB tahun 2019. Seperti yang sudah disinggung sedikit diatas pasca dilakukannya mukhtamar 2019 di Nusa Dua Bali memunculkan sebuah sistem baru diinternal PKB dalam melaksanakan perpolitikannya. Sistem ini menggerakkan hampir seluruh aspek perpolitikan diinternal PKB salah satunya adalah dalam memilih pemimpin kepengurusan di ranah lokal. Dengan adanya sistem satu komando yang muncul di internal PKB mengakibatkan posisi ketua DPP PKB memiliki peran yang sangat

kuat sekali dalam menjalankan roda perpolitian partai PKB. Kuatnya ketua DPP PKB dalam menentukan arah perpolitikan-pun sangat terasa dalam proses penentuan pimpinan kepengurusan di ranah lokal. Dimana pasca dilakukannya mukhtamar 2019 penentuan pemimpin kepengurusan di internal PKB baik di ranah DPW dan DPC seluruhnya dilakukan dengan cara ditujuk secara langsung oleh DPP. Sementara itu untuk ditingkat DPAC, DPRt, dan DPART pimpinan kepengurusannya ditujuk secara langsung oleh DPC dimana hasil dari penujukannya tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan DPP PKB. untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar dibawah ini;

Gambar 4. 4 Proses Pemilihan Pimpinan di PKB Sesudah Mukhtamar 2019



Sumber; Analisis Data Primer oleh Penulis

Temuan penulis terkait perubahan pemilihan pimpinan kepengurusan partai di tingkat lokal ini diperkuat kembali oleh hasil wawancara penulis dengan Hasan Basori selaku ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon. Hasan membenarkan bahwasanya terdapat perubahan dalam menentukan pimpinan di tingkat DPW dan DPC pasca mukhtamar 2019. Menurut Hasan perubahan pemilihan pimpinan partai itu bahkan cenderung lebih kearah instruksional dari DPP PKB. Dimana mekanisme yang digunakan oleh internal DPP PKB adalah melakukan musyawarah dengan memprtimbangkan kualitas dan kuantitas yang ada disetiap individu kader-kadernya untuk menghasilkan pimpinan yang bagus. Kemudian hasil daripada diskusi internal DPP PKB tersebut akan sampaikan di Musyawarah Cabang (MUSCAB) dengan DPP

PKB akan mengumumkan siapa yang menjadi pengganti atau ketua partai ditingkat DPW dan DPC

“Hasil dari Mukhtamar 2019 (pimpinan) untuk tingkat DPW dan DPC ditunjuk secara langsung oleh DPP dalam hal ini melalui musyawarah internal di DPP PKB, dulu memang sebelum dilaksanakannya mukhtamar 2019 kita (DPC PKB) melakukan pemilihan ditingkat PAC untuk memilih ketua DPC, tetapi setelah adanya Mukhtamar 2019 tersebut cenderung lebih ke arah instruksional artinya pemilihan ketua DPW dan DPC merupakan hasil musyawarah internal DPP yang mempertimbangkan kualitas dan kuantitas di setiap individu” (Wawancara dengan Hasan Basori Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, 4 Januari 2023).

Dengan adanya perubahan dalam memilih pimpinan partai untuk tingkat DPW dan DPC berimbas pada kondisi internal DPC PKB Kabupaten Cirebon yang kurang baik. Hal ini dikarenakan pasca kemenangannya di pemilihan legislatif Kabupaten Cirebon tahun 2019, DPC PKB Kabupaten Cirebon langsung diterpa dengan isu-isu yang kurang baik di internalnya. Isu-isu tersebut muncul akibat adanya pergantian ketua DPC yang sangat mengejutkan, dimana pada tahun 2019 Hasan Basori ditunjuk secara langsung oleh DPP PKB melalui MUSCAB untuk menjadi ketua menggantikan Muhammad Luthvi dalam memimpin kepengurusan di DPC PKB Kabupaten Cirebon. Efek dengan adanya pergantian tersebut mengakibatkan munculnya isu bahwasanya didalam internal PKB Kabupaten Cirebon sedang tidak baik-baik saja, karena terdapat dua kubu yang bersitegang setelah terjadi pergantian tersebut. Penjelasan mengenai munculnya dua kubu atau faksionalisme didalam internal DPC PKB Kabupaten Cirebon akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

5. Faksionalisme di Dalam Partai

Melanjuti yang sudah disinggung sedikit mengenai faksionalisme di dalam internal DPC PKB Kabupaten Cirebon pada bagian akhir di pembahasan sebelumnya. Hasil temuan penulis dari pengamatan dan beberapa wawancara yang telah dilakukan berkaitan hal ini, menemukan bahwa dari segi faksionalisme diinternal DPC PKB Kabupaten Cirebon relatif terkendali dengan sangat baik. Sehingga, meskipun terkadang muncul faksi-faksi di dalam partai, namun munculnya faksi tersebut tidak berkepanjangan dan sampai mengganggu keutuhan PKB di Kabupaten Cirebon. Kemunculan faksi-faksi tersebut biasanya dikarenakan adanya kekecewaan terhadap kebijakan partai yang senantiasa ditanggapi oleh kader-kader PKB Kabupaten Cirebon sebagai dinamika perpolitikan. Seperti misalnya, pada awal tahun 2021 DPC PKB Kabupaten Cirebon melakukan pergantian ketua yang dilakukan secara mengejutkan pasca kemenangannya di legislatif Kabupaten Cirebon tahun 2019, akibat dari adanya pergantian tersebut munculkan stigma adanya perpecahan antara Mohamad Luthvi

(ketu lama) dengan Hasan Basori (ketua pengganti) di internal DPC PKB Kabupaten Cirebon. Munculnya stigma perpecahan tersebut tidak lepas dari adanya kader-kader yang pro maupun kader yang kontra terhadap pergantian ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon. Kader-kader senior PKB Kabupaten Cirebon yang cenderung lebih condong mendukung luthvi menginginkan agar Hasan Basori mundur dari pimpinan DPC. Hal ini dikarenakan, menurutnya gaya kepemimpinan Hasan Basori dinilai tidak layak, karena masih banyaknya permasalahan internal PKB Kabupaten Cirebon yang belum terselesaikan salah satunya adalah transparansi pengelolaan anggaran DPC PKB Kabupaten Cirebon (*fajarcirebon.com, 17 Maret 2023*).

Namun, walaupun dalam pergantian ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon tersebut menuai banyak sekali dinamika pro dan kontra dari berbagai kalangan. Temuan penulis terkait hal ini, terlepas dari adanya pro dan kontra dilapangan justru kondisi internal DPC PKB Kabupaten Cirebon hingga saat ini masih kondusif tidak sampai menuju pada arah perpecahan partai. Keadaan kondusif tersebut terjadi dikarenakan DPC PKB Kabupaten Cirebon memiliki mekanisme yang diimplementasikan dengan sangat bagus dalam mengendalikan faksionalisme didalam partai. Terdapat dua cara yang biasanya digunakan oleh DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam meredam perpecahan didalam partai, seperti yang dikemukakan oleh Mohamad Luthvi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dalam wawancaranya dengan penulis seperti berikut:

“Kita (DPC PKB Kabupaten Cirebon) dalam menjaga keutuhan organisasi atau kader-kader kita adalah dengan seing melaksanakan dialog antar kader dan bisanya dialog ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk bisa dilaksanakan pada saat pelatihan kader, atau dialog dilaksanakan pada saat musyawarah. Selain itu, cara lain PKB (dalam menjaga suasana kondusif internalnya) adalah dengan melibatkan anggota dalam setiap pengambilan keputusan. (hal ini dilakukan) tujuannya agar antara anggota dan pengurus adanya komunikasi yang berkelanjutan, karena perpecahan itu terjadi biasanya kalau kurangnya komunikasi”. (Wawancara Mohamad Luthvi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, 24 Januari 2023).

Mekanisme atau cara yang digunakan oleh partai PKB Kabupaten Cirebon dalam menghindari adanya perpecahan didalam internalnya adalah dengan melakukan dialog secara langsung dan terbuka dengan seluruh kader-kader yang pro dan kontra terhadap kebijakan partai. Hal ini dilakukan agar, baik kader-kader yang pro maupun kontra diinternal DPC PKB Kabupaten Cirebon mendapatkan jalan tengah atau solusi untuk permasalahan yang sedang mencuat di publik. Dialog secara langsung ini bisanya dilakukan berbarengan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan seperti misalnya dialog dilaksanakan pada saat pelatihan kader atau pada saat musyawarah. Kemudian disamping pengendalian faksionalisme dengan cara dialog

secara langsung terdapat cara kedua yang biasanya digunakan oleh DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam meredam munculnya perpecahan diinternalnya, cara yang dilakukan oleh PKB Kabupaten Cirebon adalah dengan melibatkan anggota-anggotanya dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan. Kedua cara tersebut merupakan bentuk-bentuk dari komunikasi yang lebih intim dan berkelanjutan antara pengurus partai dan para kadernya. Tujuan dari hal itu adalah agar baik anggota maupun pengurus memiliki komunikasi yang baik dan berkelanjutan, karena menurut beliau perpecahan diinternal partai muncul akibat adanya kondisi komunikasi yang kurang baik.

4.2 DERAJAT IDENTITAS NILAI (*Value Infusion*)

Konsep derajat identitas nilai yang dijelaskan oleh Vicky Randall dan Larsan Svansand ialah identitas partai politik yang didasarkan pada ideologi atau platform partai politik yang berkaitan dengan basis sosial pendukungnya dan identifikasi kader terhadap pola serta arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. Dalam melihat suatu partai politik dapat dikatakan sudah terlembaga dengan baik dari derajat identitas nilai, apabila partai tersebut telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat (basis sosial) sebagai pendukung loyal terhadap partai politik. Untuk itu, dalam melihat partai PKB Kabupaten Cirebon apakah sudah terlembaga dari derajat identitas nilai penulis membagi penjelasan ini berdasarkan dua sub pembahasan, yang sebagai berikut;

1. Basis Dukungan Partai

DPC PKB Kabupaten Cirebon sebagai sebuah partai yang sudah berkiprah lebih dari cukup di perpolitikan Indonesia, memiliki organisasi-organisasi yang bisa dibilang mencukupi dalam membangun sebuah basis dukungan partai PKB di Kabupaten Cirebon. Organisasi yang menjadi basis pendukung PKB di Kabupaten Cirebon meliputi organisasi-organisasi yang dibentuk oleh partai secara langsung maupun organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi kepada partai PKB Kabupaten Cirebon. Banyaknya organisasi-organisasi yang PKB Kabupaten Cirebon rajut dengan tujuan sebagai basis dukungannya akan beimbis pada meningkatnya jumlah dukungan yang diterima oleh PKB pada pemilihan umum dan juga bisa jadi akan lebih mempermudah PKB Kabupaten Cirebon dalam merekrut kader-kadernya.

Disamping itu, dengan basis dukungan PKB Kabupaten Cirebon yang bersumber dari organisasi bentukan internal maupun organisasi eksternal yang telah berafiliasi mendukung partai, cenderung akan lebih mudah juga dalam menanamkan ideologi PKB kepada organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan internal dari organisasinya sendiri sudah memiliki

minat terhadap gaya perpolitikan PKB. Organisasi-organisasi yang dirajut oleh PKB sebagai basis dukungannya di Kabupaten Cirebon meliputi organisasi Garda Bangsa, Perempuan Bangsa, dan organisasi bentukan internal PKB lainnya. Kemudian, PKB Kabupaten Cirebon juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan organisasi-organisasi yang telah berafiliasi kepada partai PKB di Kabupaten Cirebon, seperti misalnya organisasi GP Anshor, organisasi kelompok tani, kelompok nelayan, organisasi kepemudaan (OKP) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Cirebon.

Hubungan antara organisasi-organisasi tersebutpun menurut narasumber yang dilakukan wawancara dengan penulis berjalan dengan sangat baik tanpa adanya kendala apapun yang membuat adanya perpecahan antar kedua belah pihak. Sebab, PKB Kabupaten Cirebon dalam membangun sebuah hubungan yang baik dengan organisasi-organisasi tersebut didasarkan atas kesamaan ideologi, terlebih PKB Kabupaten Cirebon juga selalu melaksanakan diskusi-diskusi yang sifatnya non-formal untuk memperkuat hubungan partai dengan kelompok-kelompok tersebut.

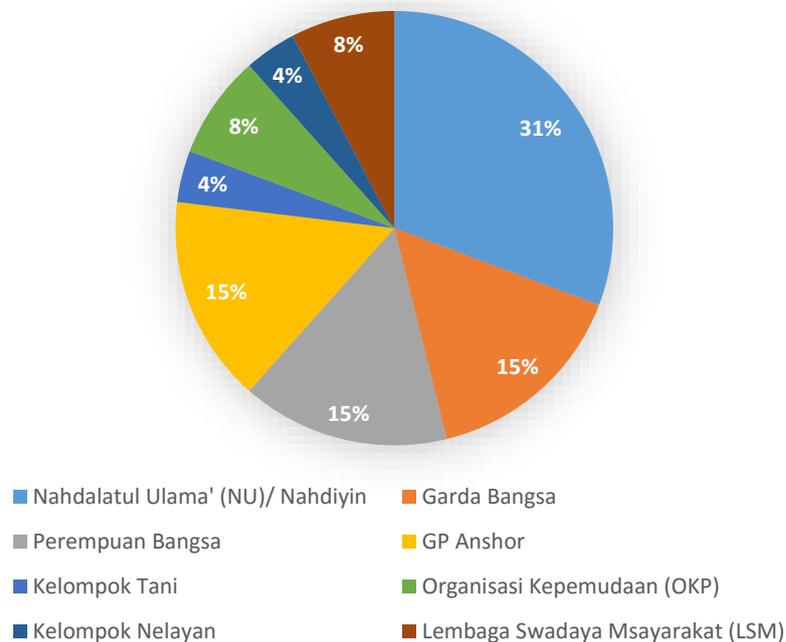
“Ya mas, dalam basis dukungan di Kabupaten Cirebon kita menjalin dan memiliki hubungan baik dengan kelompok populis misalkan Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), GP Anshor, PCNU, Kelompok Petani, Kelompok Nelayan, kemudian banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal Kabupaten Cirebon. (kemudahan) cara PKB dalam membangun hubungan baik dengan kelompok adalah dengan sering melakukan diskusi memang tidak formal yah kadang ditempat ngopi kadang di kantor DPC PKB. Jadi, cara yang kita lakukan dalam membangun hubungan tersebut lebih cenderung soal komunikasi dengan kelompok walaupun di samping itu kita juga sering melakukan kegiatan advokasi” (Wawancara dengan Waswin Janata Sekertaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, 11 Januari 2023).

Disamping memiliki basis dukungan dari organisasi-organisasi baik internal maupun eksternal, tidak bisa dipungkiri bahwa basis dukungan yang begitu dominan mendukung PKB di Kabupaten Cirebon adalah Nahslatul Ulama’ (NU) yang direpresentasikan di Kabupaten Cirebon oleh Pengurus Cabang Nahdalatul Ulama’ (PCNU). Sebab, hal ini dikonfirmasi langsung dari hasil wawancara penulis dengan Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, yang menyebutkan bahwa saat ini karena mayoritas 80% masyarakat di Kabupaten Cirebon merupakan Nahslatul Ulama’ (NU) maka salah satu sumber dukungan PKB di Kabupaten Cirebon berasal dari NU itu sendiri. Hal ini tentu menjadi tidak asing bagi kita mengingat PKB merupakan partai yang memiliki ikatan batin dengan Nahdlatul Ulama’ (NU) dalam sejarah berdirinya partai tersebut.

“Ya, saya pikir salah satu basis dukungan PKB di Kabupaten Cirebon saat ini berasal dari NU, walaupun ada beberapa organisasi yang kita bangun hubungan juga sebagai bagian dari sumber dukungan PKB. lalu kenapa NU (menjadi salah satu basis dukungan PKB) karena Kabupaten Cirebon sendiri merupakan daerah Jawa Barat dimana hampir 80% masyarakatnya (merupakan) nahdiyyin yang memiliki kultural kuat, terlebih PKB juga lahir dari rahim Nahdlatul Ulama’ (NU)” (Wawancara dengan Hasan Basori Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, 4 Januari 2023).

Dari dua penjelasan informan yang digali datanya oleh penulis menunjukkan bahwa dalam membangun sumber dukungan bagi PKB di Kabupaten Cirebon, lebih mengandalkan pada organisasi internal maupun organisasi eksternal yang telah berafiliasi mendukung PKB di Kabupaten Cirebon. Hal ini PKB lakukan karena dengan berafiliasinya organisasi eksternal akan lebih mempermudah PKB Kabupaten Cirebon dalam memberikan pemahaman ideologinya. Sehingga, bukan tidak mungkin mereka akan tertarik dan menjadi pendukung PKB di pemilihan umum. Untuk lebih jelasnya, semua basis dukungan DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam memenangkan kontestasi elektoral di Kabupaten Cirebon penulis gambarkan dengan diagram sebagai berikut:

Gambar 4. 5 Basis Dukungan PKB Di Kabupaten Cirebon



Sumber; Analisis Data Primer

Dengan melihat gambar tersebut dapat kita indikasikan mayoritas basis dukungan eksternal yang dibangun oleh PKB di Kabupaten Cirebon hampir semuanya bernuansa Nahdlatul Ulama’ (NU). Sedangkan, organisasi yang dibangun oleh internal DPC PKB

Kabupaten Cirebon-pun memiliki andil yang sangat besar dalam membangun basis dukungan yang sangat kuat. Sehingga, ketika organisasi bentukan internal dan eksternal digabungkan maka PKB Kabupaten Cirebon akan memiliki basis dukungan begitu banyak terutama warga nahdhiyin. Hal inilah yang kemudian oleh PKB Kabupaten Cirebon dijadikan sebagai strateginya dalam menjalankan mesin politik dengan menyeimbangkan hubungan sosial yang dimilikinya baik yang berasal dari organisasi internal maupun dari organisasi eksternal yang sudah berafiliasi dengan PKB.

2. Baiknya penanaman ideologi partai kepada anggotanya

Dalam proses internalisasi nilai-nilai atau penanaman ideologi kepartaian kepada anggotanya sendiri, DPC PKB Kabupaten Cirebon telah berjalan dengan baik. Hal ini didukung karena adanya pelaksanaan sistem kaderisasi yang bersifat continue/berkelanjutan di dalam tubuh PKB Kabupaten Cirebon. Dengan PKB memiliki sistem kaderisasi yang jelas dan berjenjang memungkinkan untuk dilakukan penanaman ideologi yang dimiliki oleh partai PKB berjalan sangat sistematis dan efisien. Beberapa dari calon kader-kader PKB yang masuk sebagai anggota di tubuh DPC PKB Kabupaten Cirebon pun merupakan hasil dari seleksi melalui sistem kaderisasi yang sistematis tersebut. Sehingga, dari hasil seleksi kaderisasi tersebut akan memunculkan sifat komitmen dari kader-kader untuk mengabdikan kepada partai PKB di Kabupaten Cirebon sangat tinggi. Artinya bahwa kader-kader yang bergabung dalam partai PKB Kabupaten Cirebon merupakan kader-kader yang memiliki kesamaan ideologi, orientasi dan satu visi misi melalui penjurangan dari proses kaderisasi, sehingga akan kecil kemungkinan mereka keluar dari partai dan bergabung dengan partai lain.

Hal ini pun diakui sendiri oleh Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon pada saat dilakukan wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa hubungan yang terjalin antara DPC PKB Kabupaten Cirebon dengan anggotanya sendiri saat ini menurutnya cenderung lebih kearah ideologis dari pada instrumentalis, karena menurut beliau DPC PKB Kabupaten Cirebon ini merupakan partai yang masih memiliki beberapa kekurangan terutama dalam hal pembiayaan dan beliau menambahkan bahwa dari DPC PKB Kabupaten Cirebon menurutnya tidak ada yang bisa diharapkan oleh anggotanya selain berjuang bersama melalui perpolitikan (*wawancara Waswin, 24 Januari 2023*). Karena itu, menurut beliau dengan kondisi yang seperti itu PKB Kabupaten Cirebon dalam membangun hubungan baik dengan konstituen atau anggota sekaligus menanamkan militansi kepada anggota-anggota pengurus dibawah DPC PKB Kabupaten Cirebon lebih mengandalkan pada penanaman ideologisasi melalui kaderisasi

yang telah berjalan secara sistematis melalui pendidikan politik yang berjenjang (*wawancara Waswin, 24 Januari 2023*).

Dari penjelasan informan diatas dapat kita tarik sebuah benang merah bahwa untuk kondisi didalam partai PKB Kabupaten Cirebon, tidak ditemukannya klientalisme yang memberikan pengaruh instrumentalis atau anggota partai yang hanya selalu mengharapkan tangible resources (mengharapkan adanya imbalan materi dari partai). Karena, biasanya indikasi dari partai yang memiliki klientalisme kuat didalamnya akan lebih banyak anggotanya yang keluar dan berpindah ke partai lain. Hal ini dikarenakan anggota mereka yang masuk kedalam partai tidak karena kesesuaian pemikiran atau visi misi, melainkan anggota bergabung dengan partai hanya mengharapkan suatu imbalan dari partai. Ketika suatu imbalan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh partai maka besar kemungkinan mereka akan berpindah ke partai lain. Internal DPC PKB Kabupaten Cirebon berkaitan dengan hubungan yang terjalin dengan anggotanya bukan hubungan yang mengarah ke instrumentalis tersebut, karena PKB Kabupaten Cirebon dalam merekrut dan membangun hubungan dengan anggotanya didasarkan atas dasar kesamaan ideologi.

Melanjuti pembahasan diatas, walaupun PKB telah berhasil menanamkan ideologinya melalui pendidikan politik yang berjenjang dengan sangat terstruktur. Dalam penelitian ini penulis menemukan hal lain yang masih memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini. Temuan tersebut berupa adanya indikasi-indikasi yang memungkinkan kedepannya untuk terjadi klientalisme yang memberikan pengaruh instrumentalis didalam partai PKB secara umum dan Kabupaten Cirebon untuk tingkat daerah. Sebab, didalam tubuh PKB saat ini muncul sebuah sistem baru yang disebut dengan sistem “satu komando”, dimana dengan adanya sistem ini sangat mencerminkan bahwa PKB ditingkat daerah terutama PKB Kabupaten Cirebon sangat bergantung pada keputusan-keputusan dari pusat dalam hal ini DPP PKB. Hal tersebut terjadi dikarenakan DPP PKB berdasarkan sistem satu komando-nya tersebut berhak untuk memberikan instruksi kebijakan kepada partai-partai ditingkat daerah, bahkan DPP PKB juga berhak untuk mencampur tangani proses pembuatan kebijakan partai di tingkat daerah. Dimana, notabe-nya dalam mengatur kebijakan-kebijakan untuk tingkat daerah merupakan tanggung jawab pengurus PKB di tingkat daerah saja dimana prosesnya melalui mekanisme yang sudah diatur.

Dengan adanya sistem satu komando di internal PKB yang sedemikian rupa, kedepannya akan sangat memungkinkan bagi loby-loby politik yang memiliki kepentingan

pribadi sewaktu-waktu bisa mempengaruhi internal DPP PKB dalam pembuatan keputusan. Dengan adanya loby-loby politik tersebut juga bisa sampai memunculkan klientalisme di dalam partai PKB, hal ini dikarenakan akan memunculkan sikap kekecewaan dari anggota-anggota setia partai terhadap kemunculan loby-loby tersebut di internal DPP PKB yang sampai mempengaruhi dalam pembuatan keputusan.

4.3 DERAJAT OTONOMI (*Dicisional Autonomy*)

Konsep yang ditawarkan dalam teori pelebagaan partai politik yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lars Svansand khususnya pada derajat otonomi adalah memfokuskan analisa pada kemandirian partai dalam pengambilan keputusan. Sehingga, dalam pembahasan kali ini merupakan bahasan yang akan menyinggung tentang hubungan antara partai dengan pihak atau aktor baik di dalam maupun diluar partai politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan diinternal partai. Adapun menurut Randall dan Svansad, suatu partai politik dapat dikatakan telah terlembaga dalam hal derajat otonomi apabila dalam pengambilan keputusan partai politik tersebut telah mandiri tidak diatur atau dikontrol oleh pihak lain. Untuk itu, bahasan dalam melihat apakah partai PKB Kabupaten Cirebon telah terlembaga pada derajat otonomi (*discisional autonomy*) dapat dilihat pada bahasan dibawah ini.

1. Kemandirian Partai dalam Pengambilan Keputusan

Seperti yang sudah disinggung sedikit pada pembahasan demokrasi di internal partai PKB Kabupaten Cirebon seluruhnya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan AD/ART yang berlaku. Namun, hal lain penulis temukan dimana untuk tingkat DPW dan DPC seusiai dengan dilaksanakannya mukhtamar tahun 2019 penentu pengambilan keputusan terletak pada ketua umum DPP PKB. Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum DPP PKB memiliki privilege, dimana beliau dapat menentukan arah perpolitikan dengan kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh partai-partai pada tingkat daerah. Kuatnya Muhaimin Iskandar sebagai ketua DPP PKB dalam menentukan arah perpolitikan didalam PKB berjalan setelah adanya sistem “Satu Komando” yang disahkan pasca mukhtamar tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan antara AD/ART tahun 2014 dengan tahun 2019 khususnya dalam penentuan keputusan, dimana pada AD/ART tahun 2014 seluruh kebijakan yang berkaitan dengan daerah cukup diputuskan oleh seorang ketua DPC atau DPW yang dikonsultasikan bersama dengan Dewan Syura’.

Dengan munculnya sistem satu komando didalam tubuh PKB memberikan dampak pada partai-partai yang berkedudukan didaerah. Dampak dari sistem komando ini terlihat dari

adanya indikasi ketergantungan partai-partai daerah terhadap putusan dari pusat, sehingga partai yang berkedudukan di daerah tidak akan mandiri dalam menjalankan organisasinya. Ketidakmandirian partai daerah ini bahkan dapat dikatakan hampir meliputi semua unsur seperti misalnya dalam pengambilan keputusan partai, pemilihan ketua partai, maupun kebijakan-kebijakan internal yang seharusnya menjadi hak struktural PKB yang berkedudukan di daerah itu sendiri. Sistem satu komando ditubuh PKB yang telah memberikan dampak pada partai-partai ditingkat daerah-pun dikonfirmasi secara langsung oleh Hasan Basori selaku ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon pada saat melakukan wawancara dengan penulis. Dimana beliau menyampaikan bahwasanya dalam menentukan arah perpolitikan untuk tingkatan daerah seperti DPC PKB Kabupaten Cirebon pastinya akan mengikuti dan harus sesuai dengan segala jenis instruksi, arahan, maupun komando dari pusat dalam hal ini DPP PKB.

“Di PKB kita tetap memiliki instruksi pemimpin besar atau pemimpin utama yaitu Muhaimin Iskandar artinya segala bentuk dan jenis instruksional dari beliau kita mengikuti komandonya mengikuti instruksinya mengikuti arahannya walaupun secara umum PKB selalu mengedepankan aspek diskusi dan musyawarah dalam ranah tertentu, apalagi secara struktural di PKB ada istilahnya Dewan Syura’ (pembina yang memberikan arahan kebijakan secara umum). Sehingga PKB dalam pembuatan keputusan pasti melalui musyawarah, namun hasil dari musyawarah tersebut dilaksanakan (atau tidak) tetap berdasarkan instruksi yang berasal ketua tanfidz dalam hal ini Muhaimin Iskandar”. (Wawancara dengan Hasan Basori Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, 4 Januari 2023).

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk tingkat derajat otonomi, DPC PKB Kabupaten Cirebon belum bisa dikatakan sebagai partai politik yang telah terlembaga dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan DPC PKB Kabupaten Cirebon masih belum mandiri dalam hal menentukan sebuah kebijakan partai, PKB Kabupaten Cirebon cenderung masih bergantung pada putusan dan juga komando yang diinstruksikan dari kepengurusan pada tingkat pusat. Walaupun dalam aspek otonomi, PKB Kabupaten Cirebon dengan sistem satu komandonya memiliki banyak memiliki banyak sekali kekurangan dalam hal kebijakan-kebijakan untuk bisa dikatakan sebagai partai yang terlembaga dari derajat otonomi. Tetapi ada juga indikator lain dari PKB Kabupaten Cirebon yang hampir terpenuhi untuk skala derajat otonomi ini, yakni sifat hubungan yang terjalin antara partai PKB Kabupaten Cirebon dengan aktor-aktor di luar partai politik. Dimana PKB Kabupaten Cirebon dalam membangun hubungan dengan pihak luar tidak sampai ke arah ketergantungan partai pada pihak luar. Hubungan tersebut hanya bersifat linkage atau pertukaran dukungan antara pihak luar dengan partai. Sehingga, hubungan yang terjalin dengan pihak luar tersebut tidak akan sampai mengganggu dalam hal pengambilan keputusan didalam partai PKB Kabupaten Cirebon.

Hal ini ditegaskan oleh Waswin Jananta sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon. Waswin memaparkan bahwasanya dalam membuat jejaring dengan pihak luar PKB Kabupaten Cirebon tidak akan pernah sampai berujung pada ketergantungan partai pada pihak luar. Hubungan yang dibangun tersebut menurut Waswin hanya bersifat pertukaran dukungan saja, seperti misalnya dalam kegiatan Foodbank yang dilaksanakan oleh PKB Kabupaten Cirebon. Pihak dari PKB sendiri akan melakukan kerja sama dengan pengusaha, pelaku-pelaku UMKM lokal untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sekaligus secara tidak langsung mengenalkan brand-brand UMKM yang diajak kolaborasi oleh PKB (*wawancara dengan Waswin, 1 Januari 2023*). Waswin juga menyebutkan pihak PKB melakukan jejaring atau membangun hubungan dengan kelompok buruh, pengusaha, kelompok nelayan yang tujuannya hanya untuk mendapatkan dukungan suara dari mereka (*wawancara dengan Waswin, 1 Januari 2023*). Walaupun dalam pengambilan sebuah keputusan perwakilan dari mereka akan dilibatkan, namun keterlibatan pihak luar hanya sebatas pada penyampaian keluhan yang muncul di masyarakat. Dari keluhan tersebut kemudian PKB Kabupaten Cirebon akan membuat keputusan akhir yakni kebijakan untuk membantu problem yang terjadi di mereka. Sehingga, dari sini terlihat bahwa PKB Kabupaten Cirebon sendiri secara umum berusaha menjadi sebuah organisasi yang independen tanpa terpengaruh dari pihak diluar dalam hal pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

4.4 DERAJAT PENGETAHUAN PUBLIK (*Reification*)

Vicky Randall dan Lars Svansand dalam teorinya menjelaskan bahwa derajat pengetahuan public atau reification merupakan kepekaan atau pengetahuan publik tentang partai politik yang merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik. Bila keberadaan partai politik telah tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut (Suryana, Ardiansyah, & Manan, 2020, hal. 59). Dengan kata lain derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai tersebut (Hanafi, 2018, hal. 197-213). Artinya bahwa suatu partai politik dapat dikatakan telah terlembaga dari derajat pengetahuan publik atau reification apabila masyarakat umum mengetahui wajah dan kiprah partai politik itu sesuai dengan platform partai sehingga masyarakatpun dapat memahami mengapa suatu partai politik melakukan tindakan tertentu dan tidak melakukan tindakan lain.

1. Analisis Atas Reification PKB di Kabupaten Cirebon

PKB dalam membangun citra publik atau image di Kabupaten Cirebon berbekal pada cara-cara kongkrit yang memberikan efek secara langsung agar partai bisa lebih dekat dengan masyarakat dan diterima dengan baik segala bentuk branding mereka. PKB di Kabupaten Cirebon dalam menanamkan image di kalangan masyarakat selalu membranding dirinya sendiri sebagai partai yang selalu dekat dengan seluruh elemen masyarakat di seluruh Kabupaten Cirebon. Branding-branding inipun dibuktikan oleh PKB dengan sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial atau membantu masyarakat. Salah satu contohnya adalah membangun citra dengan melakukan kegiatan-kegiatan Foodbank, pembagian nasi box kepada yang membutuhkan, hingga PKB menyediakan pelayanan advokasi bagi masyarakat Kabupaten Cirebon yang membutuhkan. Disamping itu, PKB juga sering melakukan terjun langsung menemui masyarakat yang sedang terkena musibah dan memberikan tempat untuk para pemuda-pemudi Kabupaten Cirebon berdialog dengan para tokoh-tokoh lokal dari PKB maupun non PKB.

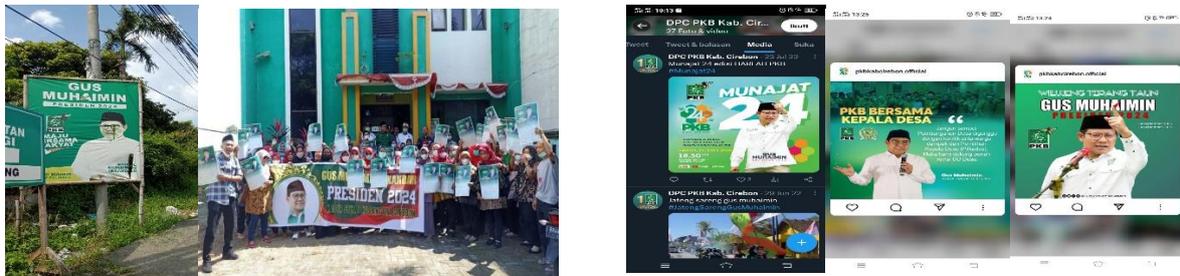
Lebih lanjut, bahkan saat penulis melakukan observasi yang lebih mendalam berkaitan dengan image yang tertanam di masyarakat. Penulis menemukan dalam membranding dirinya, PKB bukan hanya mengandalkan kegiatan-kegiatan yang bersifat terjun secara langsung kelapangan, di media sosial-pun PKB sering memanfaatkan dengan memposting setiap kegiatan-kegiatan mereka sebagai bentuk dari implementasi menanamkan imajinasi PKB di publik Kabupaten Cirebon. Jadi, dapat dikatakan PKB dalam menciptakan imajinasinya di masyarakat Kabupaten Cirebon mereka menggunakan seluruh platform baik offline seperti pemasangan spanduk tentang PKB, kegiatan-kegiatan sosial maupun online melalui Instagram, Facebook, Twitter dll. Sehingga, dari situ dapat dilihat bahwa jangkauan penyampaian informasi terkait memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang PKB di Kabupaten Cirebon akan sangat amat luas dan cenderung lebih efektif.

Dari argumen di atas didapati bahwa image PKB di masyarakat Kabupaten Cirebon sebagai partai politik nasionalis religius yang memegang prinsip politik kehadiran dan partai yang dekat dengan masyarakat telah tertanam dengan baik di hampir seluruh elemen masyarakat. Hal inipun diakui sendiri oleh beberapa masyarakat Kabupaten Cirebon yang dilakukan wawancara oleh penulis. Dalam mencari tahu apakah image PKB sebagai partai yang dekat dengan rakyat, partai yang menerapkan politik kehadiran dimana partai hadir di masyarakat dalam keadaan susah maupun tidak, penulis mengambil sampel sebanyak tujuh

masyarakat Kabupaten Cirebon secara acak dari seluruh kecamatan yang kemudian dilakukan wawancara yang berkaitan seberapa mengenal mereka tentang PKB di Kabupaten Cirebon. Hasil yang didapatkan dari wawancara tersebut menunjukan sebagian besar masyarakat Kabupaten Cirebon mengenal karena PKB merupakan wadah bagi para kiyai, ulama dan warga NU untuk berpartisipasi dalam politik, mengenal PKB dari kegiatan-kegiatan sosial yang diusung oleh para kader-kader yang telah menjabat sebagai legislator di DPRD, mengenal PKB dari tokoh-tokohnya seperti misalnya; Abdurahman Wahir (Gus dur), Muhaimin Iskandar, Mohamad Luthvi (tokoh lokal PKB Kabupaten Cirebon), Hasan Basori sebagai ketua DPC-nya dan lain-lain.

Temuan selanjutnya yang lebih menarik berkaitan dengan ini, penulis temukan adanya indikasi-indikasi bahwa PKB Kabupaten Cirebon dalam menanamkan image di kalangan masyarakat cenderung lebih mengandalkan simbol-simbol ketokohnya. Dimana branding utama yang ditanamkan oleh PKB di masyarakat Kabupaten Cirebon salah satunya adalah Muhaimin Iskandar sebagai branding utama mereka. Banyak sekali branding-branding PKB yang menggunakan simbol-simbol Muhaimin Iskandar sebagai fokus utama dalam membangun citra publik, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. 6 Penanaman Citra Publik PKB DI Kabupaten Cirebon Dengan Mengandalkan Simbol-Simbol Ketokohan Muhaimin Iskandar Ketua DPP



Sumber: dokumentasi pribadi, radarcirebon.id dan Instagram Tweeter resmi DPC PKB Kabupaten Cirebon

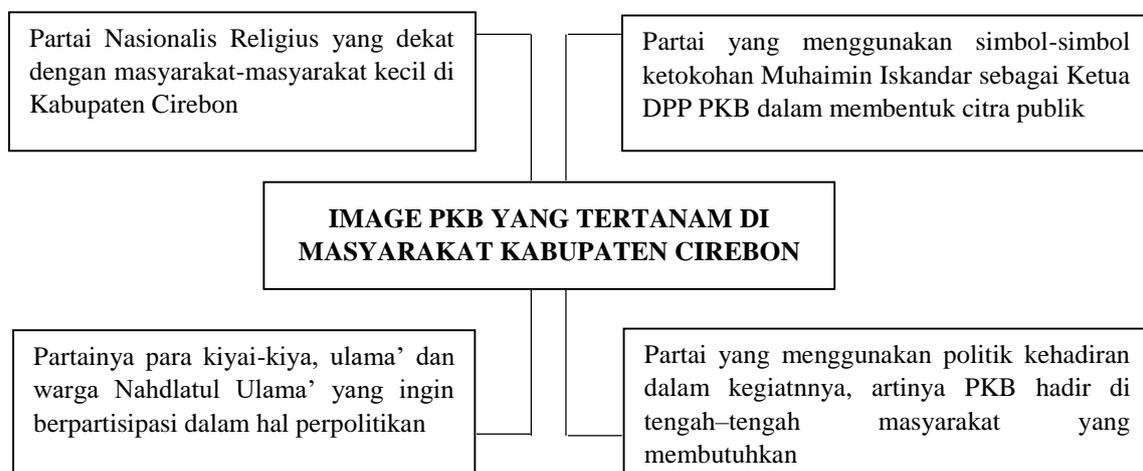
Keterangan : Gambar sebelah kiri merupakan penanaman citra publik yang digunakan oleh PKB secara offline dan gambar sebelah kanan merupakan citra publik yang digunakan oleh PKB di Kabupaten Cirebon melalui media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, dan sejenisnya)

Berdasarkan gambar 4.6 diatas, indikasi atau ciri-ciri terkait ketergantungan pada simbol-simbol ketokohan dalam membangun branding tersebut kemudian penulis analisis

kembali dengan literatur-literatur yang terkait dan telah penulis baca sebelumnya. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis didasarkan pada literatur terkait menunjukkan bahwa partai yang mengandalkan simbol-simbol ketokohnya merupakan partai politik yang bertipe personalistik. Partai personalistik adalah partai politik yang merupakan kondisi dimana aktor individu menjadi utama dibandingkan partai politik maupun identitas kolektifnya (Karvonen, 2010). Bahkan aktor tersebut kerap menjadi image maupun identitas dari partai tersebut. Dalam konteks umum, yang kerap digunakan untuk membahas mengenai personalistik partai, maka dapat merujuk pada pembahasannya Renwick & Pilet bahwa personalistik mengarah pada pemimpin partai politik sebagai aktor utamanya (Esty Ekawati & Sweinstani, 2020, hal. 113). Partai politik yang bertipe personalistik ini jika dilihat berdasarkan pelembagaannya sangat lemah karena partai jenis ini tidak memiliki kemandirian, dimana partai akan cenderung lebih mengandalkan publik atau tokoh-tokoh yang ada di internal partai sebagai nilai jual utamanya.

Dapat disimpulkan bahwa untuk PKB di Kabupaten Cirebon belum bisa dikatakan sebagai partai yang telah terlembaga dari derajat reification. Karena hasil analisis penelitian ini, ditemukannya ketergantungan partai PKB di Kabupaten Cirebon pada simbol-simbol ketokohan Muhaimin Iskandar sebagai ketua DPP PKB dalam proses penanaman citra publik di Kabupaten Cirebon. Walaupun harus diakui sebagian besar masyarakat Kabupaten Cirebon telah faham dan mengenal PKB berkat kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilaksanakan oleh legislatornya, prinsip-prinsip politik yang dibawakannya, dan adanya hubungan historical dengan Nahdlatul Ulama' (NU). Dari penjelasan diatas, jika majinasi yang telah tertanam dimasyarakat Kabupaten Cirebon tentang PKB digambarkan secara konseptual adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 7 Image Publik terhadap PKB di Kabupaten Cirebon



BAB V

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMENANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN CIREBON

Pada bab ini membahas mengenai apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon pada pemilihan legislatif tahun 2019. Dalam pembahasan bab ini akan terdapat dua pembahasan yakni melihat faktor internal partai dan faktor eksternal partai yang berdasarkan observasi penulis diindikasikan memiliki pengaruh terhadap PKB Kabupaten Cirebon dalam menggeser PDI-P sebagai partai petahanan di posisi pertama pada pemilihan legislatif Kabupaten Cirebon tahun 2019. Adapun data yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil data lapangan yang diambil melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan didukung oleh data-data lainnya yang diambil dari berbagai dokumen literatur yang sesuai dengan topik. Kemudian dalam menunjang penulisan bab ini, data-data tersebut dilakukan analisis secara mendalam menggunakan teori strategi politik agar menghasilkan suatu penulisan dalam bahasan yang sistematis dan komprehensif.

5.1 FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI KEMENANGAN PKB DI KABUPATEN CIREBON

1. Keberhasilan Strategi Yang Digunakan PKB DI Kabupaten Cirebon

Faktor intrnal partai pertama yang berkaitan dengan kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon pada pemilu legislatif tahun 2019 berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan adalah efektifitas serta keberhasilan yang sangat tinggi dari strategi yang digunakan oleh PKB dalam menaklukan pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon. Keberhasilan penerapan strategi sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan di pemilihan legislatif 2019 juga tidak bisa dilepaskan dari kejelian kepengurusan DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam menyusun strategi politiknya. Salah satu strategi yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kemenangan partai ini adalah perekrutan caleg-calegnya yang lebih mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan PKB dan juga adanya program kampanye yang lebih mendekati PKB dengan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Cirebon terdapat tiga stretegi utama yang digunakan oleh internal PKB Kabupaten Cirebon dalam mengumpulkan suara masyarakat, ketiganya adalah sebagai berikut;

Pertama merekrut caleg-caleg yang memiliki modal sosial, modal kapital dan basis sosial yang sangat kuat. Perekrutan caleg-caleg yang memiliki modal baik sosial maupun kapital menurut penulis yang kuat dirasa wajar, mengingat jika kita melihat kembali pada pembahasan mengenai kemandirian keuangan partai di BAB IV, PKB di Kabupaten Cirebon cenderung masih memiliki permasalahan pada sangat terbatasnya kondisi keuangan atau pendanaan partai. Sehingga, dengan masuknya caleg-caleg yang memiliki modal sosial dan kapital yang sangat kuat akan lebih meringankan beban PKB dalam menjalankan kampanyenya di Kabupaten Cirebon. Selain modal yang kuat PKB Kabupaten Cirebon juga akan mempertimbangkan caleg-caleg yang memiliki basis sosial di masyarakat yang cukup dikenal berdasarkan backgroundnya. Seperti misalnya caleg PKB yang berlatar belakang kiyai atau ulama-ulama yang ada di Kabupaten Cirebon, pengusaha, pembisnis, tokoh-tokoh yang ada di masyarakat dan lain sebagainya. Dari kriteria-kriteria tersebut maka akan menghasilkan caleg-caleg PKB Kabupaten Cirebon yang bertipe petarung, karena jika dilihat dari segi financial dan juga dukungan mereka sudah tidak diragukan lagi untuk mengikuti kontestasi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon. Artinya bahwa, dapat dikatakan strategi pertama yang digunakan oleh PKB Kabupaten Cirebon dalam memenangkan pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon adalah merekrut tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki modal sosial, kapital dan sudah dikenal oleh masyarakat secara luas.

Temuan strategi pertama ini diperkuat dari hasil wawancara penulis dengan sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon. Beliau memaparkan bahwa salah satu strategi yang digunakan oleh DPC PKB dalam memenangkan pemilihan legislatif di Kabupaten Cirebon adalah merekrut caleg-caleg yang berkualitas dilihat dari segi modal sosial, modal kapital. Dapat diartikan, jika seorang caleg memiliki sudah memiliki kriteria tersebut maka PKB akan sedikit memolesnya dengan menanamkan ideologinya kepada para caleg yang akan bertarung di elektoral. Setelah penanaman ideologi melalui pembekalan bacaleg PKB maka kader-kader bertipe petarung akan dihasilkan, yang kemudian kalau PKB sudah memiliki kualitas calegnya yang bertipe petarung tersebut maka jika dipresentasikan dari satu dapil jika ada enam orang caleg maka paling tidak ada sekita lima orang yang bertipe. Dengan munculnya caleg-caleg bertipe petarung ini menurut Waswin akan membuka peluang PKB di tahun 2019 untuk memenangkan pemilihan DPRD Kabupaten Cirebon.

“Salah satu strateginya adalah kita amencari caleg yang berkualitas, jadi hampir rata-rata dari 50 caleg itu di tahun 2019 semua petarung. Jadi kalau ada 6 caleg di satu dapil itu setidaknya ada 5 caleg yang tipe petarung, makanya dibeberapa dapil ada yang dapet dua, kemudian dalam mencari

caleg-caleg yang berkualitas tersebut internal PKB sendiri akan mempertimbangkan memilih caleg-caleg yang memiliki modal sosial, modal kapital dan basis sosial yang cukup sehingga akan menghasilkan jiwa jiwa petarung yang kemudian dapat membawa kita pada kemenangan. (Wawancara dengan Waswin Janata Skertaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, 11 Januari 2023)”.

Selanjutnya, strategi *kedua* yang digunakan oleh DPC PKB dalam memenangkan pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon adalah dengan menerapkan pola politik kehadiran dalam setiap kampanyenya. Selain para caleg-caleg PKB di Kabupaten Cirebon memiliki modal sosial, modal kapital dan basis sosial yang kuat untuk mengikuti pemilihan legislatif. Dalam menjalankan misi kampanyenya, caleg-caleg PKB Kabupaten Cirebon cenderung lebih berorientasi pada hadir secara langsung ditengah-tengah masyarakat, dengan tujuan untuk mendengarkan masukan-masukan dan menanamkan bahwa PKB merupakan partai yang mendukung terhadap rakyat-rakyat kecil. Dimana konsep ini sejalan dengan pola dari politik kehadirannya PKB yang lebih mengedepankan aksi turun langsung ke masyarakat dibanding wacana-wacana yang dijanjikan pada saat kampanye belaka.

Berkaitan dengan temuan penulis tentang strategi *kedua* ini, di tegaskan juga oleh Hasan Basori selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon. Hasan menyampaikan bahwa terkait strategi yang digunakan oleh PKB dalam menghadapi pemilihan legislatif 2019 sangat berfokus pada memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Dimana bentuk dari pelayanan tersebut adalah partai akan selalu hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai wadah aspirasi masyarakat. Dengan hadirnya PKB ditengah-tengah masyarakat, akan lebih mudah mendekatkan dan menanamkan citra PKB sebagai partai yang nasionalis religius serta partai yang berkomitmen penuh sebagai partai yang peduli umat dan mengayomi masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Saya pikir strategi yang kita gunakan saat ini adalah dengan politik kehadiran yah, (karena) hari ini menurut saya pribadi berpolitik itu ada dua cara atau strategi, strategi pertama adalah dengan politik kehadiran, kita melakukan action di masyarakat, action ini dilakukan dengan tujuan untuk menampung aspirasi masyarakat. (kemudian) kita juga turun, kita juga mengayomi dalam konteks melakukan pendampingan terhadap masyarakat, melaksanakan advokasi, (kemudaian) kepada anak-anak muda kita juga hadir, bahkan kita juga adakan knowlage bagi anak-anak muda.” (Wawancara dengan Hasan Basori Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, 4 Januari 2023).

Selaras dengan pendapatnya Hasan Basori Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthvi selaku Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Frtaksi PKB pun memberikan pandangan yang sama, dimana menurut Luthvi salah satu strategi yang digunakan oleh PKB pada pemilihan legislatif 2019 kemarin adalah dengan mengadakan road show ke berbagai

elemen masyarakat di setiap dapil-nya. Hal ini dilakukan karena para caleg-caleg maupun legislator PKB sesuai dengan amanat partai harus mendekati diri kepada masyarakat. Adapun banyak cara-cara yang bisa dilakukan oleh caleg-caleg dalam mendekati diri ke masyarakat, namun menurut beliau salah satu cara yang sering digunakan adalah PKB datang membantu pada saat masyarakat kabupaten melalui berbagai program yang telah diusung. Seperti misalnya membagikan nasi box kepada masyarakat yang membutuhkan, datang langsung ke masyarakat yang terkena musibah atau bahkan PKB mengadakan forum diskusi non formal bagi anak-anak muda sebagai bentuk dari mendekati diri kepada masyarakat.

“Strateginya semua mencakup hal lah, seperti konsolidasi seluruh elemen itu kita lakukan, kemudian kita melakukan road show silaturahmi ke gresrut di masyarakat dimana para caleg dan legislator yang berada. Karena di PKB ini mereka (para caleg dan legislator) harus dekat dengan masyarakat, kemudian kita juga menggunakan program-program yang memang lebih mendekati PKB dengan masyarakat, contohnya ada bagi-bagi nasi box untuk masyarakat yang memang tidak mampu, kemudian dulu itu ketika ada banjir di daerah Astanajapura atau Buntet kita langsung turun kesana dan beberapa kejadian-kejadian besar lainnya itu kita selalu hadir dimomen-momen apapun”. (Wawancara dengan Mohammad Luthfi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PKB, 24 Januari 2023).

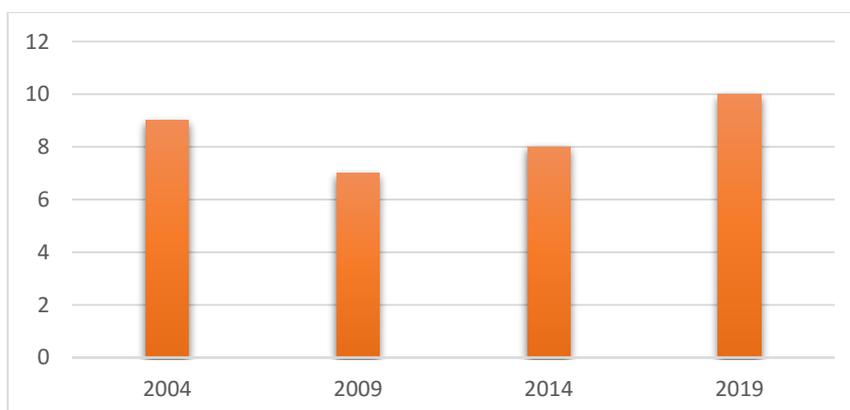
Berdasarkan dua penjelasan diatas dapat dikatakan PKB dalam membranding partai politiknya di Kabupaten Cirebon adalah dengan menerapkan pola strategi politik kehadiran. Adanya strategi kedua ini merupakan hal yang sangat penting sekali dilakukan bagi PKB di Kabupaten Cirebon jika ingin mendapatkan dukungan di masyarakat. Ini dikarenakan sebagai partai politik tentu harus sesuai dengan fungsinya, dimana menurut Miriam Budiardjo salah satu dari fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat dimana penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (Budiardjo, 2010. hal 405). Dengan banyaknya progra-program PKB yang cenderung mendekati diri kepada masyarakat, maka akan lebih mudah bagi PKB untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat Kabupaten Cirebon, dengan catatan citra yang dibangun oleh PKB pada saat terjun ke masyarakat harus baik.

Terakhir atau strategi *ketiga* yang digunakan oleh PKB dalam menghadapi pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon adalah akting atau melakukan komunikasi kepada masyarakat dalam membangun branding PKB di Kabupaten Cirebon (*Wawancara Hasan Basori, 4 Januari 2023*). Pada pemilihan legislatif 2019 di kabupaten Cirebon, PKB sebagai peserta dari event tersebut mewajibkan untuk para tokoh-tokohnya atau calegnya untuk terampil dalam melakukan komunikasi baik dalam bentuk online (media sosial) ataupun komunikasi secara

offline (terjun ke masyarakat). Hal ini dilakukan untuk membangun branding PKB di Kabupaten Cirebon sebagai partai yang dekat dengan masyarakat dan memiliki komitmen untuk memberikan wadah bagi masyarakat Kabupaten Cirebon dalam keperluan-keperluan politik, advokasi dan lain sebagainya. Artinya bahwa komunikasi yang secara sifatnya lebih kepada branding, di Kabupaten Cirebon PKB lakukan didalam kampanyenya sebagai bentuk dari strateginya untuk mencitrakan hal-hal positif di tengah masyarakat baik melalui media sosial maupun non media sosial (*Wawancara dengan Hasan Basori, 4 Januari 2023*). Namun, menyinggung sedikit mengenai branding di media sosial berdasarkan pengamatan serta observasi penulis di lapangan menghasilkan temuan berupa, PKB dalam membranding di media sosialnya hanya menggunakan beberapa hal saja yang disebutkan diatas, melainkan PKB di media sosialnya cenderung lebih banyak membranding dirinya dengan ketokohan dari Abdul Muhaimin Iskandar sebagai nilai jual utama bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon. Hal inilah yang kemudian memunculkan tanda tanya besar bagi penulis apakah PKB ini merupakan partai personalistik atau bukan berdasarkan temuan tersebut.

Dari penjelasan ini penulis melihat bahwa caleg-caleg, pengurus partai serta kader PKB bisa dibilang cukup sukses dalam mengimplementasikan strateginya di Kabupaten Cirebon sehingga berhasil meningkatkan performa partai di pemilihan DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2019. Ini dibuktikan dengan naiknya perolehan kursi PKB di DPRD Kabupaten Cirebon jika dibandingkan dengan tahun 2014. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini;

Gambar 5. 1 Perolehan Kursi PKB di DPRD Kabupaten Cirebon Dalam Empat Edisi Pemilihan Legislatif Terakhir



Sumber; diolah kembali oleh penulis dari data KPU Kabupaten Cirebon

Berdasarkan grafik 5.1 diatas dapat kita ketahui bahwa tampak sangat jelas dengan diterapkannya tiga strategi tersebut mampu mendongkrak perolehan kursi PKB di DPRD

Kabupaten. Kenaikan kursi pada tahun 2019 ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena jika dilihat dari tabel tersebut pada tahun 2009 PKB di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan 2 kursi dari sembilan kursi pada tahun 2004 menjadi 7 kursi pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2014 PKB naik satu perolehan kursinya di Kabupaten Cirebon menjadi 8 kursi dan pada tahun 2019 PKB mengalami kenaikan kembali menjadi 10 kursi. Kenaikan ini jelas karena beberapa faktor, salah satunya adalah strategi yang digunakan oleh PKB Kabupaten Cirebon

Kemudian dalam persebaran dari caleg-caleg terpilih dari Fraksi PKB di Kabupaten Cirebon, ada beberapa Dapil yang mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari dua dapil yang sebelumnya PKB hanya memperoleh satu kursi atau bahkan sama sekali tidak memperoleh dari dapil tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel beserta penjelasannya tentang caleg-caleg terpilih fraksi PKB di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 dibawah ini;

Tabel 5. 1 Hasil Daftar Calon Anggota Legislatif (Caleg) Terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019

CALEG TERPILIH	DAERAH PEMILIHAN
1. EMHA SYAHRUL ALAM	Dapil 1 (Kecamatan Sumber, Dukupuntang, Plumbon, Weru, dan Plered)
1. MAHMUDI	Dapil 2 (Kecamatan Palimanan, Klenganan, Ciwaringin, Depok, Gempol, Jamblang)
1. DR. H.J HANIFAH, MA	Dapil 3 (Kecamatan Arjawinangun, Panguragan, Susukan, Gegesik, Kaliwedi)
1. H. DARUSA, SH 2. PANDI,SE	Dapil 4 (Kecamatan Talun, Kedawung, Gunung jati, Kapetakan, Tengahtani, Suraneggala)
1. HJ. ISMAYATUL FATHIYAH YUSUF, B. Comm, MPA 2. H. TANUNG HIDAYAT	Dapil 5 (Kecamatan Losari, Pabedilan, Babakan, Pangenan, Gebang)
1. MAD SALEH	Dapil 6 (Kecamatan Waled, Ciledug, Karang Sembung, Lemah Abang, Pasaleman, Pabuaran, Karang Wareng)
1. R. HASAN BASORI, SE, M. SI 2. MOHAMAD LUTHVI, M.Si	Dapil 7 (Kecamatan Susukan Lebak, Sedong, Astanajapura, Mundu, Beber, Greged)

Sumber; diolah kembali oleh penulis dari data KPU Kabupaten Cirebon

Berdasarkan tabel 5.2 diatas dapat di ketahui bahwa dari seluruh dapil (7 Dapil) di Kabupaten Cirebon sebaran perolehan kursi PKB dapat dikatakan meningkat cukup signifikan terutama dapil lima dan enam yang meningkat dua kursi, dimana apada tahun 2014 masing-masing hanya memperoleh satu kursi. Dengan peningkatan dua kursi di dua dapil menjadikan secara total kursi PKB di DPRD Kabupaten Cirebon meningkat 2 menjadi 10 kuris. Keberhasilan strategi yang digunakan oleh caleg-caleg PKB pun terbukti dengan 2 Caleg petahanan yang maju kembali pada pemilu DPRD Kabupaten Cirebon pada pemilu 2019 telah berhasil terpilih kembali, yaitu; Pandi, S.E dari Dapil 4 (Kecamatan Talun, Kedawung,

Gunung jati, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Tengahtani, dan Kecamatan Suraneggala) dan H. Tanung Hidayat dari Dapil 5 (Kecamatan Losari, Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Babakan, Kecamatan Pangenan, dan Kecamatan Gebang).

5.2 FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KEMENAGAN PKB DI KABUPATEN CIREBON

1. Baiknya Hubungan antara PKB dengan Kiyai dan Tokoh Masyarakat yang ada Di Kabupaten Cirebon

Faktor eksternal pertama yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah PKB di Kabupaten Cirebon menjalin hubungan baik dengan kiyai-kiyai dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari lumbung suaranya pada tahun 2019. PKB merupakan partai politik yang sangat di identikkan dengan partai islam, hal ini dikarenakan PKB secara historisnya merupakan partai yang lahir dari salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama'. Oleh karena itu, PKB dalam melaksanakan perpolitikannya tidak akan pernah bisa dilepaskan dari peran serta Nahdlatul Ulama', baik itu dalam membangun hubungan sebagai konstituen ataupun dalam merekrut kader-kader diinternalnya. Walaupun di era sekarang ini PKB telah banyak mengproklamirkan dirinya sendiri bahwa mereka merupakan partai yang nasional religius dan terbuka untuk semua kalangan masyarakat Indonesia yang ingin membangun bangsa ini melalui perpolitikan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas dan juga didasarkan atas observasi penulis dilapangan dengan dibarengi data hasil wawancara mendapati bahwa pada dasarnya hubungan baik inilah yang menjadi sebab PKB banyak diminati oleh masyarakat di Kabupaten Cirebon sejak kemunculannya pada tahun 1998. PKB di Kabupaten Cirebon telah merajut dan mempertahankan hubungan yang sangat baik dengan para kiyai-kiyai dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon, seperti misalnya kiyai-kiyai dan ulama' dari Pondok Pesantren Buntet, Pondok Pesantren Gedongan, Pondok Pesantren Kempek dan pondok-pondok pesantren lainnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Hubungan yang terjalin dengan kiyai-kiyai dari berbagai pondok tersebut merupakan hubungan yang bersifat historical atau sejarah. Karena berdasarkan sejarahnya PKB lahir dari kalangan Nahdlatul Ulama' kemudian Kabupaten Cirebon-nya sendiri merupakan salah satu daerah di Jawa barat dengan populasi nahdliyin terbanyak, hal inilah yang kemudian menjadi wajar dan sudah sepatutnya hubungan tersebut terjalin. Bahkan penulis menelusuri sedikit lebih mendalam tidak jarang para

ulama' dan kiyai muda yang ada Kabupaten Cirebon ikut aktif dan meramaikan PKB dengan menjadi salah satu kader atau bahkan Caleg PKB.

Kemudian, PKB di Kabupaten Cirebon dalam memperkuat dukungannya juga membangun dan menjaga hubungan baik dengan para tokoh-tokoh masyarakat atau kepala kampung diseluruh Kabupaten Cirebon. Membangun dan menjaga hubungan untuk para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon merupakan agenda penting bagi PKB. Mekanisme yang ditempuh oleh PKB di Kabupaten Cirebon dalam membangun hubungan baik dengan tokoh masyarakat yang ada di kampung-kampung adalah dengan pendekatan menguatkan spirit kolaboratif dan membangun pemahaman kesamaan ideologi. Dimana Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART) yang merupakan bagian dari kepengurusan PKB ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta RT dan RW akan melakukan pendekatan tersebut untuk membangun hubungan dengan seluruh tokoh yang ada di masyarakat Kabupaten Cirebon. Dengan organisasi yang telah terstruktur sangat rapih, menjadi ponit plus tersendiri bagi PKB untuk dapat menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh yang ada di kampung hingga tingkat RT dan RW. Dengan terjalinnya hubungan baik antara kiyai-kiyai yang ada di Kabupaten Cirebon beserta juga dengan tokoh-tokoh lainnya akan sangat menguntungkan bagi PKB itu sendiri, mengingat baik kiyai maupun tokoh kampung atau desa memiliki basis dukungan tersendiri di kalangan masyarakat. Sehingga, akan sangat begitu loyal para pendukung PKB tersebut dalam mendukung PKB di setiap even elektoral yang ada di Kabupaten Cirebon.

Hal inipun dikonfirmasi secara langsung oleh Hasan Basori selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon saat dilakukan wawancara dengan penulis, yang menyebutkan bahwa terkait kemenangannya di Kabupaten Cirebon berkat adanya hubungan baik antara PKB dengan pihak luar. Hasan juga menambahkan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa PKB di Kabupaten Cirebon sangat diuntungkan karena merupakan partai politik yang memiliki keterkaitan dengan Nahdlatul Ulama' (NU) berdasarkan sejarahnya. Sehingga, dalam membangun sumber suara dari para kiyai-kiyai atau ulama', dan tokoh kampung atau desa yang ada di elemen masyarakat akan cenderung memudahkan PKB di Kabupaten Cirebon.

“Saya pikir PKB hari ini menurut saya adalah partai yang nasionalis religius yang lebih mengedepankan pada prinsip kebersamaan, prinsip kolaboratif dan penyamaan persepsi untuk membangun sebuah daerah atau suatu negara. (Oleh karena itu), kita tetap mencoba mempunyai dan mempertahankan hubungan baik seperti misalnya dengan pentahelix, akademisi, elemen masyarakat, media, hingga masyarakat-nya sendiri, karena bagi PKB hubungan baik ini

menjadi bagian penting bagi kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon, artinya bahwa hingga saat ini PKB masih memiliki hubungan baik dengan pihak tersebut. Kemudian karena PKB ini lahir dari NU (sehingga) banyak aktor masyarakat di Kabupaten Cirebon seperti para kiyai, ulama', hingga para tokoh masyarakat kampung yang terjalin hubungan baik. Untuk para tokoh masyarakat hubungan baik tersebut terjalin karena kita hadir langsung dengan di wakikan oleh (kepengurusan) anak ranting PKB. (dapat dikatakan) hubungan baik dengan aktor saat itu dan sekarang menjadi strategi politik kami karena bagaimanapun aktor di masyarakat ini menjadi multiefek bagi kami untuk mendapatkan kemenangan maupun suara pada tahun 2019 kemarin". (Wawancara dengan Hasan Basori Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, 4 Januari 2023)

Adanya jalinan hubungan baik antara PKB dengan kiyai, ulama' dan tokoh-tokoh kampung atau desa yang ada di Kabupaten Cirebon menurut penulis merupakan modal yang cukup berpengaruh besar dalam memenangkan pemilihan DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2019. Sebab, memiliki pendukung berupa aktor luar partai yang loyal dan memiliki masa yang cukup besar di suatu daerah akan menjadikan daerah tersebut sebagai lumbung atau basis partai untuk memperoleh suara dengan jumlah besar agar berhasil memenangkan pemilihan baik eksekutif maupun legislatif. Hal inilah yang kemudian terjadi di PKB, dimana berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, dimana dengan adanya hubungan baik dengan para kiyai dan tokoh masyarakat di Kabupaten Cirebon memberikan efek tersendiri bagi PKB yang sejak kemunculannya langsung mampu bersaing dengan partai-partai yang lebih berpengalaman, dan puncaknya pada tahun 2019 PKB di Kabupaten Cirebon berhasil menjadi pemenang.

2. Pengaruh KH. Ma'ruf Amin Yang Maju Sebagai Wakil Presiden Pada Pemilu 2019 terhadap Kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon

Faktor eksternal kedua yang memiliki pengaruh terhadap kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon pada pemilihan legislatif 2019 berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis menemukan bahwa majunya KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden mendampingi pak Joko Widodo sebagai Presiden memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perolehan suara dan kursi PKB di Parlemen. Adanya pengaruh dari majunya KH. Ma'ruf Amin terhadap perolehan suara PKB, dikarenakan KH. Ma'ruf Amin sendiri merupakan salah satu tokoh ulama' besar di kalangan Nahdlatul Ulama' (NU) dan beliau sendiri sebagai salah satu tokoh NU yang memiliki keterlibatan terhadap berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Indonesia. Oleh karena itu, menurut penulis kemenangan PKB

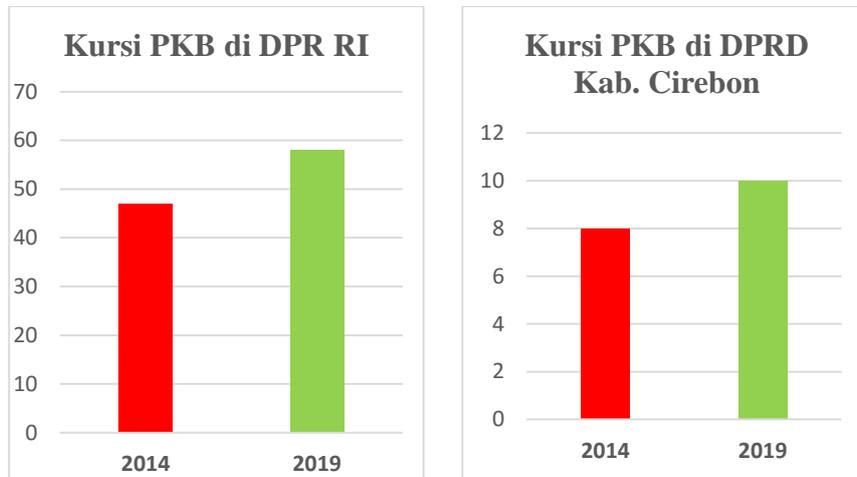
di Kabupaten Cirebon pada pemilihan legislatif tahun 2019 merupakan efek dari kehadiran beliau di pemilihan eksekutif nasional.

Hal inipun di konfirmasi secara langsung oleh Hasan Basori selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon. Hasan menjelaskan saat diwawancarai oleh penulis, menurut beliau PKB di Kabupaten Cirebon tidak memungkir dengan majunya KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden mampu untuk menaikkan elektabilitas partai PKB di Kabupaten Cirebon hingga mendapatkan kemenangan pertamanya bagi PKB untuk daerah Jawa Barat. Kemenangan PKB di DPRD Kabupaten Cirebon merupakan satu-satunya kemenangan PKB di daerah Jawa Barat, menurut Hasan kemenangan tersebut merupakan adanya Coattail Effect (Efek Ekor Jas) yang ditimbulkan saat salah satu tokoh penting mereka maju menyalonkan diri di eksekutif ataupun legislatif. Tokoh PKB yang dimaksudkan oleh Hasan tersebut adalah KH. Ma'ruf Amin, sebagai seorang ulama besar NU, pendiri PKB, Guru Bangsa dan tokoh masyarakat yang ikut serta dalam kontestasi pemilihan eksekutif secara tidak langsung memberikan Coattail Effect bagi PKB hingga meningkatkan suara mereka di pemilihan legislatif tahun 2019 Kabupaten Cirebon.

“Tyah pasti mas, karena kalau di perpolitikan itu ada istilahnya Coattail Effect yang artinya adalah efek sistemik yang memiliki dampak multiplayer efek terhadap pemilih, karena adanya tokoh utama kita yang maju mencalonkan diri di legislatif ataupun eksekutif misalnya seperti KH. Ma'ruf Amin mencalonkan diri sebagai Wapres dan tentu diusung oleh PKB, dengan keberadaan beliau sebagai tokoh PKB dan juga salah satu inisiator PKB (atau) salah satu tokoh yang mendirikan PKB itu secara tidak langsung sangat mempengaruhi dan memberikan efek kepada pemilih masyarakat untuk memilih PKB, begitu ya mas. Jadi mengenai pertanyaan ini pasti ada hubungannya KH. Ma'ruf Amin mencalonkan sebagai Wapres terhadap peningkatan perolehan suara di Pileg Kabupaten Cirebon” (Wawancara dengan Hasan Basori Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, 4 Januari 2023).

Bahkan jika menilik lebih mendalam, dengan majunya KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden yang diusung oleh PKB bukan hanya memberikan sebuah peningkatan yang cukup signifikan bagi PKB di Kabupaten Cirebon melainkan di tingkat Nasional-pun PKB mengalami kenaikan. Dengan adanya kenaikan yang cukup signifikan baik skala nasional maupun di Kabupaten Cirebon di tahun 2019 merupakan sebuah indikasi yang terlihat jelas bahwa adanya KH. Ma'ruf Amin di pemilihan eksekutif sangat memberikan pengaruh ke PKB di kuris DPRD Kabupaten Cirebon dan DPR RI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik beserta penjelasnya mengenai perbandingan perolehan kursi DPR RI PKB dan kursi DPRD PKB di Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 dan 2019 di bawah ini;

Gambar 5. 2 Grafik Perolehan Kursi PKB di DPR RI dan DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2014 dan 2019



Sumber; diolah kembali oleh penulis berdasarkan data dari website KPU

Berdasarkan gambar grafik 5.2 diatas dapat dikatakan baik secara nasional maupun daerah khususnya di Kabupaten Cirebon PKB mengalami peningkatan kursi yang sangat signifikan. Dimana untuk PKB di tingkat nasional pada tahun 2019 terjadi peningkatan 11 kursi dari yang semula 47 kursi pada tahun 2014 naik menjadi 58 kursi di tahun 2019. Hal senada juga terjadi di Kabupaten Cirebon, PKB yang merupakan salah satu dari peserta pemilihan legislatif mengalami peningkatan kursi dari yang semula 8 kursi pada tahun 2014 meningkat 2 kursi menjadi 10 kursi pada tahun 2019. Peningkatan inipun menjadikan PKB sebagai partai pemenang di Kabupaten Cirebon dan satu satunya daerah di Jawa Bawar.

Naiknya perolehan kursi-kursi parlemen PKB di tingkat nasional maupun di Kabupaten Cirebon inipun diakui oleh salah Mohamad Luthvi yang merupakan ketua DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PKB. Menurut Luthvi adanya KH. Ma'ruf Amin yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama' sekaligus tokoh penting Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ikut serta dalam pemilihan legislatif sebagai Wakil Persiden (Wapres) merupakan momentumnya PKB dalam mendongkrak suara yang lebih besar. Berdasarkan momentum inilah yang kemudian PKB mememanfaatkannya dan terbukti sukses, dimana untuk di Kabupaten Cirebon PKB mengalami kenaikan berkat popularitas KH. Ma'ruf Amin sebagai Kiyai NU. Popularitas KH. Ma'ruf Amin ini menurut Luthvi bahkan bukan hanya dirasakan oleh Kabupaten Cirebon saja melainkan dirasakan oleh PKB secara nasional. Sehingga, elektabilitas PKB, sektoral PKB mengalami penguatan pada tahun 2019.

“Betul mas, berkaitan hal itu kita tidak pernah memungkiri bahwa peran dari Kiyai Ma’ruf Amin yang diusung oleh PKB menjadi momentum PKB untuk mendongkrak suara yang lebih besar, bukan hanya di Kabupaten Cirebon saja yang meningkat, tapi secara nasional juga meningkat yang tadinya empat puluh sekian kursi sekarang sudah lima puluh sekian kursi, artinya ada peningkatan yang lumayan signifikan disitu, nah peningkatan ini juga merupakan dampak dari kiyai ma’ruf amin menjadi wapres sehingga popularitas PKB ini naik baik secara elektabilitas, sektoral ataupun elektoralnya” (Wawancara dengan Mohammad Luthfi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PKB, 24 Januari 2023).

Dari penjelasan kedua informan dan pemaparan data-data diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon serta adanya peningkatan kursi-kursi di DPR RI yang cukup signifikan bagi PKB merupakan salah satu efek dari majunya KH. Ma’ruf Amin maju sebagai Wakil Presiden (Wapres). Efek tersebut menurut penulis merupakan yang paling memberikan pengaruh terhadap peningkatan suara hingga memberikan kemengangan bagi PKB di Kabupaten Cirebon. Karena berdasarkan popularitasnya, KH. Ma’ruf Amin sebagai ulama’ Nahdlatul Ulama’(NU) telah tertanam sejak lama pada seluruh masyarakat nahdiyyin khususnya masyarakat nahdiyyin di Kabupaten Cirebon yang notabnya merupakan mayoritas jika dibanding dengan dengan ormas-ormas lainnya. Ini berdasarkan ungkapan yang dikutip dari website nuonline.com, dimana Ketua PCNU Kabupaten Cirebon saat melakukan sambutannya di salah satu acaranya menyebutkan hingga saat ini jumlah warga nahdiyyin di Kabupaten Cirebon telah mencapai 80%, yang artinya nahdiyyin merupakan kelompok mayoritas di Kabupaten Cirebon (*www.nuonline.com, diakses 2 April 2023*).

3. Kurang Baiknya Kondisi Internal PDIP Sebagai Pesaing Kuat PKB pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Cirebon

Faktor eksternal partai terakhir atau ketiga yang berkaitan dengan kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon pada pemilu legislatif tahun 2019 berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan adalah adanya kondisi internal yang kurang baik pada PDI-P di Kabupaten Cirebon sebagai pesaing berat PKB, dimana dalam satu tahun sebelum dilaksanakannya pemilihan legislatif tahun 2019 kader-kader PDI-P yang telah terpilih dan menjabat pada pemilihan sebelumnya terjaring kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal sejatinya di Kabupaten Cirebon PDI-P merupakan partai yang paling banyak pengikutnya dan merupakan partai yang paling superior dalam sejarah pemilihan legislatif di Kabupaten Cirebon mengalahkan partai-partai lainnya seperti Partai Golkar, PKS, bahkan PKB itu sendiri dalam setiap tahunnya. Hal ini terbukti jika dilihat pasca reformasi saja PDI-P di Kabupaten Cirebon sudah mengoleksi empat kali kemenangan beruntun di pemilihan legislatif terhitung dari tahun

1999 hingga 2014. Namun, dengan adanya tragedi yang menimpa internal PDI-P tersebut membuat tren kemenangan beruntun tersebut terhenti begitu saja dikarenakan kepercayaan publik terhadap PDI-P di Kabupaten Cirebon dengan adanya kasus tersebut berada pada titik jenuh atau bahkan berkurang drastis.

Menurunnya kepercayaan publik terhadap PDI-P di Kabupaten Cirebon imbas dari adanya insiden di tahun 2018 tersebut, menjadi berkah tersendiri bagi PKB sebagai partisipan sekaligus pesaing dekat PDI-P dalam mengikuti perhelatan pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon. Hal ini dikarenakan peluang untuk memenangkan pemilihan legislatif tahun 2019 begitu besar bagi PKB di Kabupaten Cirebon dengan adanya tragedi yang menimpa PDI-P tersebut. Sehingga, berdasarkan fenomena tersebut menurut penulis kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon merupakan sebuah keberhasilan dan kesuksesan PKB dalam memanfaatkan momentum jatuhnya citra PDI-P di Kabupaten Cirebon sebelum bertarung di pemilihan legislatif 2019. Pemanfaatan momentum kurang kondusifnya internal PDI-P serta dibarengi dengan penerapan strategi politik yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan partai seperti yang sudah dijelaskan diatas merupakan cara yang sangat jitu digunakan oleh PKB dalam membawa kemenangan untuk pertama kalinya di pemilihan legislatif Kabupaten Cirebon.

Faktor inipun dipertegas oleh Waswin Janata selaku Sekertaris DPC PKB Kabupaten Cirebon saat dilakukan wawancara dengan penulis sebagai faktor paling mempengaruhi kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon selain majunya KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Waswin menjelaskan bahwa salah satu faktor terbesar berkaitan dengan kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon adalah adanya kondisi yang kurang harmonis diinternal partai lawan dalam hal ini PDI-P. Kurang harmonisnya kondisi internal PDI-P menurut Waswin dikarenakan adanya tragedi atau musibah yang menerpa kader-kader terbaik mereka yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cirebon. Tragedi tersebut adalah di tahun 2018 terjadi penangkapan terhadap Bupati Kabupaten Cirebon oleh KPK dikarenakan adanya indikasi menjual beli jabatan. Beberapa bulan sebelum penangkapan Bupati Kabupaten Cirebon tersebut terlebih dahulu Wakil Bupati Kabupaten Cirebon yang merupakan kader PDI-P juga tertangkap oleh KPK. Adanya momentum tersebut tidak disia-siakan oleh PKB Kabupaten Cirebon, dimana menurut Waswin dengan munculnya momentum tersebut PKB langsung menyusun strategi bagi para caleg-calegnya agar masyarakat yang awalnya mendukung PDI-P berbalik mendukung dan memilih PKB di pemilihan tahun 2019.

“Salah satu faktornya itu, terjadi pembusukan diinternal PDI-P Kabupaten Cirebon yang awalnya sebagai pemenang, karena pada tahun 2018 terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kabupaten Cirebon oleh KPK yang notabennya Bupati tersebut merupakan kader dari PDI-P. Kemudian dibeberapa waktu sebelumnya juga wakil Bupati yang sama merupakan kader dari PDI-P juga ditangkap oleh KPK. Dari situasi tersebut kemudian membuat kepercayaan masyarakat Kabupaten Cirebon menurun terhadap PDI-P, di lain sisi ada variabel penentu kenapa masyarakat memilih kita (dengan adanya kasus tersebut) yaitu adanya Coattail Effect kita itu selalu bersebrangan ideologi dengan PDI-P, artinya ketika titik jenuh masyarakat terhadap PDI-P itu muncul kemudian dibarengi dengan temen-temen caleg yang bekerja keras agar peluang keterpilihannya PKB di Kabupaten Cirebon tinggi” (Wawancara dengan Waswin Janata Skertaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, 11 Januari 2023).

Keberhasilan PKB dalam memenangkan pemilihan legislatif di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 pun diakui sendiri oleh H. Mustofa selaku Ketua PDI-P di Kabupaten Cirebon. Mengutip dari website pikiranrakyat.com Ketua PDI-P Kabupaten Cirebon H. Mustofa mengakui kemenangan PKB dan penurunan peringkat partainya pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Cirebon. Turunnya suara yang cukup drastis hingga menyebabkan kekalahan bagi partai PDI-P di Kabupaten Cirebon dalam pemilihan legislatif 2019 tersebut menurutnya karena partai PDI-P tidak menikmati Efek Ekor Jas (Coattail Effect) dengan majunya Joko Widodo yang merupakan kader PDI-P sebagai Presiden. Sebaliknya justru PDI-P di Kabupaten Cirebon pada tahun tersebut menerima musibah politik yang diakibatkan oleh persoalan hukum yang menyangkut figur-figur kunci. Seperti misalnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kabupaten Cirebon H. Sunjaya Purwadisastra dan adanya penahanan pada Wakil Bupati Tasiya Soemadi Al Gotas yang mengakibatkan munculnya citra buruk dalam perjalanan kampanye partai PDI-P di Kabupaten Cirebon (www.pikiranrakyat.com diakses pada 31 Maret 2023).

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data-data yang ditemukan oleh penulis dilapangan dapat ditarik sebuah kesimpulan kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Cirebon pada pemilu Isgialatif 2019 dikarenakan sebagai berikut; *Pertama*, DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam menghadapi pemilu legislatif 2019 merekrut caleg-caleg yang memiliki modal sosial, modal kapital yang kuat serta caleg-caleg tersebut dikenal oleh kalangan masyarakat. Dari proses perekrutan caleg tersebut PKB Kabupaten Cirebon menaruh harapan cukup kuat untuk mendapatkan caleg-caleg yang bertipe petarung, karena jika dilihat dari modal sosial, kapital ataupun basis mereka sudah mencukupi. *Kedua*, PKB Kabupaten Cirebon menggunakan strategi politik kehadiran dengan tag line “PKB Peduli Ummat Melayani Masyarakat” dalam setiap kampanyenya. Artinya bahwa PKB Kabupaten Cirebon lebih mengutamakan aksi hadir langsung mendengarkan keluh kesah yang muncul dimasyarakat ketimbang membuat opini-opini publik. Salah satu contoh dari strategi ini adalah disediakan layanan advokasi bagi masyarakat oleh PKB, adanya Foodbank (pembagian makanan secara gratis setiap hari jum’at) oleh para caleg-caleg di setiap dapilnya, dan sebagainya.

Ketiga, Caleg-caleg PKB yang telah terpilih diwajibkan oleh DPC PKB Kabupaten Cirebon untuk cakap dalam melakukan komunikasi politik baik di media sosial maupun non sosial. Hal ini bertujuan agar branding PKB di Kabupaten Cirebon berhasil tertanam dengan baik dan berjalan secara maksimal, sehingga akan berimbas pada pengetahuan masyarakat Kabupaten Cirebon terkait ideologi yang dibawa oleh PKB. *Keempat*, kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon dikarenakan DPC PKB telah memiliki jalinan/hubungan yang kuat antara PKB dengan para kiyai-kiyai, ulama’ dan tokoh-tokoh kampung se-kecamatan Kabupaten Cirebon. Keberhasilan DPC PKB Kabupaten Cirebon dalam membangun hubungan baik tersebut dikarenakan PKB memiliki struktural organisasi yang cukup tertata rapih dari DPP untuk Pusat/Nasional, DPW untuk Wilayah/Provinsi, DPC untuk Kota/Kabupaten, DPAC untuk Kecamatan, DPRt untuk Desa/Kelurahan, dan DPART untuk Dusun. Sehingga, memudahkan PKB untuk melakukan komunikasi dengan para tokoh-tokoh masyarakat hingga diranah dusun.

Sementara itu, Faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kemenangan PKB di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

- 1) KH. Ma'ruf Amin yang maju sebagai Wakil Presiden pada pemilihan eksekutif tahun 2019 yang mendampingi Joko Widodo sebagai Presiden memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam peningkatan suara PKB di Kabupaten Cirebon maupun Nasional. Hal ini dikarenakan KH. Ma'ruf Amin merupakan salah satu tokoh penting dalam berdirinya partai tersebut. Oleh karena itu, identitas partai akan selalu melekat pada diri beliau, sehingga ketika beliau mengikuti pemilihan eksekutif 2019 secara langsung maupun tidak langsung PKB akan terkena *Cotail Effect* dari majunya KH. Ma'ruf Amin tersebut.
- 2) PDI-P sebagai kompetitor dan merupakan partai yang superior dalam sejarah pemilihan legislatif di Kabupaten Cirebon, pada tahun 2018 dilanda permasalahan internal yang mengakibatkan PDI-P tidak bisa menikmati *Cotail Effect* dari majunya Jokowi sebagai Presiden. Permasalahan yang terjadi di tubuh PDI-P Kabupaten Cirebon adalah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kabupaten Cirebon H. Sunjaya Purwadisastra dan adanya penahanan pada Wakil Bupati Tasiya Soemadi Al Gotas yang mana keduanya merupakan kader PDI-P Kabupaten Cirebon. Penahanan dan penangkapan tersebut mengakibatkan munculnya citra buruk dalam perjalanan kampanye PDI-P di Kabupaten Cirebon pada pemilu legislatif 2019.

Adapun kondisi institusional PKB di Kabupaten Cirebon belum bisa dikatakan sebagai partai yang berhasil membangun kelembagaan partai yang kuat. Indikasi lemahnya kelembagaan partai PKB di Kabupaten Cirebon mengacu pada analisis temuan penulis yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, terdapat dua indikator utama lemahnya kelembagaan PKB di Kabupaten Cirebon. Indikator pertama, pada derajat otonomi PKB di Kabupaten Cirebon masih jauh dari kata terlembaga. Hal ini dikarenakan PKB Kabupaten Cirebon dalam pengambilan keputusan hingga kebijakan-kebijakan strategis partai belum mandiri masih bergantung pada DPP PKB. Ketidakmandirian DPC PKB ini dikarenakan, diinternal PKB sendiri muncul sebuah sistem baru yang disebut dengan "sistem satu komando" dimana segala jenis keputusan dan kebijakan untuk tingkat DPC dan DPW diputuskan secara langsung oleh DPP PKB. Indikator kedua, pada derajat reification PKB Kabupaten Cirebon terlalu bergantung pada simbol-simbol ketokohan Muhaimin Iskandar dalam penanaman image di masyarakat. Besarnya peran ketokohan Muhaimin Iskandar sebagai ketua DPP PKB

juga memiliki andil besar dalam menentukan arah perpolitikan atau garis besar haluan partai. Berdasarkan hal inilah yang kemudian diindikasikan bahwa PKB di Kabupaten Cirebon merupakan jenis partai personalistik. Dimana jenis partai ini jika dilihat dari pelembagaannya tidak terlembaga dengan sangat kuat, karena partai memiliki ketergantungan pada tokoh atau publik figur di internalnya.

Sedangkan untuk dua derajat lainnya, yaitu; derajat kesisteman dan derajat identitas nilai PKB Kabupaten Cirebon sudah sangat banyak indikator-indikator yang terpenuhi. Walaupun harus diakui pada derajat kesisteman masih terdapat beberapa kekurangan berkaitan dengan kesesuaian AD/ART partai. Seperti misalnya, dalam hal sumber keuangan PKB di Kabupaten Cirebon sebagai partai politik cenderung mengandalkan sumber keuangan dari Bantuan Politik (Banpol) yang diberikan dari pemerintahan provinsi serta mengandalkan sumbangan-sumbangan dari pihak luar ataupun para aktor internal partai yang memiliki modal lebih dan bersifat opsional. Hal ini dikarenakan pada program iuran bulanan dari kader-kader PKB sesuai dengan AD/ART partai tidak berjalan sebagai mana mestinya, karena masih kurangnya kesadaran para kadernya akan iuiran bulanan tersebut. Menggantungkan sumber keuangan pada sumbangan dan bantuan memang tidak menyalahi AD/ART PKB, namun dengan kondisi yang seperti itu akan sangat memungkinkan bagi pihak yang memiliki kepentingan dan modal kuat bisa dengan mudah mengatur PKB dikemudian hari.

6.2 SARAN

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan oleh penulis bagi pihak yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, yaitu;

1. Untuk DPC PKB Kabupaten Cirebon terkait sumber keuangan partai, dalam hal sumber keuangan baiknya DPC PKB Kabupaten Cirebon harus lebih transparansi dan mengaktifkan kembali iuran bulanan kader-kader partai sesuai dengan AD/ART PKB, tidak terlalu mengandalkan sumbangan pihak luar dan sumbangan dari kader-kader yang memiliki modal sosial kuat. Sehingga, dengan transparansi keuangan dan iuran bulanan kader tersebut akan memungkinkan ketergantungan pada pihak-pihak yang memiliki modal dan kepentingan bisa lebih dihindarkan.
2. Kepada DPC PKB Kabupaten Cirebon terkait citra publik, sebaiknya dalam hal penanaman image atau citra publik di Kabuapten Cirebon, DPC PKB harus lebih mandiri jangan terlalu mengandalkan simbol-simbol ketokohan Muhaimin Iskandar selaku ketua umum DPP PKB. DPC PKB Kabupaten Cirebon mungkin bisa lebih

memaksimalkan pola-pola penanaman image kepada publik yang sudah berjalan sebelum-sebelumnya seperti misalnya penanaman image publik kepada masyarakat dengan politik kehadirannya, dengan tagline PKB partai yang nasionalis religius, dengan mengedepankan komunikasi politik kepada tokoh masyarakat Kabupaten Cirebon, dan lain sebagainya. Sehingga, dari situ akan tampak masyarakat Kabupaten Cirebon lebih mengenal PKB secara keseluruhan bukan mengenal PKB hanya karena tokoh-tokoh politiknya.

3. Kepada peneliti selanjutnya, dalam memperkuat hasil daripada penelitian ini penulis sarankan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk menggali terkait PDI-P pasca kekalahannya di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryamarthanino, V. (2022, September 16). *Sejarah Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa*. Diambil kembali dari kompas.com: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/19/130000979/sejarah-berdirinya-partai-kebangkitan-bangsa-pkb?page=all>
- Arifin, I. (2008). Tesis; Kiai dan Politik Studi Kasus Perilaku Politik Kiai Dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Mukhtamar II Semarang. *Dipnogoro Instutional Repository*, 56.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset; Memilih Di Antara Lima Pendekatan, Terjemahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhakiri, H., & Djafar, T. M. (2015). Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa The Political Structure Of Partai Kebangkitan Bangsa. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 1.
- Efendi, D. (2017). Strategi Kemenangan Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2, 62.
- Ekawati, E. (2016). Institusional Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Pemilihan Umum 2009. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*.
- Esty Ekawati, & Sweinstani, M. K. (2020). Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Wacana Politik*, 111-123.
- Fathoni, A. (2006). *Metode Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fauzuna, H. (2021). Strategi Komunikasi LPP PKB dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2019. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 2, 92-100. Dipetik Agustus 27, 2022
- Hanafi, R. I. (2018). Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 197-213.

- Huntington, S. P. (1983). *Tertib Politik Pada Masyarakat yang sedang berubah*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ibrahim, S. (2015). *Strategi Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Nagekko Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Diambil kembali dari dijilibadmin.unismuh.ac.id: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/23955-Full_Text.pdf
- jdih.kpu.go.id. (2018). *PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019*. KPU RI.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Karvonen, L. (2010). *The Personalization of Politics: a Study of Parliamentary Democracies*. ECPR Press.
- Kemendikbud.go.id. (2022, Desember 11). *Sistem Informasi apk-apm*. Diambil kembali dari www.kemdikbud.go.id: <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>
- Kuswandro, W. (2015, Oktober 26). *Pelebagaan Partai Politik*. Diambil kembali dari [lecture.ub.ac.id](http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelebagaan-partai-politik/): <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelebagaan-partai-politik/>
- Lewis-Beck, M., & Chlarson, K. (2002). Party, Ideology, and Institution in 1995 French Presidential Election . *Journal Of Political Science*, 489-512.
- Luthfi, M. (2012). *Pelebagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi tentang Pelebagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Pasca Kekalahan Pada Pemilu 2009*. Tesis Pasca Sarjana Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Gajah Mada.
- m.pkb.id. (diakses pada, 2022, Desember 16). *Visi dan Misi*. Diambil kembali dari [m.pkb.id](https://m.pkb.id/page/visi-misi/): <https://m.pkb.id/page/visi-misi/>
- m.pkb.id. (diakses pada, 2019 Desember 20). *Sejarah Pendirian*. Diambil Kembali dari [m.pkb.id](https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/): <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>.
- Marsh, D., & Stoker, G. (2011). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* . Bandung: Nusa Media.

- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Dta Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Muhammad, H. A., Pamungkas, N. L., & Anggara, D. (2020). Kegagalan Partai Politik Baru Di Povinsi Jambi Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 dalam Prespektif Pelembagaan Politik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Nambo, A. B., & Puluhuluwa, M. R. (2005). Memahami Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). *Jurnal Sosial dan Pembangunan Unisba*, 263.
- Ngato, A., Pati, A., & Egeten, M. (2018). Strategi Pemenangan Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat Periode 2014-2019 di Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1*.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM.
- Pardomuan, Muhammad, A. S., & Nazaki. (2022). Strategi Partai NasDem Dalam Pemenangan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Tanjungpinang (Studi ; Pemilihan Legislatif DPRD Kota Tanjungpinang). *Student Online Journal, 3*, 176-185.
- Pratama, A., Nurhuda, & Adytyas, N. O. (2021). Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang. *Journal on Politics and Islamic Civilization* .
- Rahim, A. R., & Radjab, E. (2017). *Manahemen Strategi*. Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbit Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Randall, V., & Svasand, L. (2002). PARTY INSTITUTIONALIZATION. *Party Politics, 8*, 12.
- Rasyid, F. A. (2020). *Pasasng Surut Partai-Partai Islam di Jawa Barat Pada Pemilu 1955-2004*. Bandung: CV.Sentra Publikasi Indoensia.

- Raudhi, R. D. (2017). Strategi Pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kabupaten Bener MERiah (Studi Pada Pemilu LEGislatif Tahun 2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2, 1-20.
- Schlesinger, J. A. (1984). On the theory of Party Organization. *The Journal of Politics*, 32.
- Schroder, P. (2013). *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung für die Freiheit, Indonesia.
- Scrooder, P. (2010). *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia.
- Sofhaladan. (2022, November 30). *Kiai Wawan: Islam Ramah Harus Benar-Benar Dipahami Dan Diamalkan Oleh Warga NU Kabupaten Cirebon*. Diambil kembali dari [www.nucirebon.or.id](https://nucirebon.or.id): <https://nucirebon.or.id/blog/2022/09/24/kiai-wawan-islam-ramah-harus-benar-benar-dipahami-dan-diamalkan-oleh-warga-nu-kabupaten-cirebon/>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryana, N., Ardiansyah, A. G., & Manan, F. (2020). Pelembagaan Partai Politik; Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*, 59.
- Syamsuddin. (2022, Agustus 16). *Dinamika Partai Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 Di Kabupaten Aceh Timur*. Diambil kembali dari repository.uninsu.ac.id: <http://repository.uninsu.ac.id/1355/1/TEISIS%20SYAMSUDDIN.pdf>
- Tarmijin. (2017, Agustus 28). *Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (Studi Terhadap Kemenangan PAN pada Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Bima*. Diambil kembali dari repositori.uin-alauddin.ac.id: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6452/1/Tarmijin.pdf>
- Ubaidullah, M., & Ardiansyah. (2019). Pelembagaan Partai Politik (Studi Kasus Dewan Pemimpin Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*.

Yurike, C. (2017). Pelembagaan PDI-P Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Pada Pemilu 2009-2014. *Jurnal Ilmu Politik Unair*.

Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. California: Sage

Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari, 1982, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc.: Boston London.

nuonline.co.id (diakses 2023, Maret 1) Kilas NU dan Politik. diambil dari <https://www.nu.or.id/opini/kilas-nu-dan-politik-q9jRI>.

kompas.com (diakses 2023, Maret 1), 1 Abad NU dan Kiprah Partai Nahdlatul Ulama' di Panggung Politik Nasional. diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/07/12282911/1-abad-nu-dan-kiprah-partai-nahdlatul-ulama-di-panggung-politik-nasional>.

fajarcirebon.com (diakses 2023, Maret 17), Kader-Kader Senior PKB Geram, Desak Hasan Basori Mundur. diambil dari <https://fajarcirebon.com/kader-kader-senior-pkb-geram-desak-hasan-basori-mundur/>.

pikiranrakyat.com (diakses 2023, Maret 31), dominasi PDIP di Kabupaten Cirebon Runtuh, PKB dan NasDem Tambah Kursi. diambil dari <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01311891/dominasi-pdip-di-cirebon-runtuh-pkb-dan-nasdem-tambah-kursi>.

AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 05/Un.10.6/IK/KM.05.01/01/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

02 Januari 2023

Yth.
Pimpinan DPC PKB Kabupaten Cirebon
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kabupaten Cirebon**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Rivadho Ryiamizard
NIM : 1806016072
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Cirebon, 05 Desember 1999
CPe-mail : rivadho39@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Karso Suwarsa
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa. Pakusamben, Kecamatan. Babakan, Kabupaten Cirebon

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dekan
Kantorbag Akademik

A. Gunawan, S.Ag, M.H

Terselasa :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 2. Dokumentasi Foto-Foto Kegiatan



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan Hasan Basori, Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, 04 Januari 2023



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan Waswin Janata, Sekertaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, 12 Januari 2023



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan M. Luthvi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, 24 Januari 2023



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan salah satu informan dari masyarakat Kabupaten Cirebon

Lampiran. 3 Dokumen AD/ART Hasil Muktamar PKB Tahun 2019



AD ART PKB

**ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**HASIL MUKTAMAR PKB
NUSA DUA, BALI
20-22 AGUSTUS 2019**



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Lampiran 4. Dokumen perolehan suara per-dapil PKB di DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2019

- a. Daerah Pemilihan 1 (Dapil 1; Kecamatan Sumber, Dukupuntang, Plumbon, Weru, dan Plered)



KABUPATEN/KOTA : CIRIBON
 PROVINSI : JAWA BARAT
 DAERAH PEMILIHAN : CIRIBON 1
 MODEL : DBL-DPRD
 KAB/KOTA : CIRIBON 1
 Lembar 5 dari 11
 08/09/2019

NO.	URAIAN	RINCIAN					Jumlah Akhir
		SUMBER	DUKUPUNTANG	PLUMBON	WERU	PLERED	
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON							
II. NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON							
A.1 Partai Kebangkitan Bangsa							
A.1.1	LUFTILA	1.201	802	1.347	1.402	1.053	5.012
A.2	WISWANI JANNIKH SH	581	234	404	1.740	618	3.377
3	N. NUDALIA	527	343	457	571	2.946	4.844
4	SUDIRMAN S. AN	1.410	359	461	402	287	2.919
5	NINGSI SETIYANINGSIH	315	144	2.512	1.000	266	4.237
6	HUSHA	700	2.211	1.042	756	746	4.945
7	ERSONI RIZKI	249	71	304	2.801	148	3.373
8	ERIKH SYAHRIADI MAKI	53	109	48	51	37	300
		228	308	2.743	824	916	5.079
B. JUMLAH SUARA SAKSI PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)							34.316
A.1 9 Partai Gerakan Jember Raya							
A.1.1	H. ERVATI	1.423	482	1.570	1.410	1.173	6.164
A.2	H. HAROLDI S. SH	1.205	484	7.853	1.797	1.229	12.103
3	H. H. HUNAWANAWA M. SH	491	131	311	829	1.229	3.091
4	SITI NURYANI	319	96	322	503	2.184	3.625
5	SOVANDI S. SH	140	48	130	134	79	531
6	WILSON PANJABI S. SH	134	60	639	105	109	1.247
7	SITI MARDIANI	66	21	40	44	28	229
8	MUHAMMAD YAZID S. AN S. AN	43	29	30	41	42	183
		228	126	116	233	184	889
JUMLAH SUARA SAKSI PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)							24.012

NAMA DAN TANDA TANGAN KEPALA KABUPATEN CIRIBON
 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

Activate Windows
 Go to Settings to activate Windows.

- b. Daerah Pemilihan 2 (Dapil 2; Kecamatan Palimanan, Klangeran, Ciwaringin, Depok, Gempol, dan Jamblang)



KABUPATEN/KOTA *1 : CIRIBON

PROVINSI : JAWA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : CIRIBON 2



MODEL : DBL DPDP
KAB/KOTA : 3601/0074
Nomor 3 dari 11
DBL PK 3A

NO.	URUTAN	KANDUNGAN						RINCIAN										Jumlah Akhir							
		Palimanan	Klangeran	Ciwaringin	Depok	Gempol	Jamblang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
<p>NO. 1 Partai Kebangkitan Bangsa</p> <p>A.1 1. KASIA TOHIR 968 477 1.024 1.137 1.196 200</p> <p>2. ILM SYAFIILLAHIM 520 120 137 2.060 271 100</p> <p>3. YUDHANA 414 135 1.287 814 142 41</p> <p>4. WIDAYANA 339 179 392 592 110 19</p> <p>5. KAMUNDI 115 38 245 325 1.420 7</p> <p>6. LEO ROHAYATI MOH JAMALI, S.K.P., N.M. 731 54 461 325 1.420 100</p> <p>7. MOHNO, S.P.W. 387 50 1.223 272 1.523 40</p> <p>147 93 208 214 1.523</p>																									
<p>B. JUMLAH SUARA SAAT PAKTA POLITIK DAN CALON (A.1-A.3) 3.621 1.146 5.097 4.975 5.780 549 21.148</p>																									
<p>A.2 1. SODIYATUN, S.H. 772 699 699 651 674 345</p> <p>2. DIDI HUSKATI MUDAMARTO, N.M. 675 1.024 1.024 1.543 373 309</p> <p>3. HIKMATUS SALAMAH 483 968 968 597 882 520</p> <p>4. ASMAN, SE. 1.129 1.696 1.696 384 312 487</p> <p>5. SRI MASAROH 47 41 39 37 29 25</p> <p>6. MOH ASWADI 37 209 209 23 35 25 39</p> <p>7. MOH ASWADI 31 23 23 30 34 17</p> <p>130 363 63 229 157 1.347 2.487</p>																									
<p>B. JUMLAH SUARA SAAT PAKTA POLITIK DAN CALON (A.1-A.3) 3.866 1.360 2.463 2.214 2.384 3209 19.558</p>																									

Kepala dan Tanda Tangan KPU Kabupaten Cirebon
 Kepala dan Tanda Tangan KPU Kabupaten Cirebon
 Kepala dan Tanda Tangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
 Kepala dan Tanda Tangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon

- c. Daerah Pemilihan 3 (Dapil 3; Kecamatan Arjawinangun, Panguragan, Susukan, Gegesik, dan Kaliwedi)



KABUPATEN/KOTA 1 : CIRIBON
 PROVINSI : DAERAH PENJAJARAN
 : JAWA BARAT
 : CIRIBON 3



KODE
 DAPIL/DUA
 KAB/KOTA
 Nomor 7 dari 13

NO.	URUTAN	JURISDIKSI										JUMLAH ANDA
		ARJAWINANGUN	PANGURAGAN	GEGESIK	KALIWEDI	SUSUKAN	SUSUKAN	SUSUKAN	SUSUKAN	SUSUKAN	SUSUKAN	
W. DAFTAR PENGESAHAN SUKSES PARTAI POLITIK DAN SUKSES SUKSES												
II. HONOR, TAMBAH PARTAI DAN CALON												
A.1	1	1.842	696	1.407	1.029	923						6.097
A.2	1	2.729	173	932	374	523						6.731
	2	142	66	121	71	147						7.207
	3	3.633	424	950	1.242	827						6.694
	4	46	24	58	26	22						176
	5	21	4	44	13	8						90
	6	1.818	42	1.088	67	294						3.409
B. JUMLAH SUKSES DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (KANDU)												
A.1	2	12.893	1.209	5.881	3.126	3.444						26.913
A.2	1	954	623	1.188	1.349	1.043						5.146
	2	1.021	595	1.270	1.402	2.204						7.299
	3	137	99	165	292	143						836
	4	80	49	631	82	74						827
	5	95	21	280	57	54						507
	6	28	29	31	121	59						289
	7	26	18	23	44	19						142
Jumlah Sukses dan Partai Politik dan Calon												
A.1		2.281	1.434	3.590	3.720	4.085						12.345

DAFTAR TANDA TANGAN KPU KABUPATEN CIRIBON

DAFTAR TANDA TANGAN SUKSES PARTAI POLITIK

DAFTAR TANDA TANGAN SUKSES PARTAI POLITIK



- e. Daerah Pemilihan 5 (Dapil 5; Kecamatan Losari, Pabedilan, Babakan, Pangenan, dan Gebang)



KABUPATEN/NOTA 1

CIREBON

PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN

JAWA BARAT
CIREBON 5



KODE
DAPIL/DAPIL
NAMA/NOTA
Nomor 3 dari 11

NO.	URAIAN	LOKASI	PANGKALAN	BAKALAN	PANGSERAN	GERANG	SIKILAN	JUMLAH AKHIR
IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON								
NO. 1. Partai Kebangkitan Bangsa								
A.1	1. H. TANJUNG HIRAWATI	2.117	2.091	1.802	1.507	1.433		8.940
A.2	2. ADE HENDRA	1.375	921	650	1.636	1.412		5.074
	3. H. ISMAYATUL FAHRIYAH YUSUF H. ICENAN, H.P.	1.395	308	130	137	142		2.132
	4. ISONI SUKOTO KUSNADI	1.031	4.299	716	1.439	418		9.877
	5. KHARITAH, S.P.M.T	99	109	339	942	163		1.672
	6. SUKIRMAN, A.Md.Kep.	98	48	648	93	182		1.071
	7. (HUMAN)	93	79	125	111	181		591
		1.031	1.425	297	122	123		3.192
B. JUMLAH SUARA SAAT PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)								
B.	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	9.299	8.949	5.138	6.007	4.034		33.377
A.1	1. SOPRANA SIT	1.043	927	812	972	745		4.509
A.2	2. SITI NURULHADI	4.251	1.430	220	255	529		6.685
	3. SITI NURULHADI	291	231	427	273	191		1.313
	4. SUHENDRYAN	50	29	56	41	63		215
	5. RIYAN FERHAYANSYAH	26	11	16	12	14		79
	6. KHORRISON NUBEL YHOHMANI, A.Md	21	17	25	25	26		116
	7. (KATYAN)	17	14	12	6	10		59
Jumlah Suara Saat Partai Politik dan Calon (A.1+A.2)		5.813	2.760	1.656	4.120	1.622		15.986



DAFTAR TANDA TANGAN KEPERAWAN CIREBON
 NAMA DAN TANDA TANGAN PARTAI POLITIK DAN CALON

BIOGRAFI PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama : Rivadho Ryiamizard
2. Nim : 1806016072
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon/05 Desember 1999
4. Alamat : Desa Pakusamben, Babakan, Kabupaten Cirebon
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. No. HP : 081287432236
8. Email : rivadho39@gmail.com

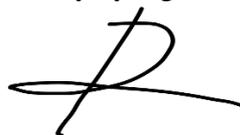
B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 PAKUSAMBEN
2. MTs NU PUTRA 1 BUNTET PESANTREN CIREBON
3. MAN 3 CIREBON

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Juni 2023

Saya yang bersangkutan



Rivadho Ryiamizard

1806016072